

LAPORAN KINERJA

Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan
Permukiman Sumatera III

2025



Laman Web
pkp.go.id/balai/p2p-sumatera-iii



email
bp3kp.sumatera3@pkp.go.id



Alamat
JI Diponegoro no 45





KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami sampaikan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Tahun 2025 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III mengacu pada amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan berdasarkan Peraturan Menteri PKP Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Kementerian PKP.

Laporan Kinerja ini mencakup pertanggungjawaban atas capaian kinerja program dan kegiatan di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Tahun 2025 dalam mendukung kinerja Direktorat Jenderal dan Sekretaris Jenderal pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui pelaksanaan sasaran "Meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni secara kolaboratif, terutama bagi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di wilayah Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, dan Provinsi Sumatera Barat".

Laporan Kinerja ini menggambarkan dinamika Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III termasuk dinamika satuan kerja sebagai pertanggungjawaban terhadap penggunaan seluruh sumber daya, memuat upaya dan metode yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah disusun dalam Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Tahun 2025-2029. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan baik untuk balai maupun satuan kerja di wilayah kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III demi terwujudnya pemerintahan yang akuntabel di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pekanbaru, Februari 2026

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
dan Kawasan Permukiman Sumatera III,



Yenni Sofyan Mora, S.T., M.Si.

NIP. 19810421 200812 2 001



RINGKASAN EKSEKUTIF

A. Tujuan dan Sasaran

Mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman periode tahun 2025-2029, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis-1 (SS-1) “Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan”, dan Sasaran Kegiatan-2 (SS-2) “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat BP3KP adalah UPT yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang penyediaan perumahan dan kawasan permukiman. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III merupakan Balai P3KP kelas I dan mempunyai tugas melaksanakan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial, dan fasilitasi serah terima aset.

Dalam rangka mendukung tercapainya pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III memiliki tujuan secara umum, yaitu “terlaksananya penyediaan perumahan dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni”.

B. Capaian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III melaksanakan kegiatan dengan *output* sebagai capaian terhadap dua sasaran kegiatan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu “Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan” dan “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman”.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III melaksanakan kegiatan yang mendukung Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Program Dukungan Manajemen. Pelaksanaan kegiatan mencakup tiga wilayah, yaitu Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Sumatera Barat.

Capaian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Tahun 2025

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Satuan	2025			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan					
KEGIATAN: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi					
1	Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100
2	Jumlah dokumen Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100
3	Jumlah dokumen Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	Laporan	1	1	100
4	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	2	2	100
5	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Kegiatan	1	1	100
6	Jumlah laporan kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	Laporan	1	1	100
7	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	Laporan	4	4	100
8	Jumlah laporan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Laporan	4	4	100
9	Jumlah laporan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Laporan	3	3	100
10	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	Laporan	3	3	100
11	Jumlah dokumen Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100
12	Jumlah dokumen Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100
13	Jumlah Komponen Rumah Untuk Mitigasi Bencana Perumahan Perdesaan	Unit	1	_*	_*

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Satuan	2025			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
KEGIATAN: Penyediaan Rumah Layak Huni					
1	Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas di Kawasan Permukiman	Unit	10	10	100
2	Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas di Perumahan Perkotaan	Unit	248	247	99,60
3	Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas di Perumahan Perdesaan	Unit	897	894	99,67
4	Jumlah rumah khusus yang terbangun di Perumahan Perdesaan	Unit	140	140	100
5	Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	Unit	102	102	100
6	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu di Kawasan Permukiman	Hektar	103.72	103.72	100
SK. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman					
1	Jumlah layanan perkantoran	layanan	4	4	100

Ket : * Anggaran terblokir

Secara keseluruhan, capaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III terhadap komitmen Perjanjian Kinerja tahun 2025 yaitu 99,98%. Terdapat indikator kinerja yang tidak tercapai secara maksimal, yaitu pada pelaksanaan kegiatan BPS di Provinsi Sumatera Barat (4 unit). Tidak tercapainya kegiatan tersebut secara maksimal disebabkan beberapa kendala yang menyebabkan pekerjaan tidak memungkinkan untuk dilanjutkan karena adanya bencana hidrometeorologi di Provinsi Sumatera Barat, pengunduran diri calon penerima bantuan, permasalahan tanah, masalah keluarga, tidak memenuhi *readiness criteria*, data penerima yang telah terdata sebagai pengganti.

Realisasi Anggaran

Alokasi pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja revisi akhir tahun 2025 sebesar Rp 182.839.655.000,00 dipergunakan dalam rangka merealisasikan komitmen BP3KP Sumatera III untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Akses Perumahan yang Layak dan Aman serta Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan. Pagu anggaran yang dipergunakan dalam pembiayaan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp. 164.674.986.293 (90,07%).

Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Nilai Efisiensi (%)
		Realisasi (Rp)	(%)		
1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III	3.839.563.000	3.112.890.440	81,07	100,00	123,35
2 Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat	110.633.495.000	95.222.258.349	86,07	99,91	116,08
3 Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau	39.504.333.000	39.155.083.991	99,12	100,00	100,89
4 Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau	28.862.264.000	27.184.753.513	94,19	100,00	106,17
Total	182.839.655.000	164.674.986.293	90,07	99,98	111,00

C. Permasalahan dan Tindak Lanjut

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III tahun 2025 dengan gambaran umum sebagai berikut:

1. Penyusunan Perencanaan Kegiatan pada BP3KP Sumatera III
 - a. Perubahan arah kebijakan dan program kegiatan baru yang mengakibatkan perubahan alokasi anggaran dan target realisasi program.
 - b. Alokasi anggaran tersedia pada semester 2 tahun anggaran sehingga menyebabkan keterlambatan pelaksanaan program.
 - c. Pengusul yang belum memahami syarat dan ketentuan atau mekanisme pelaksanaan program kegiatan.
 - d. Dokumen usulan dari pemerintah daerah yang belum matang dan belum menjadi prioritas oleh pemerintah daerah.
 - e. Penyesuaian terhadap peraturan dan pedoman baru dalam lingkup Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2. Pelaksanaan Bantuan Rumah Susun, Rumah Khusus, Rumah Swadaya, Sanitasi dan Kawasan Permukiman Kumuh
 - a. Pemahaman calon penerima bantuan masih terbatas terkait pelaksanaan bantuan baik dari segi kriteria usulan maupun pelaksanaan.
 - b. Keterlambatan pelaksanaan program pembangunan baru yang dimulai pada semester 2 karena adanya transisi perubahan kementerian.
 - c. Pelaksanaan serah terima aset yang telah lama terbangun belum optimal dikarenakan User/Pemerintah Daerah sulit menerima karena kurangnya kelengkapan dokumen eksternal dan internal dan kondisi fisik yang belum memenuhi kelayakan.

- d. Proses pelaksanaan fisik kegiatan terdampak akses lokasi yang sulit, ketersediaan material yang terbatas, dan jumlah tenaga kerja yang kurang memadai.
 - e. Belum maksimalnya sosialisasi terkait mekanisme usulan bantuan.
 - f. Pemahaman penerima bantuan terkait aset yang akan diserahkan masih terbatas, baik pemahaman oleh pemerintah daerah maupun instansi pengusul.
 - g. Pengusulan bantuan yang masih menggunakan metode *top down* sehingga instansi pengusul tidak dapat memaksimalkan usulan sesuai dengan kebutuhan.
 - h. Masih terdapat potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan.
 - i. Terdapat kondisi *force majeure* berupa bencana alam banjir di Provinsi Sumatera Barat yang mengakibatkan progres fisik pekerjaan terlambat dari jadwal yang telah ditentukan.
3. Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan *Intern* dan Manajemen Risiko
- a. Sebagian pegawai di lingkungan Balai dan Satuan Kerja masih belum sepenuhnya memahami pentingnya manajemen risiko.
 - b. Beberapa risiko dianggap tidak signifikan atau terabaikan, padahal dapat berkembang menjadi masalah besar.
 - c. Manajemen risiko memerlukan pendekatan yang kolaboratif dan melibatkan semua pihak terkait, tetapi sering kali komunikasi terhambat oleh perbedaan prioritas antar bagian.

Sebagai upaya perbaikan kinerja dalam menghadapi kendala yang ada, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan Perencanaan Kegiatan pada BP3KP Sumatera III
 - a. Pelaksanaan kegiatan pemantauan secara aktif dengan memanfaatkan media teknologi agar terjadi keberlanjutan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk memastikan eksistensi dan keterlibatan kelembagaan PKP baik dalam pelaksanaan kegiatan fisik maupun pengawasan.
 - b. Pemberian pendampingan dan pemahaman kepada Pemerintah Daerah terkait urgensi RP3KP sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan bidang PKP dan bukan hanya sebagai bahan pemenuhan *readiness criteria* untuk mendapatkan program bantuan dari Pemerintah Pusat.
2. Pelaksanaan Bantuan Rumah Susun, Rumah Khusus, Rumah Swadaya, Sanitasi dan Kawasan Permukiman Kumuh
 - a. Pemberian sosialisasi secara aktif kepada calon penerima bantuan terkait pedoman pelaksanaan bantuan perumahan mengacu Surat Edaran yang berlaku untuk memberikan pemahaman terkait pemenuhan persyaratan usulan maupun pelaksanaan.
 - b. Menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan sesuai arahan dari pusat dan melakukan penyesuaian anggaran.

- c. Melakukan percepatan serah terima aset melalui komunikasi aktif dengan para penerima manfaat bantuan perumahan.
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk dapat lebih cepat menindaklanjuti kendala yang terjadi di lapangan.
3. Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan *Intern* dan Manajemen Risiko
- a. Melaksanakan kegiatan sosialisasi secara aktif dan melibatkan pegawai dalam pelatihan dan sertifikasi manajemen risiko.
 - b. Membangun budaya keterbukaan dan kolaborasi, sehingga risiko dapat lebih mudah diidentifikasi dan dikelola serta melaksanakan pembahasan secara berkala melalui rapat internal.
 - c. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan serta memperbaiki proses yang ada berdasarkan hasil evaluasi tersebut.
 - d. Telah tersusunnya hasil identifikasi risiko baru yang sesuai dengan pemetaan *Corruption Risk Assessment (CRA)*.
 - e. Melaksanakan sosialisasi secara aktif kepada seluruh pegawai terkait penerapan anti penyuapan di lingkungan balai dan satuan kerja serta mengikutsertakan seluruh pegawai dalam penguatan komitmen anti penyuapan.
 - f. Melaksanakan sosialisasi kepada pihak eksternal terkait penerapan sistem manajemen anti penyuapan di balai serta melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan kebutuhan dan kelengkapan dokumen selalu termutakhirkan.
 - g. Berupaya melengkapi bukti-bukti dukung yang dibutuhkan dalam pembangunan Zona Integritas (ZI).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR SINGKATAN.....	xxi
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tugas dan Fungsi	1
1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia.....	3
1.3.1 Struktur Organisasi.....	3
1.3.2 Sumber Daya Manusia	5
1.3.2.1.Jumlah SDM berdasarkan Status Kepegawaian.....	5
1.3.2.2.Jumlah SDM Berdasarkan Golongan dan Kelompok Jabatan.....	6
1.3.2.3.Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan dan Usia	7
1.4 Sarana dan Prasarana.....	8
1.5 Isu Strategis	13
1.6 Sistematika Laporan	13
PERENCANAAN KINERJA.....	17
2.1 Rencana Strategis	17
2.1.1 Visi dan Misi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	17
2.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi.....	18
2.2 Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III	29
2.2.1 Perjanjian Kinerja (PK) Awal.....	29
2.2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Akhir	32
2.2.3 Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja (PK).....	34

2.3	Metode Pengukuran	36
2.4.1	Target Kinerja Tahun Ini Berdasarkan Rencana Strategis	37
2.4	DIPA	38
	AKUNTABILITAS KINERJA	43
3.1	Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	43
3.2	Capaian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III	44
3.2.1	Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	47
3.2.2	. Kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	50
3.2.3	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	58
3.2.4	Unit Rumah Swadaya Melalui Peningkatan Kualitas di Kawasan Permukiman	69
3.2.5	Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Terpadu di Kawasan Permukiman	71
3.2.6	Penyusunan Kebijakan, Startegi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	75
3.2.7	Jumlah laporan Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	79
3.2.8	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	83
3.2.9	Jumlah laporan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	86
3.2.10	Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	91
3.2.11	Unit Rumah Swadaya Melalui Peningkatan Kualitas di Perumahan Perkotaan	94
3.2.12	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	99
3.2.13	Jumlah laporan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	101
3.2.14	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	102
3.2.15	Jumlah rumah khusus yang terbangun di Perumahan Perdesaan	105
3.2.16	Unit Rumah Swadaya Melalui Peningkatan Kualitas di Perumahan Perdesaan ..	107

3.2.17	Pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko dan dokumen Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	113
3.2.18	Layanan perkantoran.....	118
3.3	Analisis Perbandingan Kinerja.....	119
3.3.1	Analisis Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya dan Beberapa Tahun Terakhir	119
3.3.2	Analisis Perbandingan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III dengan Target Jangka Menengah	125
3.3.3	Perbandingan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Tahun 2025 dengan Organisasi Sejenis yang Setara	126
3.4	Analisis Realisasi Anggaran	131
3.4.1	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).....	131
3.4.2	Realisasi Anggaran TA 2025	141
3.4.3	Perbandingan Realisasi Anggaran TA 2025 dengan Tahun Sebelumnya	142
3.5	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	144
3.6	Analisis Pemanfaatan Informasi dalam Laporan Kinerja	147
3.7	Faktor Pendukung Keberhasilan dan Penyebab Kegagalan.....	149
	PENUTUP	153
4.1	Simpulan Umum	153
4.1.1	Faktor Pendukung Keberhasilan	154
4.1.2	Permasalahan.....	156
4.2	Rekomendasi dan Tindak Lanjut.....	158
	Lampiran.....	163
	Lampiran 1. Perjanjian Kinerja.....	163
	Lampiran 2. Berita Acara Kesepakatan Capaian Ouput Tahun 2025	172
	Lampiran 3. Bukti Dukung Capaian Kinerja.....	177
	Lampiran 4. Penghargaan.....	183
	Lampiran 5. Dokumentasi Kegiatan.....	183

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Daftar Barang Milik Negara Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III	8
Tabel 1. 2. Pemanfaatan Media Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III	12
Tabel 2. 1. Sasaran Strategis Kementerian PKP Tahun 2025-2029	17
Tabel 2. 2. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	20
Tabel 2. 3 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	21
Tabel 2. 4 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	23
Tabel 2. 5 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	25
Tabel 2. 6 Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal	26
Tabel 2. 7 Tabel Target Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025	29
Tabel 2. 8 Target Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Tahun 2025	31
Tabel 2. 9 Target Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Revisi I (Akhir) Tahun 2025	32
Tabel 2. 10 Kronologi perubahan target PK Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III TA 2025	34
Tabel 2. 11 IKU Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III tahun 2025-2029	36
Tabel 2. 12 Target sasaran kegiatan tahun 2025 menurut Renstra	37
Tabel 2. 13. Rekapitulasi DIPA Awal Satuan Kerja Wilayah Sumatera III	39
Tabel 2. 14. Rekapitulasi DIPA pada PK Awal Satuan Kerja Wilayah Sumatera III	39
Tabel 2. 15. Rekapitulasi DIPA pada PK Akhir Satuan Kerja Wilayah Sumatera III	40
Tabel 3. 1. Hasil evaluasi AKIP Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III tahun 2023	43

Tabel 3. 2.Tindak lanjut hasil evaluasi AKIP tahun 2023	43
Tabel 3. 3.Capaian kinerja utama Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III tahun 2025	45
Tabel 3. 4.Capaian Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 2025	47
Tabel 3. 5.Capaian Jumlah laporan kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tematik penyelenggaraan Kawasan permukiman dan akuntabilitas kinerja TA 2025	51
Tabel 3. 6.Tabel Pelaksanaan Kegiatan BSPS TA 2025 Delineasi Pesisir	52
Tabel 3. 7.Tabel Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Peningkatan Kualitas Sanitasi.....	54
Tabel 3. 5.Capaian Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh TA 2025.....	58
Tabel 3. 8.Tabel Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	59
Tabel 3. 9.Capaian kegiatan BSPS BP3KP Sumatera III TA 2025 di Delineasi Pesisir.....	69
Tabel 3. 10. Rincian pelaksanaan kegiatan BSPS Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III TA 2025 Delineasi Pesisir	69
Tabel 3. 11.Tabel Progres Peningkatan Kualitas Kumuh tanggal 31 Desember 2025	72
Tabel 3. 12. Tabel Realisasi Kegiatan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah.....	74
Tabel 3. 13. Capaian penyusunan Kebijakan, Startegi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan TA 2025	75
Tabel 3. 14. Hasil notulen dari kegiatan Sinkronisasi dan Konsolidasi Pendataan Perumahan di Wilayah BP3KP Sumatera III	76
Tabel 3. 15.Capaian Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan TA 2025.....	79
Tabel 3. 16.Tabel Kegiatan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	80

Tabel 3. 17. Capaian Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan TA 2025	83
Tabel 3. 18. Capaian Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	83
Tabel 3. 19. Capaian laporan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan TA 2025	86
Tabel 3. 20. Tabel Capaian laporan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	87
Tabel 3. 21. Capaian pembangunan rumah susun Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III TA 2025	92
Tabel 3. 22. Rincian pelaksanaan pembangunan rumah susun Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III TA 2025	92
Tabel 3. 23. Tabel Capaian kegiatan BSPS BP3KP Sumatera III TA 2025 di Delineasi Perkotaan	95
Tabel 3. 24. Rincian pelaksanaan kegiatan BSPS Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III TA 2025 Delineasi Perkotaan	95
Tabel 3. 25. Tabel Permasalahan Pelaksanaan BSPS di Delineasi Perkotaan	97
Tabel 3. 26. Laporan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan TA 2025 ..	99
Tabel 3. 27. Capaian Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan TA 2025 ..	99
Tabel 3. 28. Laporan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan TA 2025	101
Tabel 3. 29. Capaian Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan TA 2025	101
Tabel 3. 30. Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	103
Tabel 3. 31. Capaian Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	103

Tabel 3. 32. Capaian pembangunan rumah khusus Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III TA 2025	106
Tabel 3. 33. Rincian pelaksanaan pembangunan rumah khusus Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III TA 2024	106
Tabel 3. 34. Tabel Capaian kegiatan BSPS BP3KP Sumatera III TA 2025 di Delineasi Perdesaan	107
Tabel 3. 35. Rincian pelaksanaan kegiatan BSPS Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III TA 2025 Delineasi Perdesaan	107
Tabel 3. 36. Tabel Permasalahan Pelaksanaan BSPS di Delineasi Perdesaan	111
Tabel 3. 37. Tabel Capaian Pembangunan Zona Integritas Tiap Area Perubahan	115
Tabel 3. 38. Capaian layanan perkantoran TA 2025	118
Tabel 3. 39. Realisasi kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III tahun 2021-2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja	121
Tabel 3. 40. Perbandingan kinerja berdasarkan target Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III TA 2025	125
Tabel 3. 41. Pagu anggaran pelaksanaan Program dan Kegiatan di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III berdasarkan DIPA Tahun 2025	131
Tabel 3. 42. Kronologi perubahan DIPA Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III TA 2025	132
Tabel 3. 43. Kronologi perubahan DIPA Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat TA 2025	133
Tabel 3. 44. Kronologi perubahan DIPA Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau TA 2025	136
Tabel 3. 45. Kronologi perubahan DIPA Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau TA 2025	139
Tabel 3. 46. Realisasi Anggaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III TA 2024	142

Tabel 3. 47. Realisasi Anggaran BP2P 2024 dan BP3KP 2025	143
Tabel 3. 48. Efisiensi Anggaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Tahun 2025	144
Tabel 3. 49. Efisiensi SDM di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III	146

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Struktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III.....	5
Gambar 1. 2. Komposisi pegawai berdasarkan status kepegawaian	5
Gambar 1. 3. Komposisi pegawai berdasarkan unit penempatan	6
Gambar 1. 4. Komposisi pegawai berdasarkan golongan dan jenis kelamin	6
Gambar 1. 5. Komposisi pegawai berdasarkan jabatan dan jenis kelamin	7
Gambar 1. 6. Komposisi pegawai berdasarkan pendidikan dan usia	7
Gambar 2. 1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	19
Gambar 2. 2. Distribusi Unit Organisasi Koordinator-Pengampu-Kontributor	19
Gambar 3. 1. Laporan Akhir 2025 Klinik PKP BP3KP Sumatera III	48
Gambar 3. 2. Ruang Pelayanan Klinik PKP BP3KP Sumatera III.....	48
Gambar 3. 3. Leaflet Klinik PKP	48
Gambar 3. 4. Gambar Banner Klinik PKP dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Lainnya	49
Gambar 3. 5. Unggahan Infografis dan Videografis Klinik PKP di Instagram BP3KP Sumatera III	49
Gambar 3. 6. Konsultasi di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	50
Gambar 3. 7. Kegiatan Sosialisasi Klinik PKP di CFD Kota Pekanbaru	50
Gambar 3. 11. Kegiatan Konsultasi di acara RP3KP di Wilayah Sumatera dan Kalimantan	50
Gambar 3. 12. Laporan Akhir Pemantauan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	51
Gambar 3. 13. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan BSPS TA 2025	53

Gambar 3. 14. Sosialisasi Kepada Masyarakat Terkait Mekanisme BSPS	54
Gambar 3. 15. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi I	77
Gambar 3. 9. Rapat Sinkronisasi Program dan Konsolidasi Pendataan Perumahan II	78
Gambar 3. 10. Kegiatan Konsultasi Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	79
Gambar 3. 11. Kegiatan Konsultasi di acara RP3KP di Wilayah Sumatera dan Kalimantan	79
Gambar 3. 16. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Rusun Kejaksaaan Tinggi Riau	94
Gambar 3. 17. Proses Pelaksanaan BSPS di Kota Padang	96
Gambar 3. 18. Proses Pelaksanaan BSPS di Kota Solok	96
Gambar 3. 19. Proses Pelaksanaan BSPS di Kota Dumai	96
Gambar 3. 20. Proses Pelaksanaan BSPS di Kota Pekanbaru	97
Gambar 3. 21. Pelaksanaan BSPS di Provinsi Sumatera Barat	110
Gambar 3. 22. Pelaksanaan BSPS di Provinsi Riau	111
Gambar 3. 23. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan kinerja pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko	118

DAFTAR SINGKATAN

AKIP	: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
ASN	: Aparatur Sipil Negara
BMN	: Barang Milik Negara
BP3KP	: Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
BSPS	: Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
CPB	: Calon Penerima Bantuan
CRA	: <i>Corruption Risk Assessment</i>
CROP	: <i>Certified Risk Officer in Public Sector</i>
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Ditjen	: Direktorat Jenderal
IKK	: Indikator Kinerja Kegiatan
IKU	: Indikator Kinerja Utama
Korkab	: Koordinator Kabupaten
KRO	: Klasifikasi Rincian Output
LHE	: Lembar Hasil Evaluasi
MBR	: Masyarakat Berpenghasilan Rendah
MYC	: <i>Multi Years Contract</i>
NAHP	: <i>National Affordable Housing Program</i>
PBG	: Persetujuan Bangunan Gedung
PK	: Perjanjian Kinerja
PKP	: Perumahan dan Kawasan Permukiman
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
Pokja	: Kelompok Kerja
PPK	: Pejabat Pembuat Komitmen
PPPK	: Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
PSU	: Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
RAB	: Rencana Anggaran Biaya
Renstra	: Rencana Strategis
RKA-K/L	: Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
RO	: Rincian Output
RP3KP	: Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RTLH	: Rumah Tidak Layak Huni

SDM	: Sumber Daya Manusia
Sekjen	: Sekretaris Jenderal
SK	: Sasaran Kegiatan
SKP	: Sasaran Kinerja Pegawai
SMAP	: Sistem Manajemen Anti Penyuapan
SP	: Sasaran Program
SPM	: Standar Pelayanan Minimal
SS	: Sasaran Strategis
TFL	: Tenaga Fasilitator Lapangan
Unor	: Unit Organisasi
WBK	: Wilayah Bebas dari Korupsi
ZI	: Zona Integritas



Bab.

1

Pendahuluan

- ***Latar Belakang***
- ***Tugas dan Fungsi***
- ***Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia***
- ***Sarana dan Prasarana***
- ***Isu Strategis***
- ***Sistematika Laporan***



Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan
Kawasan Permukiman Sumatera III

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk perwujudan kewajiban dari setiap instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kinerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan atas penggunaan anggaran.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan melalui Perjanjian Kinerja tahun 2025. Laporan kinerja ini menyajikan realisasi capaian atas penggunaan seluruh sumber daya yang dimiliki seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran yang telah ditetapkan.

1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat BP3KP adalah UPT yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang penyediaan perumahan dan kawasan permukiman.

TUGAS

Melaksanakan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial, dan fasilitasi serah terima aset.

FUNGSI

1. Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
2. Penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
3. Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
4. Pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
6. Pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
7. Pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial;
8. Pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
9. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
10. Pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;
11. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;
12. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;
13. Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;
14. Pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta sistem pengendalian anti korupsi dan penyusunan; dan
15. Pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.

1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

1.3.1 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III dipimpin oleh seorang Kepala Balai dan didukung Subbagian Umum dan Tata Usaha, Seksi Pelaksanaan Wilayah, dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi.

1. Subbagian Umum dan Tata Usaha

Subbagian Umum dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan administrasi sumber daya manusia, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas, koordinasi administrasi pelaksanaan sistem pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.

2. Seksi Pelaksanaan Wilayah 1

Seksi Pelaksanaan Wilayah I mempunyai tugas:

- Melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pembinaan usaha dan perlindungan konsumen, serta koordinasi dan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial; dan
- Melakukan koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data, pada wilayah pesisir sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai deliniasi perkotaan, perdesaan, dan pesisir.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III didukung oleh dua seksi pelaksanaan wilayah, yaitu wilayah I bertanggung jawab atas provinsi Sumatera Barat serta wilayah II bertanggung jawab atas provinsi Riau dan provinsi Kepulauan Riau. Seksi Pelaksanaan Wilayah I dan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, penyiapan bahan penyusunan rencana teknis, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, koordinasi dan dukungan penanggulangan pasca bencana, serta koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian di wilayah I dan wilayah II.

3. Seksi Pelaksanaan Wilayah II

Seksi Pelaksanaan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis perumahan, koordinasi penyediaan lahan,

pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data pada wilayah perkotaan dan perdesaan sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai delineasi perkotaan, perdesaan, dan pesisir.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III didukung oleh 3 Satuan Kerja, yaitu:

- a. Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat;
- b. Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau; dan
- c. Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi dipimpin oleh Kepala Satuan Kerja dan didukung dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Susun dan Rumah Khusus
PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus bertugas melaksanakan kegiatan pembangunan rumah susun dan rumah khusus.
- b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Swadaya, PSU dan Kawasan Permukiman
PPK Rumah Swadaya dan Rumah Umum dan Komersial bertugas melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan pembangunan PSU perumahan.
- c. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM)
PP-SPM bertugas melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran pekerjaan.
- d. Bendahara Pengeluaran
Bendahara pengeluaran merupakan pejabat perbendaharaan negara yang bertugas melakukan pembayaran atas uang yang ada dalam kewenangannya.



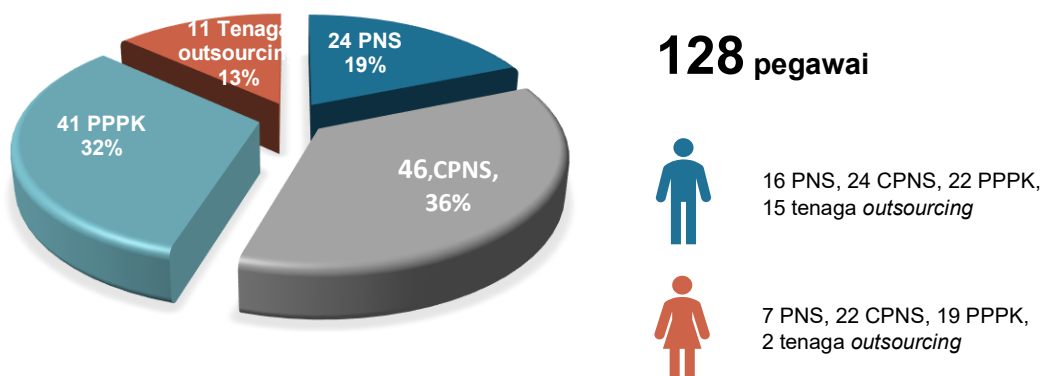
Gambar 1. 1.Struktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

1.3.2 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu kegiatan sehingga perlu dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi suatu organisasi. Suatu organisasi perlu didukung dengan pegawai yang sesuai, baik dari kuantitas, kualitas, strategi, dan operasional yang baik untuk mencapai tujuannya.

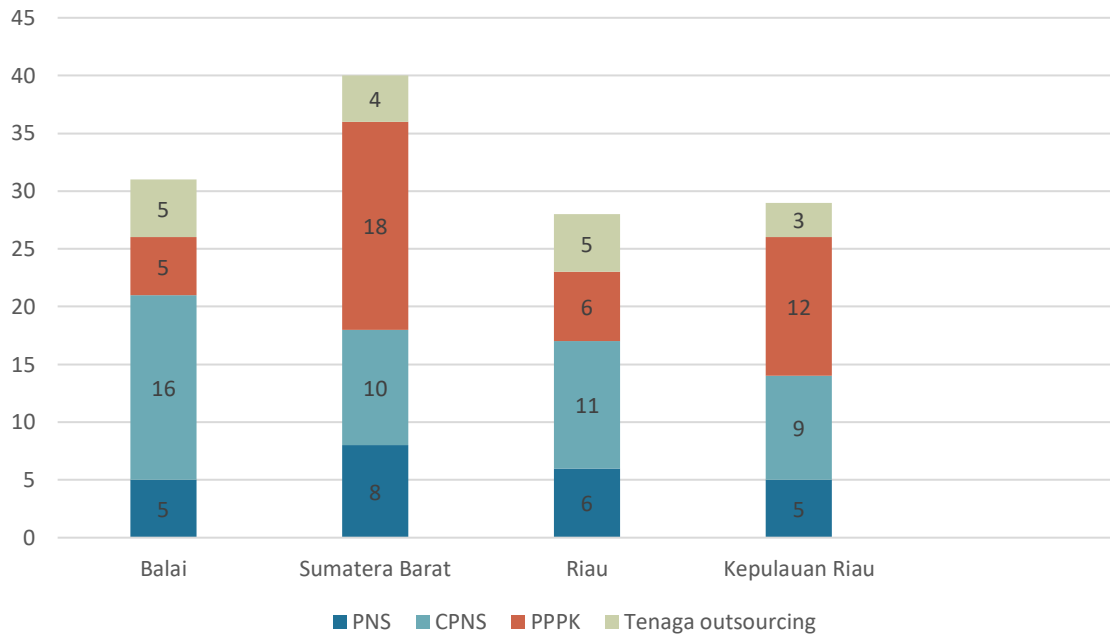
1.3.2.1. Jumlah SDM berdasarkan Status Kepegawaian

Dalam rangka mendukung capaian kinerja tahun 2025, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III didukung oleh SDM sebanyak 128 orang yang terdiri atas 24 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 46 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), 41 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan 17 orang tenaga *outsourcing*.



Gambar 1. 2. Komposisi pegawai berdasarkan status kepegawaian

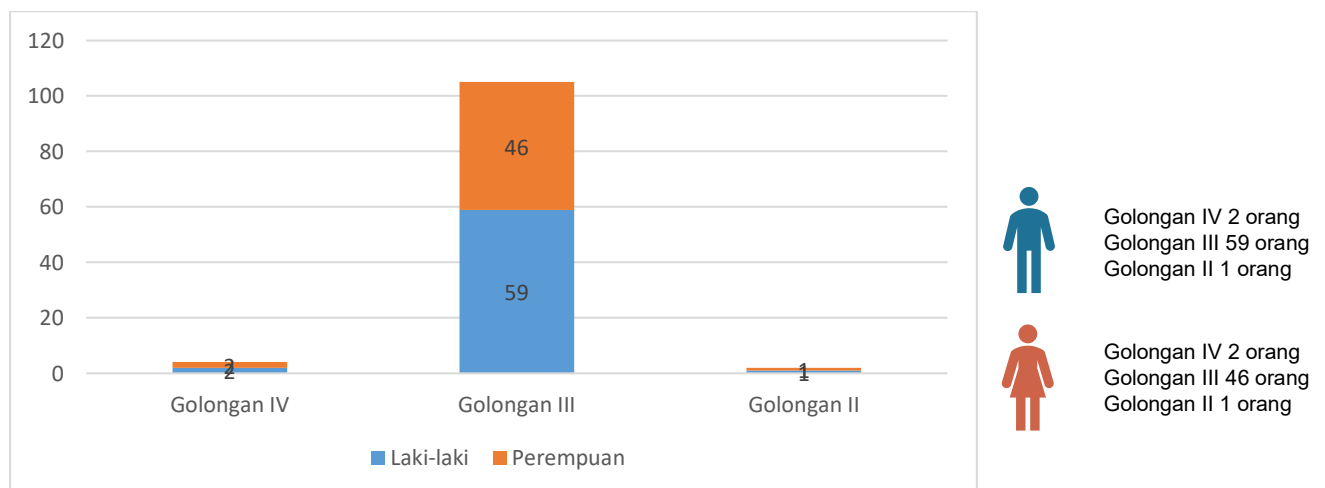
Kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III dilaksanakan dengan dukungan SDM yang mencakup wilayah kerja Balai, Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat, Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Riau.



Gambar 1. 3. Komposisi pegawai berdasarkan unit penempatan

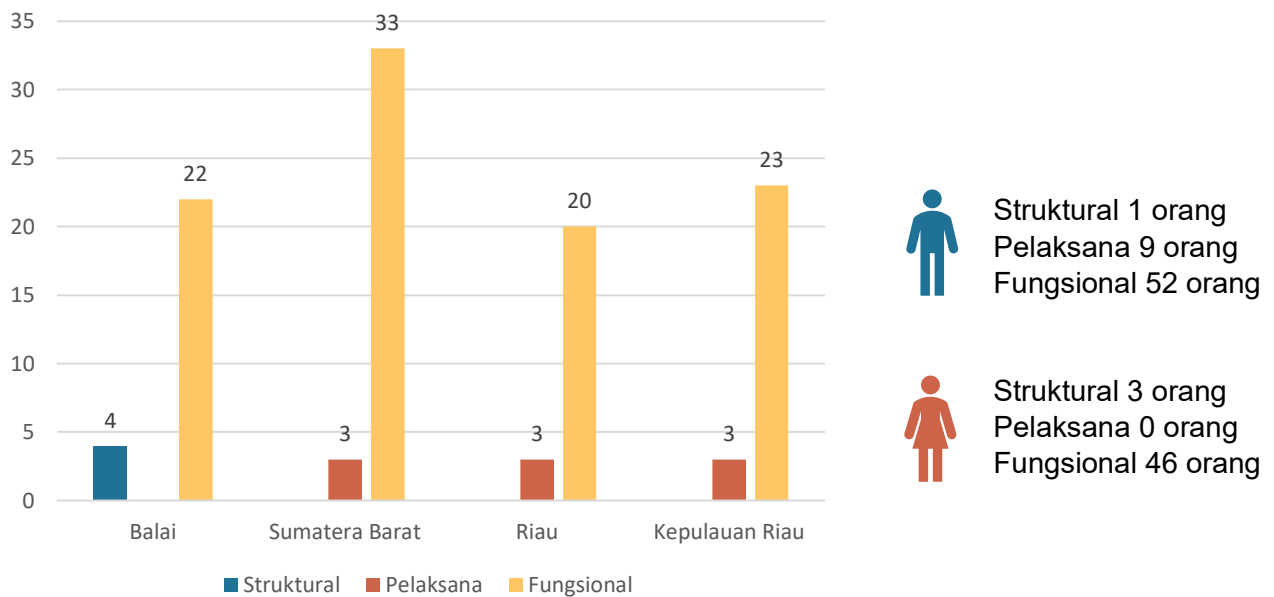
1.3.2.2. Jumlah SDM Berdasarkan Golongan dan Kelompok Jabatan

Berdasarkan golongan, PNS, CPNS dan PPPK Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III sebanyak 111 orang didominasi oleh golongan II sebanyak 2 orang atau 1,80% golongan III sebanyak 105 orang atau 94,60%. Sementara, golongan IV sebanyak 4 orang atau 3,60 %. Perbandingan PNS dan PPPK di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III secara menyeluruh berdasarkan golongan dapat dilihat sebagai berikut.



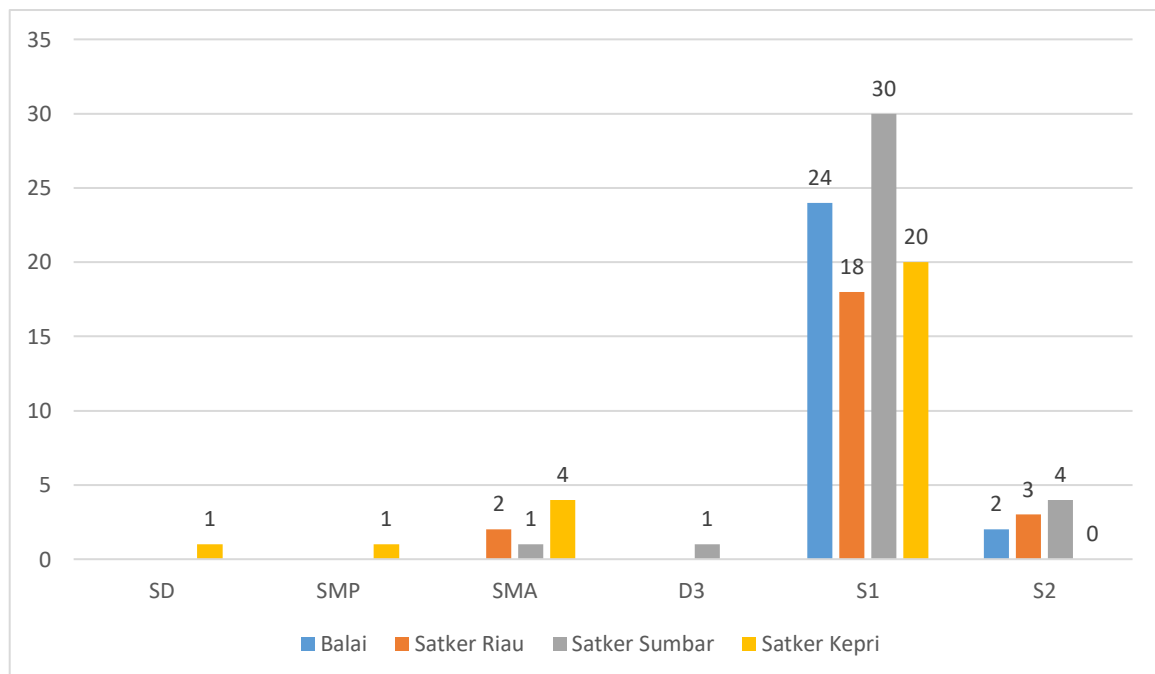
Gambar 1. 4. Komposisi pegawai berdasarkan golongan dan jenis kelamin

Pada tahun 2025, Pegawai Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III didominasi oleh jabatan fungsional sebanyak 105 orang yang didominasi oleh jabatan fungsional penata kelola perumahan.



Gambar 1. 5. Komposisi pegawai berdasarkan jabatan dan jenis kelamin

1.3.2.3. Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan dan Usia



Gambar 1. 6. Komposisi pegawai berdasarkan pendidikan dan usia

Berdasarkan tingkat pendidikan PNS dan PPPK Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III mayoritas merupakan lulusan SD sebanyak 1 orang (0,9 %), SMP sebanyak 1 orang (0,9 %), SMA sebanyak 7 orang (6,31 %), D3 sebanyak 1 orang (0,9 %), sarjana (S1) sebanyak 92 orang (82,88 %) dan sebanyak 9 orang (9,1 %) merupakan

lulusan master (S2). Dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas SDM berbasis kompetensi, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III memberikan dukungan pengembangan pegawai melalui jalur pendidikan atau tugas belajar. Dukungan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi. Peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan kepribadian profesional sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier.

1.4 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dalam mewujudkan upaya pencapaian kinerja yang optimal. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III tahun 2025, para pegawai didukung dengan penggunaan perangkat sarana dan prasarana kantor serta Barang Milik Negara (BMN).

Tabel 1. 1. Daftar Barang Milik Negara Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III			
1	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	Buah	1
2	Lemari Kayu	Buah	19
3	Brandkas	Buah	1
4	Locker	Buah	1
5	Lemari Display	Buah	1
6	Alat Penghancur Kertas	Buah	1
7	LCD Projector/Infocus	Buah	1
8	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	1
9	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	49
10	Meja Kerja Kayu	Buah	13
11	Kursi Besi/Metal	Buah	97
12	Meja Rapat	Buah	5
13	Backdrop TV/Wardrobe	set	3
14	Sofa	set	1
15	A.C. Split	Buah	10
16	Televisi	Buah	2
17	Loudspeaker	Buah	2
18	Microphone	Buah	10
19	Power Amplifier	Buah	1

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
20	Tripod Camera	Buah	2
21	Camera Digital	Buah	1
22	Camera Conference	Buah	2
23	Drone	Buah	1
24	Gimbal Tripod	Buah	1
25	Alat Studio Lainnya	dummy	1
26	P.C Unit	Buah	4
27	Lap Top	Buah	14
28	Note Book	Buah	8
29	Tablet PC	Buah	8
30	CPU (Peralatan Personal Komputer)	Buah	1
31	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	5
32	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	2
33	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	Buah	3
34	Laptop Case	dummy	2
35	Software Komputer	dummy	4
Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat			
1	Lemari Kayu	Buah	175
2	Rak Besi	Buah	4
3	Brandkas	Buah	1
4	White Board	Buah	1
5	Alat Penghancur Kertas	Buah	1
6	LCD Projector/Infocus	Buah	2
7	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	1
8	Meja Kerja Kayu	Buah	117
9	Kursi Besi/Metal	Buah	53
10	Kursi Kayu	Buah	330
11	Sice	Buah	2
12	Meja Rapat	Buah	3
13	Tempat Tidur Kayu	Buah	168
14	Meja Makan Kayu	Buah	84
15	Sofa	set	124
16	Meubelair Lainnya	dummy	0
17	Lemari Es	Buah	1
18	A.C. Split	Buah	80
19	Televisi	Buah	2
20	Dispenser	Buah	1
21	Tempat Sampah	Buah	1

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
22	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	dummy	0
23	Rak Peralatan	Buah	2
24	Camera Digital	Buah	3
25	Video Conference	Buah	1
26	Drone	Buah	3
27	GPS Receiver	Buah	0
28	Kamera Udara	Buah	0
29	Alat Studio Lainnya	dummy	0
30	Facsimile	Buah	1
31	Finger Printer Time and Attandance Acces Control System	Buah	1
32	Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	dummy	1
33	Serial Scanner/Printer	Buah	0
34	P.C Unit	Buah	9
35	Lap Top	Buah	1
36	Note Book	Buah	20
37	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	13
38	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	3
39	Flat/Rumah Susun Permanen	Unit	2
40	Jalan Khusus Kompleks	M2	503
Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau			
1	Memori Programmer	Buah	1
2	Lemari Besi/Metal	Buah	5
3	Lemari Kayu	Buah	155
4	Rak Besi	Buah	1
5	Brandkas	Buah	1
6	Laci Box	Buah	1
7	CCTV - Camera Control Television System	Buah	7
8	LCD Projector/Infocus	Buah	1
9	Meja Kerja Kayu	Buah	173
10	Kursi Besi/Metal	Buah	32
11	Kursi Kayu	Buah	144
12	Meja Rapat	Buah	3
13	Tempat Tidur Kayu	Buah	144
14	Sofa	set	5
15	Meubelair Lainnya	dummy	1
16	Kipas Angin	Buah	1
17	Televisi	Buah	3
18	Camera Digital	Buah	2

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
19	Camera Conference	Buah	1
20	Drone	Buah	2
21	GPS Receiver	Buah	1
22	Alat Studio Lainnya	dummy	1
23	Facsimile	Buah	1
24	P.C Unit	Buah	16
25	Lap Top	Buah	14
26	Note Book	Buah	0
27	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	20
28	External/ Portable Hardisk	Buah	2
29	Memori Programmer	Buah	1
30	Taman Permanen	Unit	1
31	Flat/Rumah Susun Permanen	Unit	1
Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Riau			
1	Mesin Penghitung Uang	Buah	1
2	Lemari Kayu	Buah	560
3	Rak Kayu	Buah	1
4	Brandkas	Buah	1
5	CCTV - Camera Control Television System	Buah	1
6	Alat Penghancur Kertas	Buah	1
7	LCD Projector/Infocus	Buah	1
8	Meja Kerja Kayu	Buah	536
9	Kursi Besi/Metal	Buah	20
10	Kursi Kayu	Buah	586
11	Tempat Tidur Kayu	Buah	560
12	Meja Makan Kayu	Buah	60
13	Sofa	set	60
14	Meubelair Lainnya	dummy	0
15	Televisi	Buah	2
16	Camera Electronic	Buah	0
17	Camera Digital	Buah	2
18	Camera Conference	Buah	1
19	Drone	Buah	2
20	Alat Tulis Gambar	Buah	0
21	Kamera Udara	Buah	0
22	Facsimile	Buah	1
23	Kamera Digital	Buah	0
24	P.C Unit	Buah	18
25	Lap Top	Buah	13
26	Note Book	Buah	0

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
27	Personal Komputer Lainnya	dummy	0
28	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	19
29	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	1
30	Peralatan Komputer Lainnya	dummy	0
31	Flat/Rumah Susun Permanen	Unit	2

Pada tahun 2025, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III melakukan pembaharuan dan penyempurnaan tatanan kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Dalam rangka mendukung hal tersebut, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III baik di balai maupun di satuan kerja bekerja maksimal dalam mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada di masing-masing unit. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III juga memanfaatkan atau mengembangkan beberapa media penunjang berbasis digital dalam menunjang keterbukaan informasi publik dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Tabel 1. 2. Pemanfaatan Media Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

No	Aplikasi / Media	Keterangan	Alamat
1	Whatsapp Klinik PKP	Media layanan Klinik PKP secara <i>online</i>	0813 8080 413
2	Website	Sosial Media Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III	https://pkp.go.id/balai/p2p-sumatera-iii
3	Email		Bp3kp.sumatera3@pkp.go.id
4	Instagram		pkp_perumahan_sumatera3
5	Facebook		https://www.facebook.com/pkp.perumahan.sumatera3
6	Youtube		https://www.youtube.com/@bp3kp_sumatera3
7	Survei Kepuasan Masyarakat		Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III yang bertujuan untuk mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

1.5 Isu Strategis

ISU STRATEGIS TAHUN 2025

1. Tingginya backlog kepemilikan rumah serta masih banyaknya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), khususnya pada kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di wilayah perdesaan, pinggiran kota, dan pesisir
2. Basis data perumahan dan kawasan permukiman di tingkat kabupaten/kota belum sepenuhnya mutakhir.
3. Kondisi geografis ini berdampak pada tingginya biaya pembangunan, keterbatasan akses logistik, serta perlunya penerapan standar teknis bangunan yang adaptif terhadap risiko bencana.
4. Kawasan kumuh di wilayah perkotaan umumnya berada pada lokasi dengan kepadatan penduduk tinggi, keterbatasan lahan, serta permasalahan legalitas tanah.
5. Keterbatasan Kapasitas Perencanaan dan Kelembagaan Daerah
6. Proses serah terima aset hasil pembangunan perumahan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah masih memerlukan waktu yang relatif lama.
7. Variasi Kompetensi dan Kebutuhan Peningkatan Kapasitas SDM

1.6 Sistematika Laporan

BAB 1 Pendahuluan	Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, aspek strategis, dan isu/permasalahan utama (<i>strategic issues</i>) yang dihadapi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III.
BAB 2 Perencanaan Kinerja	Pada bab ini diuraikan mengenai visi, misi, arah kebijakan dan strategi, program dan kegiatan dalam rencana strategis dan ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III tahun 2025, metode pengukuran capaian kinerja dan target kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III menurut rencana strategis.
BAB 3 Akuntabilitas Kinerja	Pada bab ini diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja dan realisasi anggaran yang dicapai Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III pada tahun 2025 sesuai dengan kesepakatan Perjanjian Kinerja (PK).
BAB 4 Penutup	Pada bab ini diuraikan keberhasilan dan/atau kegagalan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan

LAMPIRAN

Kawasan Permukiman Sumatera III pada tahun 2025 serta rekomendasi dan langkah tindak lanjut untuk memperbaiki kondisi dan meningkatkan kinerja. Bagian ini berisi dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, bukti dukung capaian kinerja, penghargaan, berita acara kesepakatan capaian kinerja dan dokumentasi pelaksanaan pembangunan perumahan di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III.



Bab.

2

Perencanaan Kinerja

- ***Rencana Strategis***
- ***Perjanjian Kinerja dan Kronologi
Perubahan Perjanjian Kinerja***
- ***Metode Pengukuran Kinerja***
- ***DIPA***



Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan
Kawasan Permukiman Sumatera III

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

2.1.1 Visi dan Misi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan visi Presiden tahun 2025–2029 tersebut, maka Kementerian menyelaraskan visi kementerian dengan visi tersebut dan menjabarkannya ke dalam tujuan dan sasaran sesuai dengan peran, tugas, dan fungsinya. Hal tersebut juga mempertimbangkan potensi, permasalahan, dan tantangan utama pembangunan yang dihadapi lima tahun ke depan, serta sasaran utama dan arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2025–2029.

Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman diperlukan untuk mendukung visi Presiden periode 2025–2029 yang dapat diartikan bahwa pembangunan memerlukan kontribusi seluruh putra-putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Sebagai upaya perwujudan visi tersebut, Kementerian PKP menetapkan misi Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Pelaksanaan misi di atas ditujukan untuk memastikan tercapainya:

1. Peningkatan akses hunian layak, terjangkau, berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan; penanganan permukiman kumuh yang terpadu; serta tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas secara kolaboratif;
2. Peningkatan kualitas tata kelola dan pengawasan intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Tujuan pembangunan yang dilaksanakan Kementerian PUPR kemudian diuraikan dalam 2 (dua) Sasaran Strategis Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut:

Tabel 2. 1. Sasaran Strategis Kementerian PKP Tahun 2025-2029

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja
SS-1	Meningkatnya penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efisien, layak, terjangkau, dan berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> a. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Terjangkau yang difasilitasi ; b. Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu; c. Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan; d. Persentase Desa yang memiliki 100% rumah layak huni
SS-2	Meningkatnya kualitas tata kelola dan pengawasan intern Kementerian	<ol style="list-style-type: none"> a. Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

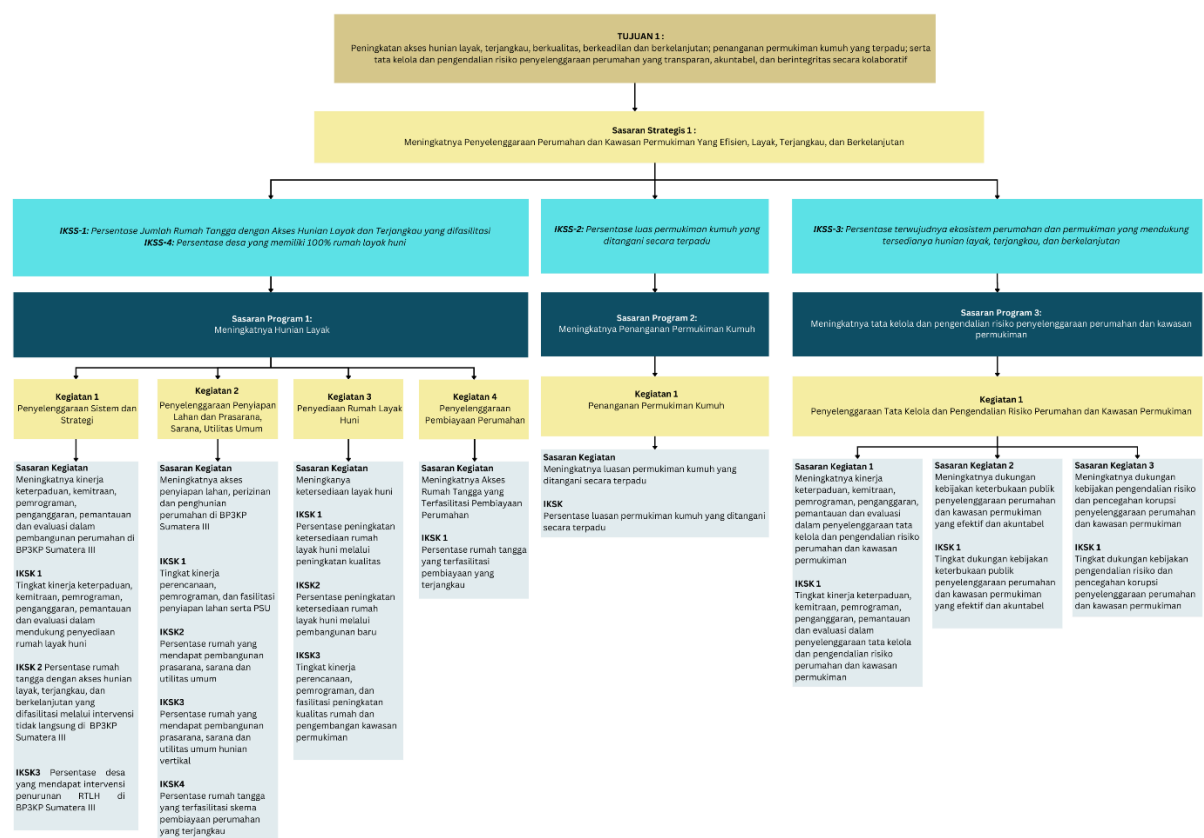
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
	b. Indeks Integritas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman c. Tingkat Kualitas Pengawasan Intern

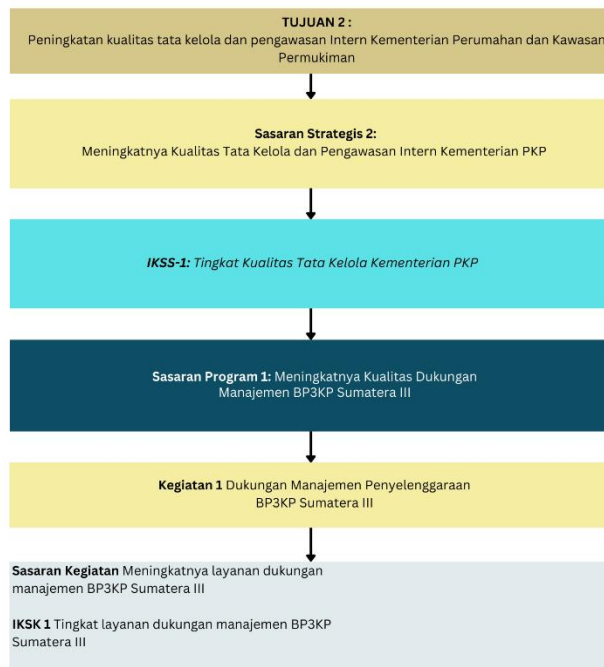
2.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, diperlukan arah kebijakan dan strategi yang terintegrasi pada seluruh entitas unit organisasi. Setiap unit organisasi memiliki peran, fungsi, dan mandat strategis yang saling melengkapi dalam mewujudkan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, terjangkau, berkelanjutan, serta dikelola secara efektif dan akuntabel.

Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui 2 (dua) strategi sebagai berikut:





Gambar 2. 1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kementerian PKP melalui lima unit organisasi, yaitu Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Sekretariat Jenderal, serta Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, menjalankan peran strategis sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Arah kebijakan dan strategi pada masing-masing unit organisasi selanjutnya dijabarkan untuk memberikan fokus, prioritas, serta pendekatan pelaksanaan yang selaras dengan sasaran strategis kementerian.

Distribusi Unit Organisasi Koordinator-Pengampu-Kontributor				
Indikator Kinerja Program	Ditjen KP	Ditjen Desa	Ditjen Kota	DJTKPR
1 KP 06.06.01 -Jumlah unit rumah baru yang terbangun	Kontributor	PIC & Pelaksana	Pelaksana	
2 KP 06.06.01 - Jumlah unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya	Kontributor	PIC & Pelaksana	Pelaksana	
3 KP 06.06.01 - Jumlah unit rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas	PIC & Pelaksana	Pelaksana	Pelaksana	
4 KP 06.06.02 -Jumlah penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu (milik dan sewa)	Kontributor	Pelaksana	PIC & Pelaksana	
5 KP 06.06.02 -Jumlah unit rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas hunian vertikal	PIC & Pelaksana	Pelaksana	Pelaksana	
6 KP 06.06.03 -Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan atau bantuan subsidi/kemudahan perumahan	Pelaksana	Pelaksana	Pelaksana	PIC
7 KP 06.06.04 -Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen	Pelaksana	Pelaksana	Pelaksana	PIC & Pelaksana
8 KP 06.06.05 -Luasan hektar permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	PIC & Pelaksana	Kontributor	Kontributor	
9 KP 06.07.01 -Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni	Pelaksana	PIC & Pelaksana	Pelaksana	

a. UnorPIC : Unit organisasi yang mengkoordinasikan pelaksanaan indikator
 b. UnorPelaksana : Unit organisasi yang melaksanakan indikator
 c. UnorKontributor : Unit organisasi yang mendapatkan penugasan sesuai dengan inmen

Gambar 2. 2. Distribusi Unit Organisasi Koordinator-Pengampu-Kontributor

Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

Untuk mendukung pencapaian sasaran Renstra Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman (DJKP) tahun 2025–2029, telah dirumuskan arah kebijakan yang berfokus pada empat pilar utama. Setiap pilar kebijakan dijabarkan melalui strategi pembangunan kawasan permukiman untuk melaksanakan arah kebijakan yang telah dirumuskan serta mendukung ketercapaian sasaran Renstra.

Tabel 2. 2. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

No	Arah Kebijakan	Strategi
1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak melalui penyediaan serta peningkatan kualitas perumahan	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan pembangunan baru rumah susun, rumah khusus dan rumah swadaya • Percepatan peningkatan kualitas rumah swadaya dan penyediaan sanitasi • Fasilitasi penyediaan lahan untuk perumahan yang aman dan terjangkau • Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum pada hunian tapak & vertikal
2	Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan optimalisasi pemanfaatan skema pembiayaan alternatif seperti kredit mikro perumahan dan skema lainnya • Pengembangan klinik perumahan untuk mendukung kapasitas stakeholder perumahan dan masyarakat • Dukungan pengembangan perumahan melalui pendekatan hunian berimbang
3	Meningkatkan kualitas perumahan secara terpadu	<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan dan penguatan Pemda dalam menyusun kelengkapan instrumen perencanaan penyelenggaraan kawasan permukiman terpadu • Penataan kawasan kumuh melalui pembangunan infrastruktur kawasan permukiman (rumah, jalan, drainase, sanitasi, air minum, persampahan, dan proteksi Kebakaran)
4	Menguatkan ekosistem perumahan dan kawasan permukiman dalam mendukung hunian layak	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan dan kawasan permukiman • Peningkatan kolaborasi antar stakeholder dan penguatan kelembagaan dalam penyelenggaraan perumahan • Peningkatan pendataan dan monitoring evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman

No	Arah Kebijakan	Strategi
		<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pembinaan pada pelaku usaha dan fasilitasi perlindungan konsumen perumahan • Pembinaan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman kepada pemangku kepentingan • Pemanfaatan inovasi teknologi konstruksi dan material untuk mendukung percepatan penyediaan perumahan bagi MBR

Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Arah kebijakan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan difokuskan pada peningkatan akses masyarakat perdesaan terhadap hunian layak dan terjangkau melalui implementasi skema penyelenggaraan perumahan yang inovatif secara kolaboratif. Strategi pelaksanaan kebijakan diarahkan melalui:

1. Mempercepat penyediaan rumah layak huni di wilayah perdesaan
2. Mendorong penyediaan rumah layak melalui skema pembiayaan perumahan inovatif
3. Menyediakan sistem regulasi, pemanfaatan teknologi serta mengembangkan pola koordinasi
4. Meningkatkan kolaborasi antar stakeholder dalam rangka mengembangkan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah perdesaan

Tabel 2. 3 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

No	Arah Kebijakan	Strategi
1	Mempercepat penyediaan rumah layak huni di wilayah perdesaan	<ol style="list-style-type: none"> a. Percepatan pembangunan baru rumah di wilayah perdesaan; b. Perluasan cakupan peningkatan kualitas rumah di wilayah perdesaan; c. Penyediaan PSU perumahan di wilayah perdesaan; d. Pengembangan model perumahan perdesaan yang terintegrasi dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan e. Fasilitasi penyediaan lahan untuk perumahan yang layak dan terjangkau tanpa mengurangi lahan produktif di wilayah perdesaan atau menimbulkan konflik agraria.
2	Mendorong penyediaan rumah layak melalui skema pembiayaan perumahan inovatif	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan kerja sama dengan lembaga keuangan mikro di wilayah perdesaan; b. Pengembangan skema tabungan berencana; c. Pengembangan bantuan <i>tunai/in-kind</i> yang terintegrasi dengan program pembangunan desa; d. Pengembangan skema kredit renovasi rumah

No	Arah Kebijakan	Strategi
		(KRR) dan Kredit bangun rumah (KBR); e. Pengembangan kerja sama dengan koperasi sebagai wadah untuk masyarakat perdesaan dalam mengakses pembiayaan perumahan; dan f. Peningkatan subsidi pembiayaan perumahan melalui KPR FLPP, SSB, dan SBUM untuk MBR di wilayah perdesaan.
3	Menyediakan sistem regulasi, pemanfaatan teknologi serta mengembangkan pola koordinasi	a. Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan dan kawasan permukiman perdesaan serta perumusan kebijakan dan strategi jangka panjang perumahan di wilayah perdesaan; b. Penyusunan NSPK di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, penyiapan penghunian perumahan perdesaan; c. Penyusunan NSPK di bidang penyusunan skema pembiayaan perumahan perdesaan; d. Penyusunan NSPK di bidang pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perdesaan; e. Penyusunan panduan pembinaan teknis dan supervise penyelenggaraan perumahan perdesaan; f. Penyusunan panduan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan; dan g. Pengembangan diversifikasi model perumahan perdesaan yang sesuai dengan konteks lokal.
4	Meningkatkan kolaborasi antarpemangku dalam rangka mengembangkan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah perdesaan	a. Peningkatan kolaborasi pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan; b. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman perdesaan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, penyiapan penghunian dan penyusunan skema pembiayaan, Pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perdesaan; c. Pelaksanaan harmonisasi perencanaan kawasan perdesaan antara pemerintah pusat dan daerah; d. Pelaksanaan koordinasi antarpemangku kepentingan terkait penyelenggaraan perumahan perdesaan; dan e. Penguatan kelembagaan.

Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Arah kebijakan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan difokuskan pada Peningkatan akses hunian layak, terjangkau, berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan; penanganan

permukiman kumuh yang terpadu; serta tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas secara kolaboratif sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak dasar warga negara di kawasan perkotaan.

Kebijakan ini diarahkan untuk mengatasi backlog perumahan dan keterbatasan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah akibat urbanisasi, Arah kebijakan tersebut kemudian dijabarkan melalui strategi:

1. Mempercepat pembangunan rumah layak huni bagi MBR di wilayah perkotaan
2. Optimalisasi pemanfaatan lahan milik negara, pemerintah daerah, dan BUMN
3. Meningkatkan kolaborasi antar stakeholder
4. Percepatan penghunian
5. Pengembangan skema pembiayaan perumahan berbasis kebutuhan MBR
6. Penerapan teknologi konstruksi murah dan cepat
7. Penguatan perencanaan, koordinasi, dan integrasi program antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota

Tabel 2. 4 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

No	Arah Kebijakan	Strategi
1	Mempercepat penyediaan rumah layak huni di wilayah perkotaan	<ol style="list-style-type: none"> a. Percepatan pembangunan baru rumah di wilayah perkotaan; b. Perluasan cakupan peningkatan kualitas rumah di wilayah perkotaan; c. Penyediaan PSU perumahan di wilayah perkotaan; dan d. Pengembangan model perumahan perkotaan yang terintegrasi dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum.
2	Optimalisasi pemanfaatan lahan milik negara/daerah/BUMN serta mendorong pengembangan perumahan vertikal,	Mendorong intensifikasi pemanfaatan lahan melalui skema KPBU dan pendekatan kawasan terpadu, seperti kawasan campuran dan Kawasan TOD.
3	Mendorong pembangunan perumahan terintegrasi dengan Kawasan strategis dan transportasi publik (TOD)	Mengembangkan kawasan perumahan berbasis transit (TOD) dan kawasan perkotaan baru.
4	Meningkatkan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam rangka mengembangkan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah perkotaan	<ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kolaborasi pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan; b. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman perkotaan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, penyiapan penghunian dan penyusunan skema

No	Arah Kebijakan	Strategi
		pembiayaan, Pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perkotaan; c. Pelaksanaan harmonisasi perencanaan kawasan perkotaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; d. Pelaksanaan koordinasi antarpemangku kepentingan terkait penyelenggaraan perumahan perkotaan; dan e. Penguatan kelembagaan.
5	Penguatan perencanaan, koordinasi, dan integrasi program antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota	Pengembangan sistem informasi perumahan terintegrasi dan penyesuaian program perumahan antarlevel pemerintahan.
6	Pengembangan skema pembiayaan perumahan berbasis kebutuhan MBR	a. Inovasi pembiayaan mikro perumahan; b. Kredit konstruksi swadaya; dan c. Kolaborasi dengan lembaga keuangan nonbank.
7	Penerapan teknologi konstruksi murah dan cepat serta penguatan sistem informasi perumahan dan permukiman berbasis digital	a. Penggunaan teknologi rancang bangun rumah terkini; b. Digitalisasi sistem monitoring; dan c. pemutakhiran basis data rumah.
8	Percepatan penghunian	a. revitalisasi rusun; b. pelatihan pengelolaan rusun oleh penghuni; c. integrasi rusun dengan fasilitas sosial dan ekonomi.

Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal

Sebagai salah satu unit organisasi di Kementerian PKP, Sekretariat Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, berperan menjalankan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian PKP. Sekretariat Jenderal berkomitmen untuk menjalankan program dukungan manajemen yang memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-Bound).

Arah kebijakan Sekretariat Jenderal dalam rencana strategis diarahkan untuk menjamin tata kelola yang responsif dan akuntabel guna mendukung pencapaian strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Strategi pelaksanaan kebijakan difokuskan pada:

1. Optimalisasi peran stakeholder dalam mendukung pencapaian target kinerja
2. Penguatan pengelolaan data
3. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian
4. Penyusunan dan harmonisasi regulasi
5. Penguatan kelembagaan dan tata kelola pengadaan barang dan jasa

6. Pengelolaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM)

7. Transformasi digital dan penguatan komunikasi publik

Tabel 2. 5 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

No	Arah Kebijakan	Strategi
1	Penguatan Perencanaan dan Penganggaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan kebutuhan anggaran tahunan yang lebih rinci, berbasis data, dan mempertimbangkan pelaksanaan anggaran sebelumnya; dan b. Integrasi antara perencanaan dan penganggaran serta peningkatan kualitas pemantauan dan evaluasi kegiatan.
2	Transformasi Digital dan Tata Kelola	<ul style="list-style-type: none"> a. Transformasi digital dalam layanan administrasi, kepegawaian, pelayanan publik, pengelolaan data dan informasi, serta system pengadaan barang dan jasa; dan b. Penyederhanaan proses birokrasi dan peningkatan efisiensi melalui sistem informasi terintegrasi.
3	Penguatan Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemetaan dan pemenuhan kebutuhan SDM berbasis analisis bebank (ABK) dan kompetensi; b. Pengembangan manajemen talenta ASN melalui pelatihan, promosi berbasis merit, pemetaan karier, serta pembentukan balai kompetensi; dan c. Peningkatan kapasitas SDM di seluruh bidang fungsional, termasuk keuangan, pengadaan, hukum, komunikasi, dan data.
4	Penguatan Sistem Informasi dan Data	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan sistem informasi sektoral terintegrasi berbasis satu data Indonesia; dan b. Optimalisasi pemanfaatan data sebagai dasar kebijakan, perencanaan, dan evaluasi program secara berbasis bukti (<i>evidence-based policy</i>).
5	Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> a. Perbaikan kualitas layanan tata usaha pimpinan, pengelolaan kearsipan, protokoler, serta penyediaan sarana dan prasarana kantor; dan b. Penguatan layanan keamanan, ketertiban, dan kehumasan secara profesional dan responsif.
6	Percepatan Regulasi dan Advokasi Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kualitas pembentukan produk hukum, pembinaan SDM hukum, dan advokasi hukum yang responsif dan solutif; dan b. Digitalisasi dan penguatan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH).

No	Arah Kebijakan	Strategi
7	Modernisasi dan Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan BMN	a. Pembinaan dan pendampingan intensif terhadap pengelolaan keuangan dan BMN; dan b. Peningkatan akuntabilitas, pengamanan, dan optimalisasi pemanfaatan aset negara.
8	Penguatan Sistem dan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	a. Penguatan kelembagaan UKPBJ dan SDM pengadaan; dan b. Integrasi perencanaan pengadaan dengan penganggaran serta pemanfaatan sistem <i>e-Procurement</i> untuk efisiensi dan transparansi.
9	Penguatan Komunikasi Publik dan Pelayanan Publik	a. Penyusunan NSPK komunikasi publik, penguatan pelayanan berbasis teknologi dan informasi, dan pengelolaan media digital secara terintegrasi; dan b. Kolaborasi lintas kementerian/lembaga dan media untuk memperluas jangkauan informasi dan mitigasi disinformasi.
10	Kolaborasi dan Pendanaan Alternatif	a. Peningkatan sinergi dengan mitra dan pemangku kepentingan termasuk CSR dan sumber pendanaan Non APBN; dan b. Perencanaan dan pengelolaan dana pinjaman serta program pembiayaan seperti KUR secara terarah dan akuntabel.

Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Arah kebijakan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko diselaraskan dengan arah kebijakan nasional RPJMN Tahun 2025–2029 serta arah kebijakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, khususnya dalam penguatan layanan tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjamin penanganan dan pengawasan atas pelaksanaan bantuan perumahan, meningkatkan kualitas tata kelola hunian publik dan privat, memperluas dan memperkuat sistem pembiayaan perumahan yang inklusif, serta memperkuat mekanisme kemitraan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Tabel 2. 6 Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal

No	Arah Kebijakan	Strategi
1	Menjamin penanganan dan pengawasan atas pelaksanaan bantuan perumahan bagi MBR serta menjamin ketepatan sasaran penerima manfaat	Penguatan tata kelola dan regulasi atas pelaksanaan bantuan pembangunan maupun peningkatan kualitas rumah baik dalam bentuk intervensi langsung maupun dalam bentuk subsidi serta menjamin ketepatan sasaran penerima manfaat bantuan perumahan melalui pemanfaatan data yang terintegrasi secara nasional.
2	Peningkatan kualitas tata kelola	Penguatan tata kelola yang berorientasi pada

No	Arah Kebijakan	Strategi
	hunian publik dan hunian privat vertikal melalui penyusunan NSPK yang digunakan untuk mengelola dan mengawasi penyediaan serta pengelolaan perumahan publik	ketersediaan hunian yang terjangkau, layak huni, dan berkelanjutan bagi masyarakat, dengan penekanan pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.
3	Mendorong diversifikasi sumber pembiayaan perumahan, mengembangkan dan memperluas skema pembiayaan diluar FLPP 100% KPR, meningkatkan akurasi ketepatan sasaran melalui integrasi data nasional, dan penguatan regulasi dan tata Kelola pembiayaan perumahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Diversifikasi pendanaan melalui implementasi skema Tapera sebagai tambahan pembiayaan, penggunaan skema pinjaman/hibah multilateral, dan program perumahan hijau dan terjangkau di Indonesia (<i>Indonesia Green Affordable Housing Program</i> atau IGHP). b. Melakukan koordinasi secara intensi dengan Bank Indonesia dan pemangku kepentingan lain. c. Optimalisasi pemanfaatan DTSEN dan sistem antrean perumahan. d. Regulasi dan tata kelola penyusunan petunjuk teknis, peraturan menteri, dan keputusan menteri untuk mendukung efektivitas kebijakan.
4	Penguatan regulasi mekanisme kemitraan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	Penyusunan Surat Edaran Menteri tentang Mekanisme Kemitraan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
5	Meningkatkan kemitraan dengan pemangku kepentingan lain dengan penguatan regulasi mekanisme kemitraan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	Memperluas kemitraan dengan pemangku kepentingan lain dan pengaturan mekanisme kemitraan penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman.
6	Menciptakan sektor perumahan yang inklusif dan berkelanjutan diperlukan penguatan terhadap seluruh ekosistem perumahan serta perbaikan tata kelolanya	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Governance</i>, penyusunan NSPK dan bimbingan teknis tata kelola dan pengendalian risiko; b. <i>Risk</i>, penguatan SPIP dan e-Manajemen Risiko; c. <i>Compliance</i>, pencaanangan dan pembangunan zona integritas, sistem informasi pemantauan TKPR (e-Pantau), sistem manajemen anti penyuapan (SMAP), dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; d. <i>Financing</i>, kerjasama investasi asing, antrean perumahan, FLPP, IGHP, skema jaminan penyerapan (<i>off-take guarantee</i>); dan e. Pembangunan baru atau renovasi melalui CSR dan penyiapan lahan.

Arah Kebijakan dan Strategi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, BP3KP Sumatera III menetapkan arah kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau, yaitu **Menjamin peningkatan akses perumahan yang layak dan terjangkau melalui pembangunan baru, peningkatan kualitas dan fasilitasi pembiayaan perumahan.**

Arah kebijakan tersebut merupakan respons atas hasil analisis SWOT yang menunjukkan masih tingginya backlog perumahan dan RTLH, sebaran kawasan kumuh, keterbatasan kapasitas daerah, serta tantangan pengelolaan aset perumahan dan kawasan permukiman di wilayah kerja BP3KP Sumatera III. Untuk mendukung pencapaian arah kebijakan tersebut, BP3KP Sumatera III menetapkan 4 (empat) strategi utama sebagai berikut:

1. Penguatan layanan peningkatan akses perumahan yang layak dan terjangkau dengan fokus implementasi pada fasilitasi dan pendampingan teknis pelaksanaan program rumah swadaya (BSPS) melalui peningkatan kualitas dan/atau pembangunan baru, dukungan penyediaan rumah susun dan rumah khusus, termasuk rumah khusus pascabencana di wilayah rawan bencana seperti Sumatera Barat, penguatan sinergi pusat–daerah dalam penajaman lokasi dan sasaran penerima manfaat berbasis data perumahan dan kawasan permukiman.
2. Penguatan layanan penanganan permukiman kumuh yang terpadu secara kolaboratif dengan fokus implementasi pada fasilitasi penanganan kawasan kumuh secara terpadu melalui integrasi peningkatan kualitas hunian, penyediaan PSU, dan peningkatan akses sanitasi, penguatan kolaborasi lintas sektor dan lintas kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya, pendampingan teknis perencanaan kawasan yang adaptif terhadap keterbatasan lahan dan kondisi geografis wilayah.
3. Penguatan layanan tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel dan berintegritas dengan fokus implementasi pada penguatan sistem perencanaan dan pengendalian berbasis data perumahan, RTLH, kawasan kumuh, sanitasi, dan PSU, fasilitasi proses serah terima aset rumah susun, PSU, dan rumah khusus kepada pemerintah daerah secara tertib dan sesuai ketentuan, pendampingan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan aset perumahan dan kawasan permukiman secara berkelanjutan.
4. Penguatan kualitas tata kelola dan pengawasan intern BP3KP Sumatera III dengan fokus implementasi pada peningkatan kualitas perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program perumahan dan kawasan permukiman, penguatan sistem pengawasan intern dalam rangka mitigasi risiko pelaksanaan kegiatan, penguatan fungsi kehumasan dan pelaporan kinerja untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas publik.

2.2 Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III melaksanakan kegiatan berdasarkan penetapan target yang telah disepakati antara Kepala Balai dengan Direktur Jenderal dan Sekretaris Jenderal dalam Perjanjian Kinerja (PK). Perjanjian Kinerja ini berisi komitmen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III terkait pencapaian kinerja dengan fokus pada *output* bidang perumahan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan dalam satu tahun anggaran. Perjanjian Kinerja menjadi alat untuk mewujudkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III serta menjadi bahan evaluasi dalam proses peningkatan kinerja di masa mendatang.

2.2.1 Perjanjian Kinerja (PK) Awal

Berikut ini merupakan target kinerja awal yang telah disepakati oleh Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III dengan Direktur Jenderal dan Sekretaris Jenderal mengacu pada DIPA petikan bulan Agustus 2025.

Tabel 2. 7 Tabel Target Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025

Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target PK Awal 2025					
		Total	Balai	Sumatera Barat	Riau	Kep. Riau	
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan							
1	Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	-	-	-
2	Jumlah dokumen Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	-	-	-
3	Jumlah dokumen Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	Laporan	1	1	-	-	-
4	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	2	2	-	-	-
5	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Kegiatan	1	1	-	-	-
6	Jumlah laporan kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	Laporan	1	1	-	-	-

No	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target PK Awal 2025				
			Total	Balai	Sumatera Barat	Riau	Kep. Riau
7	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	Laporan	4	1	1	1	1
8	Jumlah laporan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Laporan	4	1	1	1	1
9	Jumlah laporan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Laporan	3	-	1	1	1
10	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	Laporan	-	-	-	-	-
11	Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas di Kawasan Permukiman	Unit	-	-	-	-	-
12	Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas di Perumahan Perkotaan	Unit	323	-	270	53	-
13	Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas di Perumahan Perdesaan	Unit	788	-	405	383	-
14	Jumlah rumah khusus yang terbangun di Perumahan Perdesaan	Unit	140	-	140	-	-
15	Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	Unit	102	-	-	44	58
16	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu di Kawasan Permukiman	Hektar	79,21	-	43,63	33,58	-
17	Jumlah dokumen Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	Rekomendasi Kebijakan	1	1	-	-	-
18	Jumlah dokumen Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	Rekomendasi Kebijakan	1	1	-	-	-
19	Jumlah Komponen Rumah Untuk Mitigasi Bencana Perumahan Perdesaan	Unit	1	-	1	-	-
Kegiatan: Penyediaan akses perumahan yang layak dan aman			Anggaran: Rp 175.145.687.000				
SK. Program Dukungan Manajemen							
1	Jumlah layanan perkantoran	layanan	4	1	1	1	1
Kegiatan: Dukungan manajemen penyelenggaraan perumahan			Anggaran: Rp 2.950.675.000				

Pada PK Awal, pelaksanaan kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III didukung dengan pagu anggaran sebesar **Rp 178.096.362.000,00** dengan rincian target disesuaikan dengan penetapan target kinerja yang

tercantum dalam DIPA petikan awal masing-masing Satuan Kerja di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III mengacu pada DIPA petikan awal Sekretaris Jenderal dan Direktorat Jenderal berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk TA 2025 Bulan Agustus 2025.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III telah melakukan 2 (dua) kali perubahan pada dokumen Perjanjian Kinerja. Revisi PK dilakukan untuk menanggapi adanya penetapan target nilai indikator kinerja yang baru pada pekerjaan pembangunan perumahan di Satuan Kerja di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III.

Tabel 2. 8 Target Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Tahun 2025

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Satuan	Target PK 2025		
		Awal	Revisi Akhir	
SK. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni				
1	Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1
2	Jumlah dokumen Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	1
3	Jumlah dokumen Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	Laporan	1	1
4	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	2	2
5	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Kegiatan	1	1
6	Jumlah laporan kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	Laporan	1	1
7	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	Laporan	4	4
8	Jumlah laporan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Laporan	4	4
9	Jumlah laporan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Laporan	3	3
10	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	Laporan	-	3
11	Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas di Kawasan Permukiman	Unit	-	10
12	Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas di Perumahan Perkotaan	Unit	323	248
13	Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas di Perumahan Perdesaan	Unit	788	897

	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Satuan	Target PK 2025	
			Awal	Revisi Akhir
14	Jumlah rumah khusus yang terbangun di Perumahan Perdesaan	Unit	140	140
15	Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	Unit	102	102
16	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu di Kawasan Permukiman	Hektar	79,21	103,72
17	Jumlah dokumen Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	Rekomendasi Kebijakan	1	1
18	Jumlah dokumen Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	Rekomendasi Kebijakan	1	1
19	Jumlah Komponen Rumah Untuk Mitigasi Bencana Perumahan Perdesaan	Unit	1	1
SK. Program Dukungan Manajemen				
1	Jumlah layanan perkantoran	layanan	4	4
Anggaran (Rp Ribu)			178.096.362	182.839.655

Perubahan pertama dilakukan karena adanya penyesuaian penetapan pagu dan penetapan target nilai indikator kinerja di Satuan Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau. Akibat perubahan target tersebut, alokasi anggaran PK Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III menjadi **Rp 182.839.655.000,00**.

2.2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Akhir

Perjanjian Kinerja kembali direvisi akibat adanya perubahan pagu anggaran dan penetapan target nilai indikator kinerja di Satuan Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau. Pada perubahan terakhir ini, alokasi pagu anggaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III berubah menjadi Rp **182.839.655.000,00**.

Tabel 2. 9 Target Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Revisi I (Akhir) Tahun 2025

	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target PK Revisi I (Akhir) 2025				
			Total	Balai	Sumatera Barat	Riau	Kep. Riau
SK. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni							
1	Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik	Rekomendasi Kebijakan	1	1	-	-	-

Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja	Satuan	Target PK Revisi I (Akhir) 2025				
		Total	Balai	Sumatera Barat	Riau	Kep. Riau
Perumahan dan Kawasan Permukiman						
2 Jumlah dokumen Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	-	-	-
3 Jumlah dokumen Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	Laporan	1	1	-	-	-
4 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	2	2	-	-	-
5 Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Kegiatan	1	1	-	-	-
6 Jumlah laporan kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	Laporan	1	1	-	-	-
7 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	Laporan	4	1	1	1	1
8 Jumlah laporan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Laporan	4	1	1	1	1
9 Jumlah laporan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Laporan	3	-	1	1	1
10 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	Laporan	3	-	1	1	1
11 Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas di Kawasan Permukiman	Unit	10	-	10	-	-
12 Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas di Perumahan Perkotaan	Unit	248	-	191	57	-
13 Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas di Perumahan Perdesaan	Unit	897	-	521	376	-
14 Jumlah rumah khusus yang terbangun di Perumahan Perdesaan	Unit	140	-	140	-	-
15 Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	Unit	102	-	-	44	58

Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja		Satuan	Target PK Revisi I (Akhir) 2025				
			Total	Balai	Sumatera Barat	Riau	Kep. Riau
16	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu di Kawasan Permukiman	Hektar	103,72	-	68,04	35,58	0,1
17	Jumlah dokumen Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	Rekomendasi Kebijakan	1	1	-	-	-
18	Jumlah dokumen Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	Rekomendasi Kebijakan	1	1	-	-	-
19	Jumlah Komponen Rumah Untuk Mitigasi Bencana Perumahan Perdesaan	Unit	1	-	1	-	-
Kegiatan: Penyediaan akses perumahan yang layak dan aman			Anggaran: Rp 175.145.687.000				
SK. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan							
1	Jumlah layanan perkantoran	layanan	4	1	1	1	1
Kegiatan: Dukungan manajemen penyelenggaraan perumahan			Anggaran: Rp 3.452.195.000				

2.2.3 Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja (PK)

Terdapat perubahan target nilai indikator kinerja yang dialami dalam proses pelaksanaan kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III pada tahun 2025 yang disusun sejalan dengan perubahan pagu anggaran Direktorat Jenderal dan Sekretaris Jenderal. Kronologi penyusunan Perjanjian Kinerja di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 10 Kronologi perubahan target PK Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III TA 2025

PK / Tanggal Pengesahan	Dasar Penyusunan Target PK	Uraian / Pembahasan
PK Awal Sekjen : 30 Agustus 2025 Dirjen KP : 22 Agustus 2025 Dirjen Desa : 27 Agustus 2025 Dirjen Kota : 26 Agustus 2025	DIPA petikan awal Direktorat Jenderal dan Sekretaris Jenderal berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk TA 2025 Nomor: Sekjen : SP DIPA-146.01.1.691383/2025 Dirjen KP : SP DIPA-146.03.1.691437/2025 Dirjen Desa : SP DIPA-146.04.1. 691491/2025 Dirjen Kota : SP DIPA-146.05.1. 691545/2025	Menindaklanjuti arahan untuk melakukan penyusunan PK awal berdasarkan surat UM0102-Pp/281 tentang Pembinaan Teknis Akuntabilitas Kinerja Instansi (AKIP) Tahun 2025 Wilayah Barat. Dalam bimtek ini Balai dan Satker untuk membuat PK awal masing-masing DIPA yang ditetapkan pada bulan Agustus 2025 memakai DIPA yang keluar di bulan Agustus atau sebelum bulan Agustus 2025 dan disamakan tanggal untuk balai dan satker yang ada pada satu wilayah satuan kerja.

PK / Tanggal Pengesahan	Dasar Penyusunan Target PK	Uraian / Pembahasan
<p>Dirjen TKPR : 1 Agustus 2025</p> <p>PK Revisi / Akhir Sekjen : 14 November 2025</p> <p>Dirjen KP : 03 Oktober 2025</p> <p>Dirjen Desa : 27 Oktober 2025</p> <p>Dirjen Kota : 18 Oktober 2025</p> <p>Dirjen TKPR : 01 Agustus 2025</p>	<p>Dirjen TKPR : SP DIPA-146.06.1. 691597/2025</p> <p>DIPA petikan revisi Direktorat Jenderal dan Sekretaris Jenderal berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk TA 2025 Nomor: Sekjen : SP DIPA-146.01.1.691383/2025 Dirjen KP : SP DIPA-146.03.1.691437/2025 Dirjen Desa : SP DIPA-146.04.1. 691491/2025 Dirjen Kota : SP DIPA-146.05.1. 691545/2025 Dirjen TKPR : SP DIPA-146.06.1. 691597/2025</p>	<p>Menindaklanjuti arahan untuk melakukan penyusunan PK Revisi</p> <p>Perubahan target <i>output</i> kinerja di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III pada revisi ini yaitu:</p> <p>1. Sekjen : Balai : perubahan pada total pagu dari Rp 1.251.514.000.- menjadi Rp 1.353.194.000.- Satker Riau : perubahan pada total pagu dari Rp 567.434.000.- menjadi Rp 703.514.000.- Satker Sumbar : perubahan pada total pagu dari Rp 575.135.000.- menjadi Rp 741.375.000.- Satker Kepri : perubahan pada total pagu dari Rp 556.592.000.- menjadi Rp 654.112.000.-</p> <p>2. Dirjen KP : Balai : tidak mengalami perubahan <i>output</i> dan pagu anggaran Satker Riau : mengalami perubahan pada total pagu dari Rp 11.246.766.000,- menjadi Rp 8.899.434.000,- Satker Sumbar : mengalami perubahan <i>output</i> pada Luasan Penanganan Permukiman Kumuh 43,63 Hektar menjadi 68,04 Hektar dan perubahan pagu anggaran dari Rp. 19.935.723.000,- menjadi 19.675.454.000,- Satker Kepri : mengalami perubahan <i>output</i> jumlah luasan penanganan permukiman kumuh sebesar 0,1 Hektar dan perubahan pada pagu anggaran Rp. 86.334.000,- menjadi Rp. 713.986.000,-</p> <p>3. Dirjen Desa : Balai : perubahan pada penambahan KRO Pemantauan dan Evaluasi serta pelaporan dengan <i>output</i> Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan dan pagu anggaran Rp. 252.620.000,- mejadi Rp. 546.356.000,- Satker Riau : perubahan output Jumlah BSPS 383 unit menjadi 376 unit dan perubahan pagu anggaran Rp. 8.574.046.000,- menjadi Rp 8.535.521.000,- Satker Sumbar : perubahan pada <i>output</i> rumah BSPS 405 unit menjadi 521 unit dan perubahan pada <i>output</i> jumlah komponen rumah untuk mitigasi bencana perumahan perdesaan sebanyak 1 unit dan mengalami perubahan pada pagu anggaran 77.872.504.000,- menjadi Rp.85.492.615.000,- Satker Kepri : perubahan pada pagu anggaran dari Rp 112.299.000,- menjadi Rp 66.198.000,-</p> <p>4. Dirjen Kota : Balai : tidak mengalami perubahan output dan pagu anggaran Satker Riau : mengalami perubahan pada output rumah BSPS 53 unit menjadi 57 unit dan perubahan pada pagu anggaran Rp. 21.285.044.000,- menjadi Rp. 21.365.864.000,-</p>

PK / Tanggal Pengesahan	Dasar Penyusunan Target PK	Uraian / Pembahasan
		<p>Satker Sumbar : mengalami perubahan output rumah BPS 270 unit menjadi 191 unit dan pagu anggaran Rp. 6.391.670.000,- menjadi Rp. 4.724.051.000,-</p> <p>Satker Kepri : tidak mengalami perubahan output dan pagu anggaran</p> <p>5. Dirjen TKPR :</p> <p>Balai : tidak mengalami perubahan output dan pagu anggaran</p>

2.3 Metode Pengukuran

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III. Acuan pengukuran kinerja yang digunakan di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III disusun dalam bentuk Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 11 IKU Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III tahun 2025-2029

Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan
1 Meningkatkan Ketersediaan Rumah Layak Huni	Persentase jumlah rumah MBR yang mendapat bantuan PSU	$\frac{\text{Jumlah unit rumah mendapat bantuan PSU}}{\text{Jumlah unit usulan rumah untuk bantuan PSU}} \times 100$
	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni melalui fasilitasi rumah swadaya bagi MBR	$\frac{\text{Jumlah unit rumah swadaya yang dibangun}}{\text{Jumlah unit usulan rumah swadaya}} \times 100$
	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni melalui pembangunan rumah khusus	$\frac{\text{Jumlah unit rumah khusus yang dibangun}}{\text{Jumlah unit usulan rumah khusus}} \times 100$
	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni melalui pembangunan rumah susun	$\frac{\text{Jumlah unit rumah susun yang dibangun}}{\text{Jumlah unit usulan rumah susun}} \times 100$
	Persentase jumlah pembinaan dan pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan	$\frac{\text{Jumlah Kab/Kota yang mendapat pembinaan}}{\text{Jumlah Kab/Kota 3 Provinsi}} \times 100$
	Persentase jumlah sanitasi	$\frac{\text{Luasan Penanganan Permukiman kumuh}}{\text{Jumlah Luas Usulan Penanganan Permukiman kumuh}} \times 100$
2 Meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Kementerian Perumahan dan	Tingkat efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan perumahan	Melakukan analisa deskriptif guna melihat sejauh mana tingkat efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan perumahan pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III. Tingkat efektivitas diukur dengan cara

Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan
Kawasan Permukiman		membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja. Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan total realisasi anggaran belanja

Metode pengukuran capaian kinerja yang digunakan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III yaitu membandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja maupun dokumen perencanaan lainnya. Secara umum pengukuran terhadap persentase capaian kinerja di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III dirumuskan sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100$$

2.4.1 Target Kinerja Tahun Ini Berdasarkan Rencana Strategis

Target kinerja kegiatan tahun 2025 menurut Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 12 Target sasaran kegiatan tahun 2025 menurut Renstra

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Satuan	Target Strategis 2025	Target PK 2025	
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan				
KEGIATAN: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi				
1	Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1
2	Jumlah dokumen Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	1
3	Jumlah dokumen Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	Laporan	1	1
4	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	2	2
5	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Kegiatan	1	1
6	Jumlah laporan kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	Laporan	1	1
7	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	Laporan	4	4

	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Satuan	Target Strategis 2025	Target PK 2025
8	Jumlah laporan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Laporan	4	4
9	Jumlah laporan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Laporan	3	3
10	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	Laporan	3	3
11	Jumlah dokumen Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	Rekomendasi Kebijakan	1	1
12	Jumlah dokumen Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	Rekomendasi Kebijakan	1	1
13	Jumlah Komponen Rumah Untuk Mitigasi Bencana Perumahan Perdesaan	Unit	1	1
14	Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1
KEGIATAN: Penyediaan Rumah Layak Huni				
1	Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas di Kawasan Permukiman	Unit	10	10
2	Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas di Perumahan Perkotaan	Unit	248	248
3	Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas di Perumahan Perdesaan	Unit	897	897
4	Jumlah rumah khusus yang terbangun di Perumahan Perdesaan	Unit	140	140
5	Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	Unit	102	102
6	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu di Kawasan Permukiman	Hektar	103.72	103.72
SK. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman				
1	Jumlah layanan perkantoran	layanan	4	4

Tidak ada perbedaan jumlah target kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III pada tahun 2025 menurut Rencana Strategis jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Hal ini disebabkan PK disusun terlebih dahulu dibandingkan dengan Rencana Strategis 2025-2029.

2.4 DIPA

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang berfungsi sebagai instrumen utama dalam mengoperasionalkan perencanaan kinerja instansi pemerintah. Dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), DIPA memiliki peran strategis sebagai penghubung antara dokumen perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, serta pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja.

Pembahasan DIPA dalam Laporan Kinerja Tahunan ini disusun untuk menilai tingkat keselarasan antara alokasi anggaran dengan target kinerja yang telah ditetapkan, serta untuk menggambarkan realisasi anggaran dan capaian kinerja atas output dan outcome yang dihasilkan. Analisis ini menjadi bagian dari upaya penguatan akuntabilitas kinerja, khususnya dalam memastikan bahwa penggunaan anggaran telah memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan dan sasaran instansi.

Melalui pembahasan DIPA yang terintegrasi dalam kerangka SAKIP, diharapkan dapat diperoleh informasi yang komprehensif sebagai dasar evaluasi kinerja, perbaikan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya, sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan hasil (*result oriented*). Berikut ditampilkan rekapan DIPA masing-masing Direktorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal untuk masing-masing satuan kerja di Wilayah Sumatera III :

Tabel 2. 13. Rekapitulasi DIPA Awal Satuan Kerja Wilayah Sumatera III

No	DIPA PK AWAL	BP3KP Sumatera III	Satker Riau	Satker Sumbar	Satker Kepri
1	Sekretaria Jenderal	Rp. 164,688,000	Rp. 70,832,000	Rp. 76,839,000	Rp. 84,812,000
2	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Rp. 50,000,000	Rp 26,744,827,000	Rp. 8,248,120,000	Rp. 5,412,821,000
3	Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	Rp. 131,932,000	Rp. 13,555,019,000	Rp. 75,069,377,000	Rp. 22,409,000
4	Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	Rp. 100,000,000	Rp 25,093,242,000	Rp. 5,358,190,000	Rp. 32,274,732,000
5	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Korupsi	Rp.303,466,000			
TOTAL		Rp. 491,620,000	Rp. 65,463,920,000	Rp. 88,752,526,000	Rp. 37,794,774,000

Tabel 2. 14. Rekapitulasi DIPA pada PK Awal Satuan Kerja Wilayah Sumatera III

No	DIPA PK AWAL	BP3KP Sumatera III	Satker Riau	Satker Sumbar	Satker Kepri
1	Sekretaria Jenderal	Rp. 1,251,514,000	Rp.567,434,000	Rp. 575,135,000	Rp. 556,592,000
2	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Rp. 495,320,000	Rp 11,246,766,000	Rp. 19,935,723,000	Rp. 86,334,000
3	Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	Rp. 252,620,000	Rp. 8,574,046,000	Rp. 77,872,504,000	Rp. 112,999,000
4	Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	Rp.1,141,227,000	Rp. 21,285,044,000	Rp. 6,391,670,000	Rp. 27,447,968,000
5	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Korupsi	Rp.303,466,000			
TOTAL		Rp. 3,444,147,000	Rp. 41,673,290,000	Rp. 104,775,032,000	Rp. 28,203,893,000

Tabel 2. 15. Rekapitulasi DIPA pada PK Akhir Satuan Kerja Wilayah Sumatera III

No	DIPA PK AKHIR	BP3KP Sumatera III	Satker Riau	Satker Sumbar	Satker Kepri
1	Sekretaria Jenderal	Rp.1.353,194,000	Rp.703,514,000	Rp.741,375,000	Rp.654,112,000
2	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	Rp.495,320,000	Rp.8,899,434,000	Rp.19,675,454,000	Rp.713,986,000
3	Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	Rp.546,356,000	Rp.8,535,521,000	Rp.85,492,615,000	Rp.66,198,000
4	Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	Rp.1,141,227,000	Rp.21,365,864,000	Rp.4,724,051,000	Rp.27,427,968,000
5	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Korupsi	Rp.303,466,000			
TOTAL		Rp. 3,839,563,000	Rp. 110,633,495,000	Rp. 39,504,333,000	Rp. 28,862,264,000



Bab.

3

Akuntabilitas Kinerja

- ***Upaya Peningkatan Akuntabilitas***
- ***Capaian Kinerja (Perjanjian Kinerja, Program Priortas, Prioritas Nasional, Pantauan Kantor Staff Presiden)***
- ***Analisis Perbandingan Kinerja***
- ***Analisis Realisasi Anggaran***
- ***Efisiensi Penggunaan Sumber Daya***
- ***Analisis Pemanfaatan Informasi dalam Pelaporan Kinerja***
- ***Faktor Pendukung Keberhasilan dan Penyebab Kegagalan***



AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Hasil Evaluasi (LHE) Implementasi AKIP Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Prmuki Sumatera III Tahun 2023, implementasi AKIP Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III dikategorikan BB (sangat baik) dengan nilai 79,40, yang menunjukkan bahwa akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level staf. Berikut ini merupakan rincian penilaian implementasi AKIP Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III tahun 2023.

Tabel 3. 1. Hasil evaluasi AKIP Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III tahun 2023

No	Komponen	Bobot/Nilai Maks	Nilai Hasil Evaluasi
1	Perencanaan Kinerja	30,00	25,20
2	Pengukuran Kinerja	30,00	23,70
3	Pelaporan Kinerja	15,00	11,25
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	19,25
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100,00	79,40

Tidak tercapainya nilai maksimal dalam implementasi AKIP tersebut disebabkan dengan masih adanya kelemahan dalam pemenuhan beberapa komponen/sub komponen AKIP. Dalam rangka peningkatan akuntabilitas, Direktur Jenderal Perumahan menyampaikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III pada tahun 2024 yang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3. 2. Tindak lanjut hasil evaluasi AKIP tahun 2023

No	Komponen	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Perencanaan Kinerja	Melakukan penyesuaian target dalam reviu renstra	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III telah melakukan evaluasi paruh waktu pada tahun 2023. Mengacu pada dokumen evaluasi paruh waktu bahwasanya target yang tercantum dalam Renstra tidak dapat diubah (tidak dapat dikurangi atau tidak dapat ditambah). Upaya pencapaian kinerja yang dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III setiap tahunnya merupakan capaian
2	Pengukuran Kinerja	Melakukan penyesuaian target dalam reviu renstra	

No	Komponen	Rekomendasi	Tindak Lanjut
			sesuai penetapan target yang telah dialokasikan sesuai DIPA dan Perjanjian Kinerja.
3	Pelaporan Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> a. Melengkapi dokumen kelengkapan SAKIP 5 (lima) tahun terakhir b. Melengkapi dokumen Lakip dengan rumus pencapaian indikator kinerja (dimasukkan pada Bab IV Akuntabilitas Kinerja) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III telah berupaya melengkapi dokumen kelengkapan SAKIP sejak balai berdiri pada tahun 2020, namun adanya dinamika perubahan pegawai serta perubahan media penyimpanan data menyebabkan adanya kendala dalam melengkapi seluruh dokumen akuntabilitas. Selain itu penetapan anggaran di Balai pada tahun 2020 masih melekat di Satuan Kerja. b. Melengkapi dokumen laporan kinerja pada tahun berikutnya serta melakukan penyesuaian format penyusunan Laporan Kinerja berdasarkan peraturan yang ditetapkan.
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Melengkapi dokumen kelengkapan SAKIP 5 (lima) tahun terakhir b. Melakukan penyesuaian target dalam reviu renstra 	<ul style="list-style-type: none"> a. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III telah berupaya melengkapi dokumen kelengkapan SAKIP sejak balai berdiri pada tahun 2020, namun adanya dinamika perubahan pegawai serta perubahan media penyimpanan data menyebabkan adanya kendala dalam melengkapi seluruh dokumen akuntabilitas. Selain itu penetapan anggaran di Balai pada tahun 2020 masih melekat di Satuan Kerja. b. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III telah melakukan evaluasi paruh waktu pada tahun 2023. Mengacu pada dokumen evaluasi paruh waktu bahwasanya target yang tercantum dalam Renstra tidak dapat diubah (tidak dapat dikurangi atau tidak dapat ditambah). Upaya pencapaian kinerja yang dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III setiap tahunnya merupakan capaian sesuai penetapan target yang telah dialokasikan sesuai DIPA dan Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat 3 (tiga) poin rekomendasi yang disampaikan untuk ditindaklanjuti oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera dan Kawasan Permukiman Sumatera III dalam pelaksanaan AKIP tahun 2025. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III telah berupaya menindaklanjuti hasil rekomendasi agar dapat melakukan perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

3.2 Capaian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III melaksanakan kegiatan dengan *output* sebagai capaian terhadap dua sasaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pelaksanaan kegiatan tersebut mencakup wilayah balai

dan satuan kerja di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III diukur dengan cara membandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III tahun 2025.

Kegiatan di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III dilaksanakan dalam rangka mendukung dua sasaran kegiatan, yaitu:

1. Peningkatan akses hunian layak, terjangkau, berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan; penanganan permukiman kumuh yang terpadu; serta tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas secara kolaboratif;
2. Peningkatan kualitas tata kelola dan pengawasan intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Berikut ini merupakan capaian kinerja di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III berdasarkan Perjanjian Kinerja revisi akhir tahun 2025.

Tabel 3. 3. Capaian kinerja utama Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III tahun 2025

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Satuan	2025			
		Target PK	Realisasi	Capaian (%)	
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan					
KEGIATAN: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi					
1	Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100
2	Jumlah dokumen Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100
3	Jumlah dokumen Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	Laporan	1	1	100
4	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	2	2	100
5	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Kegiatan	1	1	100
6	Jumlah laporan kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	Laporan	1	1	100

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Satuan	2025			
		Target PK	Realisasi	Capaian (%)	
7	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	Laporan	4	4	100
8	Jumlah laporan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Laporan	4	4	100
9	Jumlah laporan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Laporan	3	3	100
10	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	Laporan	3	3	100
11	Jumlah dokumen Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100
12	Jumlah dokumen Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100
13	Jumlah Komponen Rumah Untuk Mitigasi Bencana Perumahan Perdesaan	Unit	1	-*	-*
KEGIATAN: Penyediaan Rumah Layak Huni					
1	Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas di Kawasan Permukiman	Unit	10	10	100
2	Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas di Perumahan Perkotaan	Unit	248	247	99,60
3	Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas di Perumahan Perdesaan	Unit	897	894	99,67
4	Jumlah rumah khusus yang terbangun di Perumahan Perdesaan	Unit	140	140	100
5	Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	Unit	102	102	100
6	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu di Kawasan Permukiman	Hektar	103.72	103.72	100
SK. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman					
1	Jumlah layanan perkantoran	layanan	4	4	100

Ket : * Anggaran diblokir

Capaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III pada tahun 2025 secara umum telah memenuhi target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025. Namun, terdapat indikator kinerja yang tidak tercapai secara maksimal, yaitu pada pelaksanaan kegiatan BSPS di Wilayah Perdesaan (4 unit). Tidak

tercapainya kegiatan tersebut secara maksimal disebabkan beberapa kendala yang menyebabkan pekerjaan tidak memungkinkan untuk dilanjutkan seperti pengunduran diri calon penerima bantuan dan bencana alam banjir yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat sehingga memperlambat proses pelaksanaan pekerjaan. Secara keseluruhan, capaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III terhadap komitmen Perjanjian Kinerja tahun 2025 yaitu 99,98%.

3.2.1 Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun 2025 sebanyak 1 rekomendasi kebijakan dengan persentase capaian 100% terhadap target Perjanjian Kinerja tahun 2025.

Terdapat perbedaan *output* capaian kinerja dari KRO yang ada pada DIPA. Pada DIPA, *output* capaian berupa rekomendasi kebijakan berubah menjadi laporan sebagai masukan untuk rekomendasi kebijakan.

Tabel 3. 4. Capaian Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 2025

Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman		
Target	Realisasi	Capaian (%)
1	1	100

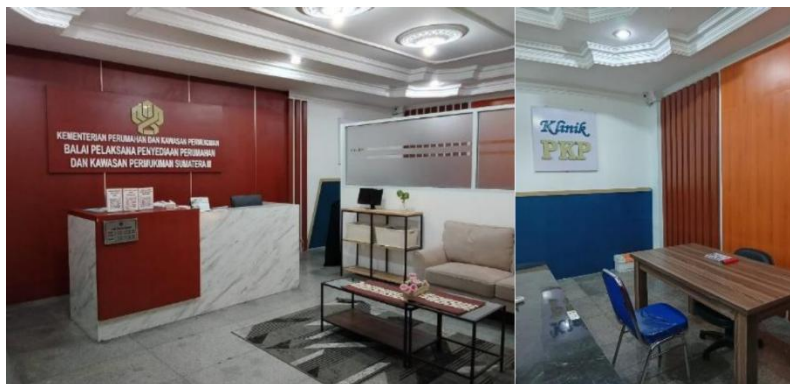
Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III pada tahun 2025 menjadi target kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III sebanyak 1 laporan dimana disampaikan dalam Laporan Akhir 2025 Klinik PKP BP3KP Sumatera III.

Dalam rangka mendukung pencapaian penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman, dilaksanakan kegiatan Klinik PKP di BP3KP Sumatera III pada tahun 2025 meliputi kegiatan informasi, konsultasi dan bantuan teknis yang dilaksanakan secara daring dan luring. Berikut rincian capaian kegiatan selama periode berjalan:



Gambar 3. 1. Laporan Akhir 2025 Klinik PKP BP3KP Sumatera III

A. Penyiapan Ruang Pelayanan Klinik PKP



Gambar 3. 2. Ruang Pelayanan Klinik PKP BP3KP Sumatera III

B. Pembuatan Leaflet dan Banner Klinik PKP dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman



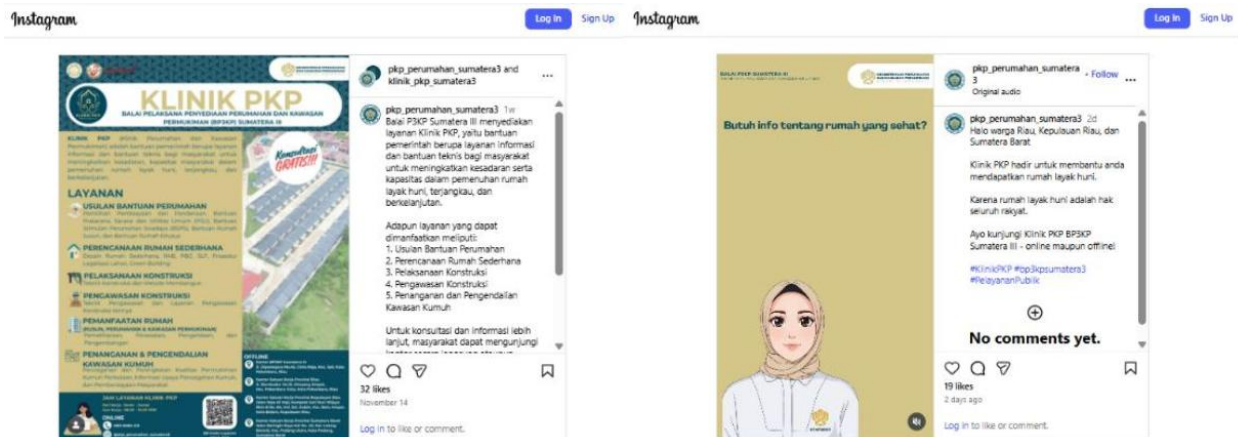
Gambar 3. 3. Leaflet Klinik PKP



Gambar 3. 4. Gambar Banner Klinik PKP dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Lainnya

C. Infografis/Videografis terkait Klinik PKP

Infografis dan videografis terkait Klinik PKP merupakan salah satu bentuk strategi komunikasi publik yang dilaksanakan untuk meningkatkan penyebaran informasi dan pemahaman masyarakat terhadap layanan Klinik PKP. Konten visual tersebut memuat informasi mengenai jenis layanan, mekanisme konsultasi, serta edukasi terkait perumahan layak huni yang dikemas secara informatif dan mudah dipahami. Pemanfaatan media digital ini bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan, meningkatkan aksesibilitas informasi.



Gambar 3. 5. Unggahan Infografis dan Videografis Klinik PKP di Instagram BP3KP Sumatera III

D. Melayani Konsultasi di Kantor BP3KP Sumatera III

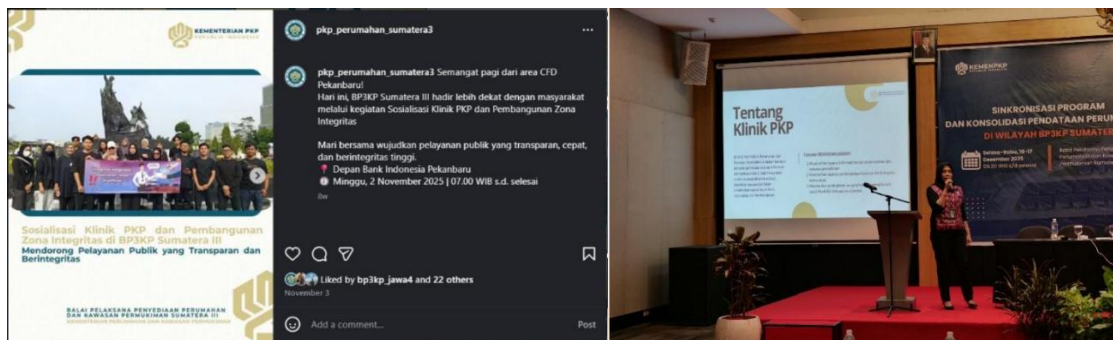
Pelayanan konsultasi di Kantor BP3KP Sumatera III dilaksanakan sebagai wujud komitmen unit kerja dalam memberikan layanan langsung kepada masyarakat terkait penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Kegiatan ini mencakup pemberian informasi, pendampingan, serta konsultasi teknis mengenai pemenuhan rumah layak huni dan program perumahan yang tersedia. Pelaksanaan layanan konsultasi secara tatap muka tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat penyelesaian permasalahan di lapangan.



Gambar 3. 6. Konsultasi di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

E. Sosialisasi Klinik PKP

Kegiatan Sosialisasi Klinik PKP dilaksanakan oleh BP3KP Sumatera III sebagai upaya untuk memperkenalkan dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan Klinik PKP di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Sosialisasi ini mencakup penyampaian informasi mengenai jenis layanan, mekanisme konsultasi, serta peran Klinik PKP dalam mendukung pemenuhan rumah layak huni. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat memperoleh akses informasi yang lebih mudah dan komprehensif.



Gambar 3. 7. Kegiatan Sosialisasi Klinik PKP di CFD Kota Pekanbaru

3.2.2 Kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja

Jumlah laporan kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tematik penyelenggaraan Kawasan permukiman dan akuntabilitas kinerja tahun 2025 sebanyak 1 (satu) laporan dengan persentase capaian 100% terhadap target Perjanjian Kinerja tahun 2025.

Gambar 3. 8. Kegiatan Konsultasi di acara RP3KP di Wilayah Sumatera dan Kalimantan

Tabel 3. 5. Capaian Jumlah laporan kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tematik penyelenggaraan Kawasan permukiman dan akuntabilitas kinerja TA 2025

Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja		
Target	Realisasi	Capaian (%)
1	1	100

Kegiatan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja adalah rangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program/kegiatan tematik di bidang penyelenggaraan kawasan permukiman berjalan sesuai rencana, target, dan ketentuan, serta dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya. Laporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja disusun untuk mendokumentasikan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pemantauan atas program dan kegiatan perumahan dan kawasan permukiman yang dilaksanakan oleh BP3KP Sumatera III pada Tahun Anggaran 2025



Gambar 3. 9. Laporan Akhir Pemantauan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dalam rangka mewujudkan Program 3 (Tiga) Juta Rumah sebagaimana tercantum dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia pada Kabinet Merah Putih, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Balai P3KP Sumatera III melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan dan peningkatan kualitas permukiman pada Tahun Anggaran 2025. Kegiatan tersebut meliputi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), peningkatan kualitas permukiman kumuh, serta peningkatan kualitas sanitasi rumah yang tersebar di wilayah kerja BP3KP Sumatera III.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan kualitas permukiman tersebut memerlukan pemantauan yang berkelanjutan untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan

dan pelaksanaan di lapangan, serta untuk menilai capaian fisik dan keuangan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis yang berlaku. Selain itu, pemantauan diperlukan untuk mengidentifikasi permasalahan, kendala, serta risiko yang muncul selama pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat dilakukan langkah tindak lanjut dan penyesuaian yang diperlukan guna menjamin efektivitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan pelaksanaan program.

A. Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kualitas rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan, dan kenyamanan hunian. Kegiatan BSPS yang menjadi bagian pemantauan BP3KP Sumatera III dilaksanakan di wilayah pesisir Kabupaten Padang Pariaman.

Pemantauan dilakukan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan BSPS, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan konstruksi, serta pengendalian dan pelaporan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 serta petunjuk teknis pelaksanaan BSPS yang berlaku.

Tabel 3. 6. Tabel Pelaksanaan Kegiatan BSPS TA 2025 Delineasi Pesisir

Pelaksanaan Kegiatan BSPS TA 2025 Delineasi Pesisir	
<p>1. Rapat Koordinasi dan Persiapan Pelaksanaan BSPS</p>	<p>BP3KP Sumatera III melaksanakan kegiatan koordinasi dan rapat persiapan dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait. Salah satu kegiatan utama adalah Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan BSPS Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2025 dan dipimpin oleh Kepala BP3KP Sumatera III.</p> <p>Kegiatan tersebut meliputi rapat persiapan bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan guna memperkuat kolaborasi, pendataan dan verifikasi RTLH, serta sinkronisasi data dengan DTSEN dan kejelasan legalitas lahan. Selain itu, dilakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman calon penerima bantuan terkait mekanisme BSPS, prinsip swadaya, dan peran fasilitator. Pada tahap pengendalian, BP3KP Sumatera III melaksanakan rapat evaluasi untuk menilai progres pelaksanaan, mengidentifikasi kendala di lapangan, dan merumuskan tindak lanjut. Hasil evaluasi menjadi dasar pemberian arahan teknis dan rekomendasi kepada pemerintah daerah agar pelaksanaan BSPS berjalan sesuai ketentuan dan target yang ditetapkan.</p>
<p>2. Capaian Pelaksanaan Kegiatan BSPS</p>	<p>Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, pelaksanaan kegiatan BSPS sebanyak 10 unit di Kabupaten Padang Pariaman secara umum telah berjalan sesuai dengan rencana kegiatan tetapi terdapat keterlambatan dikarenakan terjadinya bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera Barat. Capaian fisik menunjukkan sebagian besar rumah telah menyelesaikan pekerjaan konstruksi hingga tahap akhir. Secara keseluruhan, capaian pelaksanaan BSPS delineasi pesisir menunjukkan progres fisik mendekati sebesar 100% dan progress anggaran 100% dengan</p>

Pelaksanaan Kegiatan BSPS TA 2025 Delineasi Pesisir

sebagian besar unit telah mencapai tahap penyelesaian konstruksi. Pelaksanaan kegiatan tetap dilakukan dengan memperhatikan prinsip swadaya masyarakat serta pendampingan teknis dari fasilitator lapangan.

3. Permasalahan Kegiatan BSPS

Dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Padang Pariaman, terdapat beberapa permasalahan yang ditemui, antara lain:

- Keterlambatan pelaksanaan akibat faktor cuaca
- Keterbatasan pasokan material bangunan
- Kondisi khusus penerima bantuan yang memerlukan penyesuaian teknis pelaksanaan
- Beberapa lokasi terdampak bencana hidrometeorologi yang terjadi di wilayah Sumatera Barat, seperti hujan dengan intensitas tinggi dan genangan

4. Tindak Lanjut Kegiatan BSPS

Dilakukan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah, fasilitator lapangan, serta penyedia bahan bangunan untuk memastikan ketersediaan material dan penyesuaian jadwal pelaksanaan. Pendampingan teknis kepada penerima bantuan juga ditingkatkan, khususnya pada lokasi terdampak bencana, agar pelaksanaan pekerjaan dapat dilanjutkan secara bertahap dan tetap memenuhi ketentuan teknis BSPS.



Gambar 3. 10. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan BSPS TA 2025



Gambar 3. 11. Sosialisasi Kepada Masyarakat Terkait Mekanisme BPS

B. Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Peningkatan Kualitas Sanitasi

Pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh dan sanitasi rumah merupakan bagian dari upaya penanganan kawasan permukiman secara terpadu guna menurunkan tingkat kekumuhan dan meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan permukiman masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan melalui penanganan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) kawasan serta penyediaan sarana sanitasi rumah yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh dan sanitasi rumah yang dipantau oleh BP3KP Sumatera III pada Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan di beberapa wilayah, meliputi Kota Padang dan Kabupaten Dharmasraya di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Rokan Hulu di Provinsi Riau, serta Kota Tanjung Pinang di Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 3. 7. Tabel Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Peningkatan Kualitas Sanitasi

Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Peningkatan Kualitas Sanitasi	
1. Koordinasi, Perencanaan Teknis, dan Pengendalian Pelaksanaan	<p>Dalam rangka menjamin keterpaduan pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh dan sanitasi, BP3KP Sumatera III melaksanakan koordinasi dan pendampingan teknis yang mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian kegiatan, termasuk pendampingan pengusulan pendanaan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).</p> <p>Pada tahap perencanaan dan persiapan, dilakukan koordinasi teknis dan rapat pembahasan penyusunan Detail Engineering Design (DED) pada beberapa lokasi, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alih Kelola Pembinaan Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman dilaksanakan di Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Sumatera Barat, di Kota Padang (29 Juli 2025) • Rapat DED kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh Pasie Nan Tigo, Kota Padang dan peningkatan kualitas permukiman kumuh Pasar Lama Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya (5 Agustus 2025); • Verifikasi administrasi dan teknis kegiatan sanitasi di Kota Tanjung Pinang (17 September 2025); • Rapat pembahasan hasil penyusunan DED kegiatan peningkatan kualitas sanitasi di Kawasan Kumuh Kampung Bugis, Kota Tanjung Pinang (15 Oktober 2025). <p>Pada tahap pengendalian dan percepatan pelaksanaan, BP3KP Sumatera III turut melaksanakan rapat koordinasi progres dan percepatan pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh dan sanitasi, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapat koordinasi persiapan kunjungan Menteri PKP, serta rapat progres dan percepatan pelaksanaan pekerjaan di Provinsi Sumatera Barat (27 Oktober 2025).

Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Peningkatan Kualitas Sanitasi		
		<ul style="list-style-type: none"> Rapat progres dan percepatan pelaksanaan kegiatan di Pasar Lamo Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya (12 Desember 2025). <p>BP3KP Sumatera III juga melaksanakan pendampingan teknis pengusulan DAK bidang permukiman kumuh, yang merupakan bagian dari perencanaan jangka menengah penanganan kawasan kumuh. Pendampingan tersebut dilaksanakan melalui Rapat Pengusulan Penanganan Kawasan Kumuh Terpadu Jangka Menengah di Wilayah Sumatera III pada tanggal 25 November 2025, yang membahas sinkronisasi dokumen perencanaan daerah, kesiapan lahan, kolaborasi pendanaan, serta pemenuhan persyaratan teknis pengusulan DAK TPPKTJM.</p>
2. Capaian Kegiatan Kualitas Kumuh	Pelaksanaan Peningkatan Permukiman	<p>Pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh di wilayah kerja BP3KP Sumatera III dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penanganan permukiman kumuh secara terpadu, khususnya dalam pemenuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) serta peningkatan kualitas bangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kegiatan ini difokuskan pada penanganan komponen permukiman kumuh sesuai kriteria teknis yang berlaku, meliputi peningkatan kualitas bangunan rumah, jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum, serta prasarana pendukung lainnya sebagai satu kesatuan penanganan kawasan.</p>
➤ Kawasan Permukiman Kumuh Pasie Nan Tigo Kota Padang, Prov. Sumatera Barat		<ul style="list-style-type: none"> Luas Kawasan Kumuh: 52,64 Ha Nilai Kontrak/Nilai Add: Rp 7.546.874.300 / Rp 8.299.814.800 Jenis Penanganan: Pekerjaan Bangunan Rumah (11 unit), Pekerjaan Jalan Lingkungan (718 m), Pekerjaan Drainase (3040 m) Rencana: 100% Realisasi: 87,37% Deviasi: -12,63%
➤ Kawasan Permukiman Kumuh Pasar Lama Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya, Prov. Sumatera Barat		<ul style="list-style-type: none"> Luas Kawasan Kumuh: 15,64 Ha Nilai Kontrak/Nilai Add: Rp 3.946.916.700 / Rp 4.333.714.500 Jenis Penanganan: Pekerjaan Bangunan Rumah (54 unit), Pekerjaan Jalan Lingkungan (1042 m), Pekerjaan Drainase (674 m), Pekerjaan Penyediaan Air Minum (334 SR) Rencana: 100% Realisasi: 75,02% Deviasi: -24,98%
➤ Kawasan Permukiman Kumuh Danau Dipo Boncah Balong, Kab. Rokan Hulu, Prov. Riau		<ul style="list-style-type: none"> Luas Kawasan Kumuh: 35,58 Ha Nilai Kontrak/Nilai Add: Rp 6.827.898.380 / Rp 7.110.900.000 Jenis Penanganan: Pekerjaan Drainase (1916 m), Pekerjaan Pengelolaan Persampahan (1 unit) Rencana: 100% Realisasi: 86,17% Deviasi: -13,83%
3. Permasalahan Kegiatan Permukiman Kumuh		Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh antara lain:

Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Peningkatan Kualitas Sanitasi	
	<ul style="list-style-type: none"> • kondisi cuaca yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan fisik • keterbatasan tenaga kerja • kendala distribusi material bangunan pada beberapa Lokasi • bencana hidrometeorologi yang terjadi di wilayah • Sumatera Barat pada akhir tahun anggaran turut berdampak pada keterlambatan pelaksanaan sebagian pekerjaan fisik di lapangan
4. Tindak Lanjut Kegiatan Permukiman Kumuh	<p>Sehubungan dengan batas waktu akhir Tahun Anggaran 2025 dan ketentuan bahwa capaian pekerjaan per tanggal 31 Desember harus berada di atas 75%, dilakukan penyesuaian melalui penyusunan Rencana Pelaksanaan Akhir Tahun Anggaran (RPATA). RPATA disusun sebagai dasar pengendalian pelaksanaan kegiatan lanjutan untuk memastikan seluruh pekerjaan fisik yang tersisa dapat diselesaikan secara tuntas pada tahap berikutnya, dengan tetap mengacu pada ketentuan teknis, kualitas pekerjaan, dan prinsip kehati-hatian</p> <p>Tindak lanjut yang dilakukan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • percepatan pelaksanaan pada pekerjaan prioritas • penyesuaian jadwal kerja • peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah, penyedia jasa, dan konsultan pengawas • Pemantauan lapangan juga diperkuat guna memastikan bahwa capaian fisik minimal pada akhir tahun anggaran telah memenuhi ketentuan • pelaksanaan pekerjaan lanjutan dapat diselesaikan sesuai RPATA yang telah disepakati
5. Capaian Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah	<p>Pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas sanitasi rumah di wilayah kerja BP3KP Sumatera III dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penanganan permukiman kumuh secara terpadu, khususnya dalam pemenuhan akses sanitasi layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kegiatan ini difokuskan pada pembangunan dan peningkatan sarana sanitasi dasar rumah tangga yang memenuhi persyaratan teknis, meliputi penyediaan bilik sanitasi, kloset leher angsa, serta tangki septik individual sebagai satu kesatuan sistem pengelolaan air limbah domestik.</p>
➤ Kawasan Pasie Nan Tigo Kota Padang, Prov. Sumatera Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah: 52 Unit • Nilai HPS: Rp 754.466.000 • Type: Swakelola Tipe I • Rencana: 100% • Realisasi: 100% • Deviasi: -
➤ Kawasan Pasar Lama Pulau Punjung, Kab. Dhamasraya, Prov. Sumatera Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah: 54 Unit • Nilai HPS: Rp 859.921.000 • Type: Swakelola Tipe I • Rencana: 100% • Realisasi: 100% • Deviasi: -

Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Peningkatan Kualitas Sanitasi	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kawasan Danau Dipo Bocah Balong, Kab. Rokan Hulu, Prov. Riau 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah: 18 Unit • Nilai HPS: Rp 288.455.000 • Type: Swakelola Tipe I • Rencana: 100% • Realisasi: 100% • Deviasi: -
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kawasan Kampung Bugis, Kota Tanjung Pinang, Prov. Kepulauan Riau 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah: 40 Unit • Nilai HPS: Rp 496.047.490 • Type: Swakelola Tipe I • Rencana: 100% • Realisasi: 100% • Deviasi: -
6. Permasalahan Kegiatan Sanitasi Rumah	<p>Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas sanitasi rumah antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kondisi tanah dengan muka air tanah yang tinggi • keterbatasan ruang pada lokasi rumah penerima bantuan • pengaruh pasang surut air laut • kondisi cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi di beberapa wilayah Sumatera Barat turut mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, khususnya pada tahapan penggalian dan pemasangan tangki septic
7. Tindak Lanjut Kegiatan Sanitasi Rumah	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan penyesuaian metode pelaksanaan melalui penggunaan pompa air pada proses penggalian • Pengaturan waktu kerja menyesuaikan kondisi pasang surut • Penyesuaian desain teknis sesuai kondisi lapangan • Koordinasi dengan pemerintah daerah dan pendamping lapangan juga diperkuat untuk memastikan kegiatan sanitasi tetap dapat diselesaikan dengan memenuhi standar teknis dan keselamatan kerja

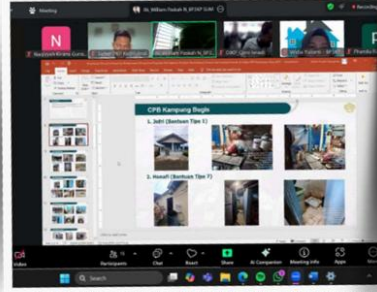
Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Peningkatan Kualitas Sanitasi



ALIH KELOLA PEMBINAAN BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DILAKSANAKAN DI BALAI PENATAAN BANGUNAN, PRASARANA DAN KAWASAN SUMATERA BARAT, DI KOTA PADANG (29 JULI 2025)



VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN TEKNIS KEGIATAN SANITASI DI KOTA TANJUNG PINANG (17 SEPTEMBER 2025)



RAPAT PEMBAHASAN HASIL PENYUSUNAN DED KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS SANITASI DI KAWASAN KUMUH KAMPUNG BUGIS, KOTA TANJUNG PINANG (15 OKTOBER 2025).



PELAKSANAAN DED KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH PROVINSI SUMATERA BARAT (5 AGUSTUS 2025)



Rapat koordinasi persiapan kunjungan Menteri PKP, serta rapat progres dan percepatan pelaksanaan pekerjaan di Provinsi Sumatera Barat



Rapat progres dan percepatan pelaksanaan kegiatan di Pasar Lamo Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya

3.2.3 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh

Tabel 3. 8.Capaian Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh TA 2025


Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh		
Target	Realisasi	Capaian (%)
4	4	100




Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Rumah Susun, Peningkatan Kualitas, dan Penanganan Kumuh di BP3KP Sumatera III dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pengendalian dan penjaminan mutu pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman. Pada tahun 2025, kegiatan ini terealisasi 100%, yang diwujudkan melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh, serta Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah. Pelaksanaan monev tersebut bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan, mengukur capaian kinerja, serta mengidentifikasi permasalahan dan langkah tindak lanjut. Selanjutnya, uraian berikut akan menjabarkan secara rinci pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan BP3KP Sumatera III sepanjang tahun 2025 sebagai dasar evaluasi kinerja dan penyusunan rekomendasi perbaikan ke depan.


Tabel 3. 9. Tabel Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh

No	Kegiatan	Uraian Kegiatan
1	Rapat Tindak Lanjut Kolaborasi Penanganan Kawasan Kumuh Pasie Nan Tigo Kota Padang dan mendampingi Kunjungan Kerja Direktur Jenderal Kawasan Permukiman ke Kawasan Kumuh Pasar Lamo Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.	<p>Waktu dan Tempat Dilaksanakan di Kabupaten Dharmasraya, Kota Padang, pada tanggal 03-07 November 2025</p> <p>Peserta Kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Staff Balai P3KP Sumatera III Staff Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau <p>Pelaksanaan Kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> Rapat Tindak Lanjut Kolaborasi Penanganan Kawasan Kumuh Pasie Nan Tigo Kota Padang <ul style="list-style-type: none"> Pemaparan poin penanganan kawasan kumuh di Pasie Nan Tigo berupa jalan lingkungan sepanjang 718 meter, pembangunan drainase lingkungan sepanjang 3040 meter, perbaikan rumah MBR sebanyak 11 unit, dan peningkatan kualitas sanitasi rumah sebanyak 52 unit. Berdialog dengan tamu undangan terkait progres dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan penanganan kawasan kumuh. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat dan Satuan Kerja untuk teknis kunjungan lapangan ke lokasi. Pendampingan Kunjungan Direktur Jenderal Kawasan Permukiman ke Kabupaten Dharmasraya Monitoring kegiatan Kawasan Kumuh Pasar Lamo Pulau Punjung <ul style="list-style-type: none"> Mendampingi Direktur Jenderal dalam kunjungan lapangan ke lokasi Kawasan Kumuh Pasar Lamo Pulau Punjung untuk memeriksa progres pelaksanaan kegiatan penanganan kawasan kumuh. Berkoordinasi dengan Dinas Permukiman setempat dan Satuan Kerja untuk teknis kunjungan lapangan ke lokasi. Pengarahan oleh Direktur Jenderal Kawasan Permukiman

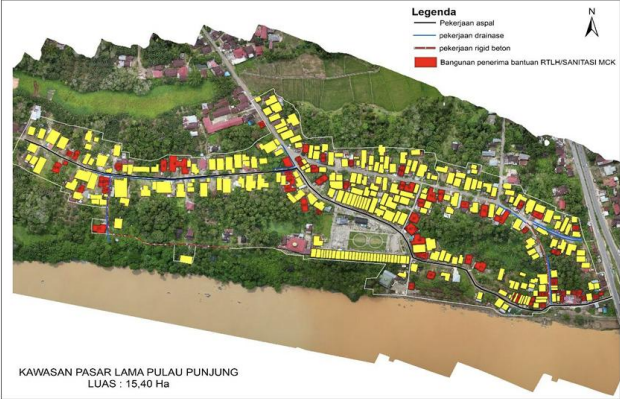
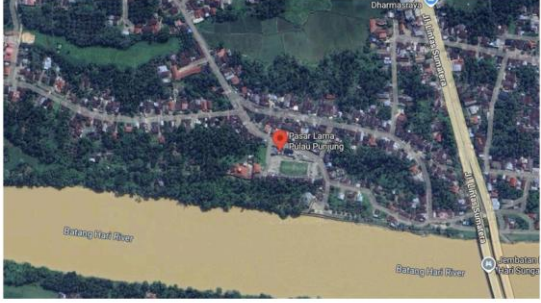
No	Kegiatan	Uraian Kegiatan
		<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan pengarahan dilaksanakan di Kota Padang, dihadiri oleh pegawai Satuan Kerja dan Balai P3KP Sumatera III yang bertugas di Sumatera Barat. • Menyimak arahan Direktur Jenderal mengenai percepatan pencapaian realisasi program, peningkatan kinerja dan pembelajaran mandiri terhadap program-program, dasar hukum terbaru dari Kementerian PKP. <p>d. Pendampingan Kunjungan Direktur Jenderal Kawasan Permukiman ke Pasie Nan Tigo Kota Padang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendampingi Direktur Jenderal dalam kunjungan lapangan ke lokasi Kawasan Kumuh Pasie Nan Tigo Kota Padang untuk memeriksa progres pelaksanaan kegiatan penanganan kawasan kumuh. • Berkoordinasi dengan Dinas Permukiman setempat dan Satuan Kerja untuk teknis kunjungan lapangan ke lokasi. <p>Hasil dan Rekomendasi</p> <p>a. Diperolehnya kesimpulan dan rencana aksi dari Rapat Tindak Lanjut Kolaborasi Penanganan Kawasan Kumuh Pasie Nan Tigo sebagai bahan tindak lanjut Balai dan Satuan Kerja.</p> <p>b. Telah diperoleh data dan dokumentasi terkini dari hasil pemeriksaan progres fisik dan potensi kendala pada pelaksanaan kegiatan penanganan Kawasan Kumuh di Pasie Nan Tigo Kota Padang dan Pasar Lamo Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.</p> <p>c. Telah diterimanya arahan dan usulan penyelesaian kendala dari Direktur Jenderal sebagai strategi bagi Satuan Kerja dan Balai dalam pelaksanaan kegiatan.</p> <p>d. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat direkomendasikan untuk segera menindaklanjuti catatan teknis hasil pemeriksaan progres kegiatan.</p>
		 <p>5 Nov 2025 12:57:10 Jalan Lintas Sumatera Sunpei Datta Kecamatan Pulau Puhjurit Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat</p>

No	Kegiatan	Uraian Kegiatan
		
2	<p>Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Diskusi Mengenai Mekanisme Penyaluran Dana BSPS di Provinsi Sumatera Barat</p>	<p>Waktu dan Tempat Dilaksanakan di Hotel Rocky Plaza Padang, Kota Padang, pada tanggal 03-05 November 2025</p> <p>Peserta Kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> PPK Swadaya Satker Sumatera Barat Koordinator Kabupaten dan TFL Staff Balai P3KP Sumatera III Tenaga Ahli BSPS Provinsi Sumatera Barat <p>Hasil Pelaksanaan Kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> Penanganan bencana dalam BSPS tetap dapat diproses berdasarkan penetapan bencana oleh Bupati/Gubernur meskipun belum ditetapkan sebagai bencana nasional. TFL wajib menyampaikan data bencana yang lengkap dan valid per BNBA kepada PPK, meliputi: Daftar penerima terdampak, Jenis kerusakan, Nilai kerugian, Identifikasi material rusak/hilang/tidak dapat digunakan. Data bencana harus diperbarui apabila terdapat tambahan atau perubahan. TFL memastikan komitmen PB untuk melanjutkan pembangunan dengan mempertimbangkan kondisi pascabencana. Dipastikan tidak terdapat unit yang memerlukan pembangunan baru berbasis RISHA (kerusakan didominasi ringan-sedang). Balai melakukan analisis kerugian dan kerusakan dan menuangkannya dalam Berita Acara Force Majeure sesuai SE DTKPR No. 04/2025. Unit tidak terdampak tetap diupayakan selesai 100%. Penanganan unit terdampak dilakukan secara hati-hati dengan dokumentasi lengkap (foto, kronologi, DRPB, BA lapangan, BA force majeure, keterangan TFL/toko/PB). Mendorong alternatif pembiayaan non-APBN seperti CSR, BAZNAS, dan dukungan asosiasi untuk membantu keterbatasan swadaya PB. Permasalahan di lapangan: <ul style="list-style-type: none"> Distribusi bahan tahap I telah dilaksanakan. Distribusi bahan tahap II belum dapat dilakukan karena: kondisi cuaca, jalan terputus, keterlambatan pasokan material (pasir, kayu, batako, material pabrikan, keterbatasan armada dan stok tool, kesulitan ketersediaan tenaga tukang. Tindak lanjut untuk daerah terdampak: menyusun laporan kronologis kejadian, membuat berita acara keterlambatan, mengajukan permohonan perpanjangan waktu, melakukan koordinasi dengan Pemerintah Nagari dan PPK, menyusun

No	Kegiatan	Uraian Kegiatan
		<p>rencana percepatan pekerjaan, melakukan dokumentasi dan pelaporan secara berkala.</p> 
<p>3</p>	<p>Laporan Peningkatan Permukiman Provinsi Sumatera Barat di Pasie Nan Tigo, Kota Padang dan Pasar Lama Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya</p> <p>Supervisi kualitas Kumuh</p> 	<p>1. Pekerjaan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Pasie Nan Tigo, Kota Padang</p> <p>Pekerjaan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Pasie Nan Tigo mempunyai luas area 52,64 Hektar. Terdapat tiga pekerjaan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kota Padang, yaitu Drainase, Jalan Lingkungan, dan Perbaikan Rumah MBR.</p>  <p>LEGENDA:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ RTLH PB ▲ RTLH PK ■ Sanitasi Tipe 1 — Drainase — Jalan □ deliniasi_PNT <p>- Data Umum :</p>








No	Kegiatan	Uraian Kegiatan																																
		 <p>Koordinat : -0.855625719793888, 100.32932752606706</p> <table border="1"> <tr> <td>Luasan Kumuh</td> <td>52,64 Ha</td> </tr> <tr> <td>Skor Kumuh</td> <td>55 (Kumuh Sedang)</td> </tr> <tr> <td>Pekerjaan Bangunan Rumah</td> <td>11 unit</td> </tr> <tr> <td>Pekerjaan Jalan Lingkungan</td> <td>718 meter</td> </tr> <tr> <td>Pekerjaan Drainase</td> <td>3.040 meter</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Konsultan Supervisi / MK</td> <td>CV. Bintang Sembilan Konsultan KSO PT. Pola Pembangunan Konsultan</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Kontrak</td> <td>3 November 2025</td> </tr> <tr> <td>Nilai Kontrak</td> <td>Rp. 295.289.500</td> </tr> <tr> <td>Kontraktor Pelaksana</td> <td>CV. Riau Andalan Utama</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Kontrak</td> <td>21 Oktober 2025</td> </tr> <tr> <td>Nilai Kontrak</td> <td>Rp. 7.546.874.300</td> </tr> </table> <p>Adendum I</p> <table border="1"> <tr> <td>Tanggal</td> <td>8 Desember 2025</td> </tr> <tr> <td>Nilai</td> <td>Rp. 8.299.814.800</td> </tr> </table> <p>Adendum II</p> <table border="1"> <tr> <td>Tanggal</td> <td>31 Desember 2025</td> </tr> <tr> <td>Nilai</td> <td>Rp. 8.299.814.800</td> </tr> <tr> <td>Perihal</td> <td>Penambahan waktu 50 hari dari 1 Januari- 18 Februari 2026</td> </tr> </table> <p>RPATA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PPK menghitung perkiraan nilai pekerjaan yang akan diselesaikan mulai batas akhir pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan nilai pemeliharaan. 2. PPK membuat SPP penampungan sebesar perhitungan pada nomor satu. 3. SPP penampungan dibuat masing-masing untuk : <ul style="list-style-type: none"> - Perkiraan nilai pekerjaan - Nilai pemeliharaan 4. PPK menyampaikan SPP penampungan kepada PPSPM. 5. PPSPM melakukan pengujian SPP penampungan. 6. Terhadap SPP penampungan yang memenuhi persyaratan pengujian, PPSPM menerbitkan SPM penampungan. 7. PPSPM menyampaikan SPM penampungan kepada KPPN dilampiri dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. <p>- Kendala dan Permasalahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi saluran u-ditch terhalang oleh tiang Listrik dan pohon, sehingga pekerjaan terhambat. • Gangguan cuaca ekstrem dan bencana banjir di Lokasi pekerjaan. • Material di lapangan tersapu oleh banjir. • Gangguan dari oknum masyarakat setempat seperti masalah perletakan alat berat dilokasi pekerjaan yang berada di Kawasan permukiman. <p>- Dokumentasi :</p>	Luasan Kumuh	52,64 Ha	Skor Kumuh	55 (Kumuh Sedang)	Pekerjaan Bangunan Rumah	11 unit	Pekerjaan Jalan Lingkungan	718 meter	Pekerjaan Drainase	3.040 meter	Konsultan Supervisi / MK	CV. Bintang Sembilan Konsultan KSO PT. Pola Pembangunan Konsultan	Tanggal Kontrak	3 November 2025	Nilai Kontrak	Rp. 295.289.500	Kontraktor Pelaksana	CV. Riau Andalan Utama	Tanggal Kontrak	21 Oktober 2025	Nilai Kontrak	Rp. 7.546.874.300	Tanggal	8 Desember 2025	Nilai	Rp. 8.299.814.800	Tanggal	31 Desember 2025	Nilai	Rp. 8.299.814.800	Perihal	Penambahan waktu 50 hari dari 1 Januari- 18 Februari 2026
Luasan Kumuh	52,64 Ha																																	
Skor Kumuh	55 (Kumuh Sedang)																																	
Pekerjaan Bangunan Rumah	11 unit																																	
Pekerjaan Jalan Lingkungan	718 meter																																	
Pekerjaan Drainase	3.040 meter																																	
Konsultan Supervisi / MK	CV. Bintang Sembilan Konsultan KSO PT. Pola Pembangunan Konsultan																																	
Tanggal Kontrak	3 November 2025																																	
Nilai Kontrak	Rp. 295.289.500																																	
Kontraktor Pelaksana	CV. Riau Andalan Utama																																	
Tanggal Kontrak	21 Oktober 2025																																	
Nilai Kontrak	Rp. 7.546.874.300																																	
Tanggal	8 Desember 2025																																	
Nilai	Rp. 8.299.814.800																																	
Tanggal	31 Desember 2025																																	
Nilai	Rp. 8.299.814.800																																	
Perihal	Penambahan waktu 50 hari dari 1 Januari- 18 Februari 2026																																	





No	Kegiatan	Uraian Kegiatan
		 Pekerjaan Jalan Beton
		 Pekerjaan Jalan Beton
		 Pekerjaan Jalan Beton
		 Pekerjaan Jalan Beton
		 Pekerjaan Jalan
		 Pekerjaan U-ditch
		 Pekerjaan Rumah
		 Pekerjaan Rumah
		 Pekerjaan U-ditch
		 Pekerjaan U-ditch dan Jalan
		<p>2. Pekerjaan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Pasar Lama Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya</p> <p>Pekerjaan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Pasar Lama Pulau Punjung mempunyai luas area 15,40 Hektar. Terdapat enam pekerjaan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kabupaten Dharmasraya, yaitu Drainase, Jalan Lingkungan, Perbaikan Rumah MBR, dan Air Bersih.</p>

No	Kegiatan	Uraian Kegiatan																								
-	Data Umum	 <p data-bbox="756 595 979 622">KAWASAN PASAR LAMA PULAU PUNJUNG LUAS : 15,40 Ha</p>  <p data-bbox="815 994 1219 1012">Koordinat : -0.9615526263529012, 101.50157755905336</p> <table border="1" data-bbox="810 1025 1342 1406"> <tbody> <tr> <td>Luasan Kumuh</td> <td>15,64 Ha</td> </tr> <tr> <td>Skor Kumuh</td> <td>60 (Kumuh Berat)</td> </tr> <tr> <td>Pekerjaan Bangunan Rumah</td> <td>54 unit</td> </tr> <tr> <td>Pekerjaan Jalan Lingkungan</td> <td>1.042 meter</td> </tr> <tr> <td>Pekerjaan Drainase</td> <td>674 meter</td> </tr> <tr> <td>Pekerjaan Penyediaan Air Minum</td> <td>334 SR</td> </tr> <tr> <td>Konsultan Supervisi / MK</td> <td>PT. Duta Bhuana Jaya</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Kontrak</td> <td>3 November 2025</td> </tr> <tr> <td>Nilai Kontrak</td> <td>Rp. 366.581.700</td> </tr> <tr> <td>Kontraktor Pelaksana</td> <td>PT. Adinda Maria Parsaktian Abadi</td> </tr> <tr> <td>Tanggal Kontrak</td> <td>13 Oktober 2025</td> </tr> <tr> <td>Nilai Kontrak</td> <td>Rp. 3.946.916.700</td> </tr> </tbody> </table>	Luasan Kumuh	15,64 Ha	Skor Kumuh	60 (Kumuh Berat)	Pekerjaan Bangunan Rumah	54 unit	Pekerjaan Jalan Lingkungan	1.042 meter	Pekerjaan Drainase	674 meter	Pekerjaan Penyediaan Air Minum	334 SR	Konsultan Supervisi / MK	PT. Duta Bhuana Jaya	Tanggal Kontrak	3 November 2025	Nilai Kontrak	Rp. 366.581.700	Kontraktor Pelaksana	PT. Adinda Maria Parsaktian Abadi	Tanggal Kontrak	13 Oktober 2025	Nilai Kontrak	Rp. 3.946.916.700
Luasan Kumuh	15,64 Ha																									
Skor Kumuh	60 (Kumuh Berat)																									
Pekerjaan Bangunan Rumah	54 unit																									
Pekerjaan Jalan Lingkungan	1.042 meter																									
Pekerjaan Drainase	674 meter																									
Pekerjaan Penyediaan Air Minum	334 SR																									
Konsultan Supervisi / MK	PT. Duta Bhuana Jaya																									
Tanggal Kontrak	3 November 2025																									
Nilai Kontrak	Rp. 366.581.700																									
Kontraktor Pelaksana	PT. Adinda Maria Parsaktian Abadi																									
Tanggal Kontrak	13 Oktober 2025																									
Nilai Kontrak	Rp. 3.946.916.700																									

No	Kegiatan	Uraian Kegiatan										
		<p>Adendum I</p> <table border="1"> <tr> <td>Tanggal</td> <td>12 Desember 2025</td> </tr> <tr> <td>Nilai</td> <td>Rp. 4.333.714.500</td> </tr> </table> <p>Adendum II</p> <table border="1"> <tr> <td>Tanggal</td> <td>31 Desember 2025</td> </tr> <tr> <td>Nilai</td> <td>Rp. 4.333.714.500</td> </tr> <tr> <td>Perihal</td> <td>Penambahan waktu 50 hari dari 1 Januari-18 Februari 2026</td> </tr> </table> <p>RPATA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PPK menghitung perkiraan nilai pekerjaan yang akan diselesaikan mulai batas akhir pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan nilai pemeliharaan. 2. PPK membuat SPP penampungan sebesar perhitungan pada nomor satu. 3. SPP penampungan dibuat masing-masing untuk : <ul style="list-style-type: none"> - Perkiraan nilai pekerjaan - Nilai pemeliharaan 4. PPK menyampaikan SPP penampungan kepada PPSPM. 5. PPSPM melakukan pengujian SPP penampungan. 6. Terhadap SPP penampungan yang memenuhi persyaratan pengujian, PPSPM menerbitkan SPM penampungan. 7. PPSPM menyampaikan SPM penampungan kepada KPPN dilampiri dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. 	Tanggal	12 Desember 2025	Nilai	Rp. 4.333.714.500	Tanggal	31 Desember 2025	Nilai	Rp. 4.333.714.500	Perihal	Penambahan waktu 50 hari dari 1 Januari-18 Februari 2026
Tanggal	12 Desember 2025											
Nilai	Rp. 4.333.714.500											
Tanggal	31 Desember 2025											
Nilai	Rp. 4.333.714.500											
Perihal	Penambahan waktu 50 hari dari 1 Januari-18 Februari 2026											
		<ul style="list-style-type: none"> - Kendala dan Permasalah : <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya tenaga kerja untuk masing-masing item pekerjaan. • Ketersediaan batu pecah untuk beton ready mix sulit didapatkan. • Kondisi permukiman dan juga jalan yang sempit. • Adanya penolakan warga saat dilakukan pengecoran beton dikarenakan truck mixer (TM) memasuki kawasan jalan yang sempit dan memicu sedikit perselisihan dengan masyarakat sekitar. • Perubahan jalur pelaksanaan pengaspalan tidak sesuai dengan perencanaan awal sehingga memerlukan penyesuaian dengan kondisi lapangan. • Perubahan jalur pelaksanaan pekerjaan pipa tidak sesuai dengan perencanaan awal sehingga memerlukan penyesuaian dengan kondisi lapangan. • Proses pelaksanaan pekerjaan galian saluran yang mengenai rumah warga dan jalurnya mengenai tiang Listrik. - Dokumentasi : 										

No	Kegiatan	Uraian Kegiatan
		 <p>Pekerjaan Jalan</p> <p>Pekerjaan Jalan</p> <p>Pekerjaan U-ditch</p> <p>Pekerjaan U-ditch</p> <p>Pekerjaan Jalan</p> <p>Pekerjaan Jalan</p> <p>Pekerjaan Jalan</p> <p>Pekerjaan Jalan</p> <p>Pekerjaan U-ditch</p> <p>Pekerjaan U-ditch</p>
<p>4 Laporan Pemantauan dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh</p> 		<p>1. Peningkatan kualitas sanitasi rumah di Kelurahan Kampung Bugis</p> <p>Pekerjaan Peningkatan kualitas sanitasi rumah di Kelurahan Kampung Bugis mempunyai luas area 0,1 Hektar. Terdapat empat tipe pekerjaan dalam Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah di Kota Tanjungpinang, yaitu tipe 1 (pembuatan bilik kamar mandi, pemasangan closet leher angsa, dan pemasangan Bio-Septictank), Tipe 3 (pembuatan bilik kamar mandi, dan pemasangan Bio-Septictank), Tipe 4 (pemasangan closet leher angsa, dan pemasangan Bio-Septictank), dan Tipe 7 (pemasangan Bio-Septictank).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data Umum

No	Kegiatan	Uraian Kegiatan																
		 <table border="1" data-bbox="794 595 1353 875"> <tr> <td>Luasan Kumuh</td> <td>43,19 Ha</td> </tr> <tr> <td>Skor Kumuh</td> <td>24 (Kumuh Ringan)</td> </tr> <tr> <td>Pekerjaan Sanitasi Rumah</td> <td>40 unit</td> </tr> <tr> <td>Pekerjaan</td> <td>Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah Kawasan Permukiman Kumuh Kampung Bugis</td> </tr> <tr> <td>Lokasi</td> <td>Kelurahan Kampung Bugis, Kec. Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang</td> </tr> <tr> <td>Masa Pelaksanaan</td> <td>59 hari Kalender</td> </tr> <tr> <td>Sumber Dana</td> <td>APBN TA 2025</td> </tr> <tr> <td>Nilai Pagu</td> <td>Rp. 713.986.000</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> - Kendala dan Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> • Pasang surut air laut yang membuat proses pekerjaan tidak efisien dilakukan saat pagi dan siang hari • Gangguan cuaca ekstrem dan bencana banjir di Lokasi pekerjaan. - Dokumentasi : <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Pekerjaan Cor Pondasi Tapak Bio-Septictank Rumah Laut</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Pekerjaan Cor Pondasi Tapak Bio-Septictank Rumah Laut</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Pekerjaan Galian Bio-Septictank Rumah Darat</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Pekerjaan Pemasangan dan Cor Dinding Bio-Septictank Rumah Laut</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Pekerjaan Pemasangan Bio-Septictank Rumah Darat</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Pekerjaan Pemasangan Closet Leher Angsa</p> </div> </div> 	Luasan Kumuh	43,19 Ha	Skor Kumuh	24 (Kumuh Ringan)	Pekerjaan Sanitasi Rumah	40 unit	Pekerjaan	Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah Kawasan Permukiman Kumuh Kampung Bugis	Lokasi	Kelurahan Kampung Bugis, Kec. Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang	Masa Pelaksanaan	59 hari Kalender	Sumber Dana	APBN TA 2025	Nilai Pagu	Rp. 713.986.000
Luasan Kumuh	43,19 Ha																	
Skor Kumuh	24 (Kumuh Ringan)																	
Pekerjaan Sanitasi Rumah	40 unit																	
Pekerjaan	Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah Kawasan Permukiman Kumuh Kampung Bugis																	
Lokasi	Kelurahan Kampung Bugis, Kec. Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang																	
Masa Pelaksanaan	59 hari Kalender																	
Sumber Dana	APBN TA 2025																	
Nilai Pagu	Rp. 713.986.000																	

No	Kegiatan	Uraian Kegiatan
		 Rapat Koordinasi dengan Dinas Permukiman Kota Tanjungpinang
		 Rapat Koordinasi di Kantor Kelurahan Kampung Bugis
		 Pekerjaan Pembuatan Bilik Kamar Mandi Rumah Laut
		 Pekerjaan Pembuatan Bilik Kamar Mandi Rumah Darat

3.2.4 Unit Rumah Swadaya Melalui Peningkatan Kualitas di Kawasan Permukiman

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III melaksanakan kegiatan Rumah Swadaya (BSPS) melalui peningkatan kualitas pada tahun 2025 di Kawasan Permukiman yang mencakup wilayah pesisir di Provinsi Sumatera Barat dengan target sebanyak 10 unit. Kinerja pelaksanaan bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya diukur dengan menilai persentase dari perbandingan realisasi pembangunan rumah swadaya terhadap target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja pada tahun bersangkutan. Secara umum pengukuran terhadap persentase capaian kinerja kegiatan BSPS di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah unit rumah swadaya yang dibangun}}{\text{Jumlah unit usulan rumah swadaya}} \times 100$$

Tabel 3. 10. Capaian kegiatan BSPS BP3KP Sumatera III TA 2025 di Delineasi Pesisir

Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Delineasi Pesisir				
No	Provinsi	Target (unit)	Realisasi (unit)	Capaian (%)
1	Sumatera Barat	10	10	100
	Total	10	10	100

Capaian kinerja BSPS yang dilaksanakan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III pada tahun 2025 di delineasi pesisir yaitu 10 unit atau 100% dari total target 10 unit. Kegiatan BSPS di Kawasan Permukiman pada Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan di Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 10 unit yang tersebar di Kecamatan Koto Timur dan Kecamatan Koto Kampung Dalam.

Tabel 3. 11. Rincian pelaksanaan kegiatan BSPS Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III TA 2025 Delineasi Pesisir







No	Kabupaten/Kota	Target (unit)	Realisasi (unit)
	Provinsi Sumatera Barat	10	10

No	Kabupaten/Kota	Target (unit)	Realisasi (unit)
A	Kabupaten Padang Pariaman	10	10
1	Kecamatan Koto Kampung Dalam	4	4
2	Kecamatan Koto Timur	6	6

A. Pelaksanaan Fisik BPS

BP3KP Sumatera III melalui Satker PKP Provinsi Sumatera Barat memastikan pelaksanaan fisik BPS Delienasi Pesisir TA 2025 di Provinsi Sumatera Barat terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

1. Pelaksanaan BPS di Kecamatan Koto Timur

		
Progres Fisik 0%	Progres Fisik 30% - 50%	Progres Fisik 1000%
		
Progres Fisik 0%	Progres Fisik 30% - 50%	Progres Fisik 1000%

2. Pelaksanaan BPS di Kecamatan Koto Kampung Dalam

		
Progres Fisik 0%	Progres Fisik 30% - 50%	Progres Fisik 1000%



B. Permasalahan Pelaksanaan BSPS di Delienasi Pesisir

Beberapa kendala/masalah yang ditemukan selama pelaksanaan BSPS TA 2025 pada delienasi pesisir di Provinsi Sumatera Barat TA 2025, yaitu:

1. Tahap Perencanaan:

- Ditemukan Calon Penerima Bantuan (CPB) yang tidak layak sesuai aturan program BSPS, diantaranya:
 - a. Rumah yang tidak dihuni atau rumah yang sedang ditinggalkan oleh pemiliknya
 - b. Rumah yang sudah layak huni namun kurang terawat saja oleh penghuninya.
- Ditemukan umah CPB yang tidak layak lagi untuk direhab melainkan harus dibongkar dan dibangun baru kembali, sementara kegiatan ini terkait yang PKRS bukan PBRS.

2. Tahap Pelaksanaan:

- Ada 1 (satu) penerima bantuan (PB) atas nama Darmiati meninggal dunia, dan terlambat dalam memulai pelaksanaan fisik rumahnya sehingga berpotensi tidak akan selesai tgl.31 Desember 2025, karena:
 - a. Cuaca yang sering turun hujan sehingga mengganggu aktifitas pelaksanaan fisik maupun suplay bahan di lapangan.
 - b. Toko penyedia agak terkendala dalam mendapatkan papan untuk dinding rumah karena kurangnya pasokan pasca bencana alam di Provinsi Sumatera Barat.
- Ada 2 (dua) penerima bantuan (PB) terkena bencana langsung sehingga berpotensi tidak akan selesai tgl.31 Desember 2025.

3.2.5 Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Terpadu di Kawasan Permukiman

Pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh dan sanitasi rumah merupakan bagian dari strategi penanganan kawasan permukiman secara menyeluruh yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kekumuhan serta meningkatkan derajat kesehatan lingkungan hunian masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan melalui perbaikan dan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) kawasan, disertai dengan penyediaan fasilitas sanitasi rumah yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pada Tahun Anggaran 2025, BP3KP Sumatera III melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh dan sanitasi rumah yang tersebar di beberapa wilayah,

yaitu Kota Padang dan Kabupaten Dharmasraya di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Rokan Hulu di Provinsi Riau, serta Kota Tanjung Pinang di Provinsi Kepulauan Riau.


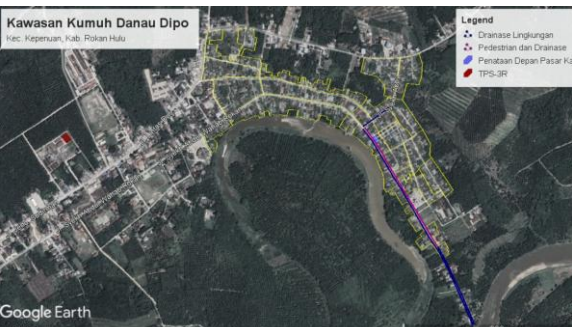
A. Capaian Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

Pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh di wilayah kerja BP3KP Sumatera III dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penanganan permukiman kumuh secara terpadu, khususnya dalam pemenuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) serta peningkatan kualitas bangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kegiatan ini difokuskan pada penanganan komponen permukiman kumuh sesuai kriteria teknis yang berlaku, meliputi peningkatan kualitas bangunan rumah, jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum, serta prasarana pendukung lainnya sebagai satu kesatuan penanganan Kawasan.

Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh pada beberapa lokasi menunjukkan capaian fisik yang cukup baik dan memberikan dampak langsung terhadap perbaikan kualitas lingkungan permukiman, penurunan tingkat kekumuhan kawasan, serta peningkatan kualitas hunian Masyarakat.

Tabel 3. 12. Tabel Progres Peningkatan Kualitas Kumuh tanggal 31 Desember 2025

No	Lokasi Kawasan Kumuh	Detail
1	Pasie Nan Tigo, Kota Padang, Sumatera Barat	<p>a. Luas: 52,64 Ha</p> <p>b. Nilai Kontrak/Nilai Add: Rp 7.546.874.300 / Rp 8.299.814.800</p> <p>c. Jenis Penanganan: Pekerjaan Bangunan Rumah (11 unit), Pekerjaan Jalan Lingkungan (718 m), Pekerjaan Drainase (3.040 m)</p> <p>d. Rencana: 100%</p> <p>e. Realisasi: 87,37%</p> <p>f. Deviasi: -12,63%</p>
2	Pasar Lama Pulau Penujung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat	<p>a. Luas: 15,64 Ha</p> <p>b. Nilai Kontrak/Nilai Add: Rp 3.946.916.700 / Rp 4.333.714.500</p> <p>c. Jenis Penanganan: Pekerjaan Bangunan Rumah (54 unit), Pekerjaan Jalan Lingkungan (1.042 m), Pekerjaan</p>

No	Lokasi Kawasan Kumuh	Detail
	 <p>KAWASAN PASAR LAMA PULAU PUNJUNG LUAS : 15,40 Ha</p>	<p>Drainase (674 m), Pekerjaan Penyediaan Air Minum (334 SR)</p> <p>d. Rencana: 100%</p> <p>e. Realisasi: 75,02%</p> <p>f. Deviasi: -24,98%</p>
<p>3</p>	<p>Danau Dipo Boncah Balong, Kabupaten Rokan Hulu, Riau</p>  <p>Kawasan Kumuh Danau Dipo Kab. Rokan Hulu</p>	<p>a. Luas: 35,58 Ha</p> <p>b. Nilai Kontrak/Nilai Add: Rp 6.827.898.380 / Rp 7.110.900.000</p> <p>c. Jenis Penanganan: Pekerjaan Drainase (1.916 m), Pekerjaan Pengelolaan Persampahan (1 unit)</p> <p>d. Rencana: 100%</p> <p>e. Realisasi: 86,17%</p> <p>f. Deviasi: -13,83%</p>

B. Dokumentasi Pekerjaan Fisik

<p>1. Pasie Nan Tigo, Kota Padang, Sumatera Barat</p>		
 <p>Pekerjaan Jalan Beton</p>	 <p>Pekerjaan Rumah</p>	 <p>Pekerjaan U-ditch</p>
<p>2. Pasar Lama Pulau Penujung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat</p>		
 <p>Pekerjaan Jalan</p>	 <p>Pekerjaan U-ditch</p>	 <p>Pekerjaan Rumah</p>

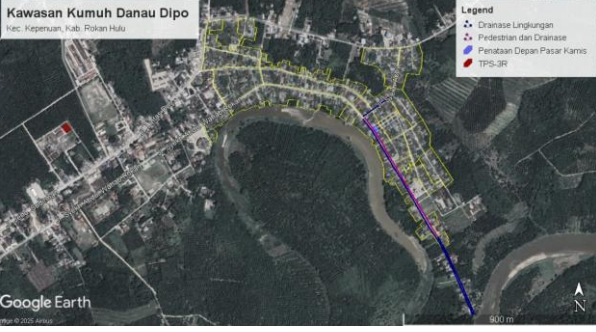

3. Danau Dipo Boncah Balong, Kabupaten Rokan Hulu, Riau



C. Capaian Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah

Tabel 3. 13. Tabel Realisasi Kegiatan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah

No	Lokasi	Detail
1	Pasie Nan Tigo, Kota Padang, Sumatera Barat	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah: 52 unit b. Nilai HPS: Rp 754.466.000 c. Type: Swakelola Tipe I d. Rencana: 100% e. Realisasi: 100% f. Deviasi: -
2	Pasar Lama Pulau Penujung, Kabupaten Dhamasraya, Sumatera Barat	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah: 54 unit b. Nilai HPS: Rp 859.921.000 c. Tupe: Swakelola Tipe I d. Rencana: 100% e. Realisasi: 100% f. Deviasi: -
3	Danau Dipo Boncah Balong, Kabupaten Rokan Hulu, Riau	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah: 18 unit b. Nilai HPS: Rp 288.455.000 c. Type: Swakelola Tipe I d. Rencana: 100% e. Realisasi: 100% f. Deviasi: -

No	Lokasi	Detail
		
4	<p>Kampung Bugis, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau</p> 	<p>a. Jumlah: 40 unit b. Nilai HPS: Rp 496.047.490 c. Type: Swakelola Tipe I d. Rencana: 100% e. Realisasi: 100% f. Deviasi: -</p>

3.2.6 Penyusunan Kebijakan, Startegi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan

Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Startegi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan pada tahun 2025 sebanyak 1 laporan dengan persentase capaian 100% terhadap target Perjanjian Kinerja tahun 2025.

Tabel 3. 14. Capaian penyusunan Kebijakan, Startegi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan TA 2025

Jumlah dokumen Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan		
Target	Realisasi	Capaian (%)
1	1	100

Penyusunan perencanaan penyediaan perumahan di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III pada tahun 2025 menjadi target kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III sebanyak 1 laporan. Terdapat 1 (satu) kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung

penyusunan rekomendasi kebijakan, strategi dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perkotaan, yaitu:

1. Sinkronisasi Program dan Konsolidasi Pendataan Perumahan di Wilayah BP3KP Sumatera III;

Sinkronisasi dan Konsolidasi Pendataan Perumahan di Wilayah BP3KP Sumatera III merupakan kegiatan strategis yang dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera III dalam rangka mendukung pencapaian Program Tiga Juta Rumah sesuai dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan program dan kegiatan perumahan antara pemerintah pusat dan daerah, serta memperkuat kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan di bidang perumahan. Melalui kegiatan ini, BP3KP Sumatera III melakukan evaluasi dan konsolidasi pendataan pembangunan serta renovasi rumah di wilayah delineasi kawasan perkotaan, perdesaan, dan pesisir di Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau.

Penyelenggaraan Kegiatan Sinkronisasi dan Konsolidasi Pendataan Perumahan di Wilayah BP3KP Sumatera III dilaksanakan secara luring pada Senin–Selasa, 06–07 Oktober 2025 bertempat di Ruang Bagindo Aziz Chan, Kantor Walikota Padang, Komplek Balaikota Padang, Jl. Bgd. Aziz Chan By Pass Km 15, Aie Pacah - Kota Padang. Kegiatan ini terdiri atas sesi pemaparan materi oleh narasumber, diskusi dan tanya jawab, serta desk pendataan bersama pemerintah daerah terkait.

Tabel 3. 15. Hasil notulen dari kegiatan Sinkronisasi dan Konsolidasi Pendataan Perumahan di Wilayah BP3KP Sumatera III

No	Pemateri	Keterangan
1	Kepala Balai P3KP Sumatera III	Materi Kebijakan dan Arah Pelaksanaan Program Perumahan, dengan poin- poin materi meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Permasalahan dan target pembangunan perumahan nasional; 2. Peran dan fungsi Kementerian PKP; 3. Wilayah kerja dan tugas BP3KP Sumatera III; 4. Program utama meliputi BSPS, Rusun, Rusus, FLPP; 5. Pembaruan data RTLH melalui aplikasi SIBARU
2	Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha BP3KP Sumatera III	Materi Pengendalian dan Pencegahan Gratifikasi, dengan poin-poin materi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 6. Gratifikasi sebagai akar korupsi; 7. Dampak negatif dari hedonisme dan kerugian negara; 8. Bentuk gratifikasi berupa uang, barang, diskon, komisi; 9. Kewajiban lapor jika ada tindak pidana korupsi.
3	Jajaran PT Semen Padang	Materi dari PT Semen Padang, dengan poin- poin materi meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 10. Pengenalan jenis dan sifat semen; 11. Produk baru: Semen Merdeka ekonomis; 12. Pengenalan bata interlock ramah lingkungan “Sepablock”.
4	Arif Darmawan Kusumanto, S.T., M.P.P.	Materi Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perkotaan, dengan poin-poin materi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 13. Target 3 juta rumah melalui kolaborasi nasional

Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perkotaan

- 14. Program 1 juta rumah di wilayah perkotaan
- 15. Alur pendataan
- 16. Data APBD dihitung setelah realisasi selesai



Gambar 3. 12. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi I

Untuk mendukung kelancaran setiap proses pelaksanaan perumahan di Delineasi Perkotaan, Sebagai tindak lanjut, disepakati beberapa langkah strategis yang akan ditempuh.

Pertama, dilakukan peningkatan kapasitas dan pemahaman pemerintah daerah terhadap penggunaan aplikasi SIBARU, termasuk melalui pelatihan dan pendampingan teknis agar proses penginputan dan pembaruan data dapat dilakukan secara mandiri dan berkesinambungan. Kedua, mendorong percepatan pembaruan data perumahan di seluruh kabupaten/kota agar informasi yang digunakan dalam perencanaan program benar-benar mencerminkan kondisi faktual di lapangan. Ketiga, memperkuat kolaborasi antarinstansi dan antarlevel pemerintahan, baik melalui forum koordinasi reguler maupun mekanisme berbagi data dan informasi, guna memastikan bahwa setiap program bantuan perumahan dapat berjalan lebih tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan.

2. Rapat Sinkronisasi Program dan Konsolidasi Pendataan Perumahan II di Wilayah BP3KP Sumatera III

Kegiatan Rapat Sinkronisasi Program dan Konsolidasi Pendataan Perumahan II difokuskan pada penyelarasan arah kebijakan Program Strategis Nasional 3 Juta Rumah yang selaras dengan RPJMN 2025–2029 dan Asta Cita Presiden, dengan menekankan pentingnya inovasi pembiayaan serta kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi keterbatasan APBN. Rangkaian acara mencakup pemaparan evaluasi dan rencana target Program BPS tahun 2026, mekanisme penanganan permukiman kumuh melalui aplikasi SIBARU, sosialisasi berbagai skema pembiayaan perumahan dan bantuan PSU yang didukung oleh inovasi teknologi konstruksi maupun kontribusi filantropi dari BAZNAS di wilayah Sumatera, serta sosialisasi Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pertemuan ini diakhiri dengan sesi diskusi yang menampung berbagai aspirasi Pemerintah Daerah terkait sinkronisasi data, legalitas lahan, serta usulan pembebasan biaya administrasi bagi MBR guna menyempurnakan implementasi kebijakan Kementerian PKP ke depan.



Gambar 3. 13. Rapat Sinkronisasi Program dan Konsolidasi Pendataan Perumahan II

- Layanan Konsultasi Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

Melayani kegiatan konsultasi program perumahan dan Kawasan permukiman disela acara Rapat Sinkronisasi Program dan Konsolidasi Pendataan Perumahan II di Wilayah BP3KP Sumatera III.



Gambar 3. 14. Kegiatan Konsultasi Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

Layanan konsultasi juga dilakukan dalam kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis RP3KP di Wilayah Sumatera dan Kalimantan yang diselenggarakan oleh Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman. Perwakilan dari BP3KP Sumatera III menerima konsultasi dari perwakilan Dinas Perkim Kabupaten Siak, Dinas Perkim Kabupaten Bengkalis, Dinas Perkim Indragiri Hilir, dan Dinas Perkim Indragiri Hulu.



Gambar 3. 15. Kegiatan Konsultasi di acara RP3KP di Wilayah Sumatera dan Kalimantan

3.2.7 Jumlah Laporan Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan

Jumlah laporan Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan pada tahun 2025 sebanyak 1 laporan dengan persentase capaian 100% terhadap target Perjanjian Kinerja tahun 2025.

Tabel 3. 16. Capaian Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan TA 2025

Jumlah Laporan Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan		
Target	Realisasi	Capaian (%)
1	1	100

Penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan melalui Program BPS di wilayah BP3KP Sumatera III merupakan upaya strategis dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan pelaksanaan yang terkoordinasi, partisipatif, dan berbasis swadaya, Program BPS diharapkan mampu mewujudkan rumah layak huni serta

meningkatkan kualitas lingkungan permukiman perkotaan secara berkelanjutan. Kegiatan laporan kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan dengan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi program BSPS di deleniasi perkotaan.

Tabel 3. 17. Tabel Kegiatan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan

Capaian Kegiatan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	
Kegiatan	Uraian Kegiatan
Deskripsi Kegiatan	<p>Periode : 17 November s/d 20 November 2025 Pelaksana : Dian Sefriansyah, S.Kom., S.T. Fadil Anugrah Prasetyo, S.IP. Khikmatur Rasyidah, S.T. Masri Elysha Siregar, S.Ars Lokasi : Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.</p>
Monitoring Pelaksanaan BSPS di Wilayah Kota Padang	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Monitoring Pelaksanaan BSPS di Wilayah Kota Padang 17-20 November 2025 dihadiri Oleh : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Subdirektorat Wilayah I, Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan. 2. Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah II, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III. 3. Tenaga Ahli BSPS. 4. Koordinator Kabupaten/Kota. 5. Tenaga Fasilitator Lapangan. 6. CPNS Kementerian PKP. - Kegiatan Monitoring Pelaksanaan BSPS di wilayah Kota Padang dilaksanakan untuk meninjau secara langsung kelengkapan proposal serta memastikan bahwa seluruh tahapan kegiatan berjalan sesuai ketentuan. Pemeriksaan proposal menjadi fokus utama, di mana proposal terdiri atas dokumen administrasi dan dokumen teknis. Dokumen administrasi berfungsi menunjukkan bahwa seseorang memenuhi syarat sebagai Calon Penerima Bantuan (CPB), sedangkan dokumen teknis mencakup isian format penilaian kualitas rumah, rencana teknis pekerjaan, dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Selain penelaahan dokumen, monitoring juga dilakukan terhadap tahap pekerjaan di lapangan untuk melihat progres pembangunan, kesesuaian pelaksanaan dengan rencana teknis, serta pemanfaatan dana stimulan yang telah diberikan. Melalui kegiatan ini, diperoleh gambaran menyeluruh mengenai kesiapan dokumen, kondisi eksisting rumah, dan perkembangan pekerjaan, sehingga memastikan bahwa Program BSPS di Kota Padang terlaksana dengan baik, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. <ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan hasil peninjauan di Kelurahan Gunung Sarik, Kota Padang, kegiatan monitoring dilakukan terhadap tiga penerima bantuan BSPS. Tim melakukan pengecekan proposal serta pendokumentasian kondisi rumah sebagai bagian dari proses pemeriksaan awal. Dari hasil pengamatan, seluruh penerima bantuan sedang melaksanakan pekerjaan pada Tahap I, di mana material pembangunan yang tercantum dalam DRPB Tahap I telah diterima hampir 100% oleh masing-masing Penerima Bantuan. Bentuk swadaya yang diberikan juga beragam, meliputi swadaya tenaga maupun swadaya berupa dana tambahan. Selain itu, mayoritas lahan tempat pembangunan rumah merupakan lahan hibah dari keluarga atau pihak lain. • Berdasarkan hasil peninjauan di Kelurahan Lubuk Minturun, Kota Padang, kegiatan monitoring dilakukan terhadap lima penerima bantuan BSPS. Tim melakukan pengecekan proposal serta pendokumentasian kondisi rumah sebagai bagian dari proses pemeriksaan awal. Dari hasil pengamatan, seluruh penerima bantuan sedang melaksanakan pekerjaan pada Tahap I, di mana material pembangunan yang tercantum dalam DRPB Tahap I telah diterima hampir 100% oleh masing-masing Penerima Bantuan. Bentuk swadaya yang diberikan juga beragam, meliputi swadaya tenaga maupun swadaya dalam bentuk dana tambahan. Pada pemeriksaan lebih lanjut, ditemukan beberapa ketidaksesuaian yang perlu dilakukan perbaikan. Pada Form II-11 Rencana Teknis milik Penerima Bantuan Syamsiar, terdapat ketidaksesuaian antara denah eksisting yang ditampilkan dengan

Capaian Kegiatan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan

kondisi nyata di lapangan sehingga memerlukan revisi oleh TFL. Selain itu, pada rumah Syamsiar juga belum terdapat kolom pada tumpuan kuda-kuda atap, yang berpotensi menimbulkan risiko keselamatan sehingga diperlukan penyesuaian teknis lebih lanjut. Sementara itu, pada rumah Penerima Bantuan Rama Chandra, ditemukan bahwa lokasi bangunan berada terlalu dekat dengan aliran sungai. Kondisi ini membutuhkan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan keselamatan, kestabilan struktur, dan kelayakan lokasi agar pembangunan tetap memenuhi aspek keamanan.

- Berdasarkan hasil peninjauan di Kelurahan Pisang, Kota Padang, kegiatan monitoring dilakukan terhadap satu penerima bantuan BSPS. Pada saat pemeriksaan proposal, diketahui bahwa penerima bantuan belum melaksanakan pekerjaan pada Tahap I. Berdasarkan DRPB Tahap I, material bangunan yang seharusnya diterima baru mencapai sekitar 80%, sehingga pekerjaan belum dapat dimulai. Kondisi ini diperkuat dengan informasi dari Penerima Bantuan yang menyampaikan bahwa sebagian material masih dalam proses pengiriman dan tukang yang direncanakan untuk mengerjakan pembangunan masih menyelesaikan pekerjaan lain. Situasi tersebut menjadi faktor penghambat dimulainya Tahap Pekerjaan I dan perlu dilakukan pemantauan lanjutan untuk memastikan pekerjaan dapat segera berjalan sesuai ketentuan program.
- Pemeriksaan juga dilakukan terhadap toko atau penyedia bahan bangunan, termasuk pengecekan kelancaran proses pemilihan toko terbuka yang dilaksanakan oleh Penerima Bantuan. Tim memastikan bahwa tahapan pemilihan penyedia berjalan sesuai prosedur, transparan, serta tidak terdapat intervensi pihak tertentu. Selain itu, dilakukan penelusuran terkait potensi praktik pungutan liar (pungli) pada saat pemesanan maupun pengiriman material. Berdasarkan hasil wawancara, seluruh pihak yang ditemui menyampaikan bahwa proses berjalan aman, tertib, dan tidak terdapat pungutan liar dalam bentuk apa pun. Laporan pengiriman material juga telah disampaikan oleh penyedia sesuai ketentuan Format II-33, sehingga dapat dipastikan bahwa distribusi bahan bangunan berlangsung sesuai aturan





3.2.8 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan pada tahun 2025 sebanyak 2 laporan dengan persentase capaian 100% terhadap target Perjanjian Kinerja tahun 2025.

Tabel 3. 18. Capaian Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan TA 2025

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan		
Target	Realisasi	Capaian (%)
2	2	100

Tabel 3. 19. Capaian Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan

Capaian Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	
Kegiatan	Uraian Kegiatan
Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	<p>Koordinasi penyelenggaraan perumahan perkotaan pada Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan secara intensif oleh Satker PKP Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumbar dan Kota terkait. Kegiatan koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman kebijakan, perencanaan, serta mekanisme pelaksanaan program perumahan perkotaan, khususnya program BPS. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk pemanfaatan dan sinkronisasi data statistik sebagai dasar perencanaan dan penetapan sasaran program.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dengan dinas BPN provinsi Sumatera Barat mengenai program 3 Juta Rumah:  - Koordinasi dengan BPS Provinsi Sumatera Barat:  - Koordinasi dengan Dinas Permukiman Kota Padang di Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Sumbar:

Capaian Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan

- Rapat di Dinas Perkim Prov. Sumbar bersama Dinas Perkim Kabupaten/Kota:



- Koordinasi dengan Dinas Perkim Kota Padang:



- Koordinasi dengan Dinas Permukiman Kota Solok:



Capaian Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan

- Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Pendataan Perumahan serta Dukungan Program Tiga Juta Rumah Provinsi Sumatera Barat:



- Koordinasi dengan Walikota Padang Panjang:



Berdasarkan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Pembangunan Rumah Susun TA 2024 - 2025 Tahap II beserta Manajemen Konstruksinya nomor PR 0201-Mn/933 Penyelenggaraan perumahan perkotaan di Kepulauan Riau berupa Rumah Susun di Tanjung Batu, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun. Rumah susun diperuntukkan untuk ASN RSUD Tanjung Batu Kundur sejumlah 58 unit, Wiyata tipe 24 / 4 lantai dengan kontrak tahun jamak

- Data Umum

Alamat	Jl. Dipogonoro No. 001, Tanjung Batu Kundur, Kabupaten Karimun
Tipe	Wiyata Tipe 24 / 4 Lantai
Unit	58 Unit
Kontraktor	PT Cipta Adhi Guna
Tanggal Kontrak Fisik	25 Oktober 2024
Nilai Kontrak Fisik	Rp21.671.900.569
Waktu Pelaksanaan	300 Hari Kerja
MK	PT Cipta Multi Kreasi KSO PT Bumi Marna Indonusa
Tanggal Kontrak MK	25 Oktober 2024
Nilai Kontrak MK	Rp1.316.990.580
Waktu Pelaksanaan	300 Hari Kerja

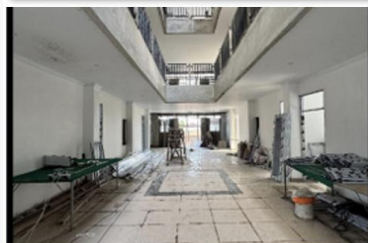
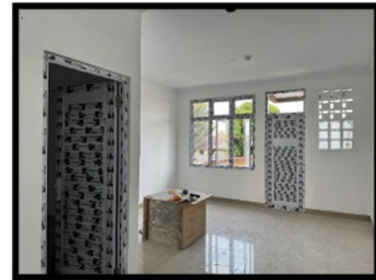
- RPATA

- PPK menghitung perkiraan nilai pekerjaan yang akan diselesaikan mulai batas akhir pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan tanggal 22 Desember 2025.
- Dilakukan BAST RPATA Penampungan pada aplikasi SAKTI (BAPP, SPTJM, karwas per tanggal 22 Desember 2025).
- PPK mengajukan SPM penampungan kepada PPSPM.

Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan Provinsi Kepulauan Riau

Capaian Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan

- PPSPM melakukan pengujian SPM penampungan.
- Terhadap SPM penampungan yang memenuhi pesyaratan pengujian, PPSPM menerbitkan SPM penampungan.
- PPSPM menyampaikan SPM penampungan kepada KPPN dilampiri dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
- Pada tanggal 31 Desember 2025 Penyedia membuat surat pernyataan dalam rangka permohonan pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan melewati batas akhir tahun anggaran melalui rekening penampungan sesuai PMK No.84 Tahun 2025.
- Pada tanggal 31 Desember 2025 PPK menghitung perkiraan nilai pekerjaan yang akan diselesaikan melewati tahun dengan denda dan mengajukan perpanjangan waktu pelaksanaan di aplikasi SAKTI.
- PPK mengajukan pemberian kesempatan kepada PPSPM di aplikasi SAKTI dengan melampirkan BAPP, SPTJM, karwas.
- PPSPM menyetujui pemberian kesempatan melewati akhir tahun.
- Kendala dan Permasalahan :
 - Pengiriman material Sanitair Closet duduk, dll. dari Jakarta via ekspedisi darat posisi saat ini di Kapal perjalanan ke tanjung batu.
 - Penutup atap UPVC belum terpasang seluruhnya menunggu pengiriman material onsite di proyek .
 - Pekerjaan Kusen Pintu Hunian lantai 4, daun pintu hunian lantai 2, lantai 3 dan lantai 4 belum dikerjakan.
 - Pekerjaan Perapihan Lisplank Beton Koridor belum diselesaikan.
 - Pekerjaan Landscaping dan Jalan akses belum dikerjakan .
- Dokumentasi :



3.2.9 Jumlah laporan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan

Jumlah laporan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan pada tahun 2025 sebanyak 4 laporan dengan persentase capaian 100% terhadap target Perjanjian Kinerja tahun 2025.

Tabel 3. 20.Capaian laporan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan TA 2025

Jumlah laporan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan		
Target	Realisasi	Capaian (%)

4

4

100

Koordinasi penyelenggaraan perumahan perkotaan pada Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan secara intensif oleh Balai Pelaksana Penyedia Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 bersama pemerintah daerah dan kota terkait. Kegiatan koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman kebijakan, perencanaan. Berikut beberapa koordinasi kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perkotaan :

Tabel 3. 21. Tabel Capaian laporan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan

Capaian laporan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	
Kegiatan	Uraian Kegiatan
Deskripsi Kegiatan	Periode : 10 September s/d 13 September 2025 Pelaksana : Widia Yulianti, S.T. dan Rani Veronika, S.T Lokasi : Kota Bandung, Jawa Barat Agenda : Rapat Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan Wilayah Barat (Sumatera, Kalimantan, dan Jawa)
Rapat Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan Wilayah Barat (Sumatera, Kalimantan, dan Jawa)	<ul style="list-style-type: none"> • Pada tanggal 11 September 2025 dilaksanakan hari pertama kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan Wilayah Barat (Sumatera, Kalimantan, dan Jawa). Yang diawali dengan keynote speech dari Bu Tati Meilani Kacaribu, S.T.,M.P.W.K kemudian dilanjutkan penjelasan dan arahan terkait tugas dan fungsi dari : • Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Lingkup Dukungan Kegiatan Dari Balai/Satker Serta Evaluasi Kegiatan di Balai/Satker • Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Lingkup Dukungan Kegiatan Dari Balai/Satker Serta Evaluasi Kegiatan di Balai/Satker • Direktorat Pembiayaan Perumahan Perkotaan dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Lingkup Dukungan Kegiatan Dari Balai/Satker Serta Evaluasi Kegiatan di Balai/Satker • Direktorat Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Lingkup Dukungan Kegiatan Dari Balai/Satker Serta Evaluasi Kegiatan di Balai/Satker • Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Lingkup Dukungan Kegiatan Dari Balai/Satker Serta Evaluasi Kegiatan di Balai/Satker • Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Lingkup Dukungan Kegiatan Dari Balai/Satker Serta Evaluasi Kegiatan di Balai/Satker • Arahan dan Pembukaan Oleh Ibu Tati Meilani Kacaribu sebagai Direktur Sistem dan strategi penyelenggaraan perumahan perkotaan Jenderal Perumahan Perkotaan • Arahan terkait Tugas dan Fungsi Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan dalam Penyelenggaraan Perumahan disampaikan oleh Bapak Arif Darmawan K, S.T., M.P.P. sebagai Kepala Subdirektorat Pemantauan Pemantauan dan Evaluasi Dirjen Perkotaan. Memiliki tugas Koordinasi dan perumusan kebijakan dan pengembangan strategi, penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan kemitraan dan kelembagaan pengelolaan data dan sistem informasi pemantauan dan evaluasi. • Arahan terkait Tugas dan Fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan yang disampaikan oleh bapak Haryo Wacono, S.T. selaku Kepala Bagian SDM dan Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal

Capaian laporan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan

Perumahan Perkotaan. Memiliki tugas dan fungsi memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan direktorat jenderal.

- Arahan terkait tugas dan fungsi Direktorat Pembiayaan Perumahan Perkotaan dalam Penyelenggaraan Perumahan yang disampaikan oleh Ibu Ratna Indriani, S.E., M.M.. Memiliki tugas dan fungsi penyusunan program, anggaran, penyiapan perumusan kebijakan dan penyaluran kemudahan, sinkronisasi dan penyusunan NSPK.
- Pada tanggal 12 September 2025 dilaksanakan hari kedua membahas terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang didasarkan atas Perpres No 29 Tahun 2014 & Permen PANRB No 88 Tahun 2021 yang disampaikan oleh Ibu Ee Fitri Herwanti, S.E., M.T.
- Penyelenggaraan SAKIP terdiri dari :
 - Rencana Strategis (Renstra) yang berisi Rencana Strategis Kementerian/Lembaga untuk periode 5 tahun yang mengacu dari RPJMN.
 - Perjanjina Kinerja (PK) berisikan :
 - Rencana Kerja & Anggaran (RENJA/RKA) : berisikan target kegiatan & kebutuhan anggaran- periode 1 tahunan.
 - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) : alokasi anggaran yang dapat dikerjakan atau diperbelanjakan : perjanjian harus didasarkan pada RKA dan DIPA yang berisikan Target Kinerja dan Indikator Kinerja.
 - TTD Perjanjian Kinerja (PK) : secara berjenjang : Satker -> Unor/Pimpinan Satker/Balai-> Menteri
Menteri -> Presiden melalui MenPAN-RB.
 - Monitoring dan evaluasi
 - Pengukuran Kinerja : diukur dengan indikator kinerja. Yang berisi : Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja
 - Perbandingan Tahunan -> DIPA/APBN
 - Perbandingan 5 Tahunan -> Renstra K/L
 - Pengelolaan Data Kinerja : Mencatat/Mengelola/Melaporkan data kinerja.
 - Pelaporan Kinerja : Laporan Kineerja Interim (Triwulan) dan Laporan Kinerja Tahunan.
 - >Laporan kinerja pusat merupakan kompolasi/rangkuman laporan kinerja K/L
 - >Laporan Kinerja Pusat akan direview oleh BPKP-> Menteri Keuangan -> Presiden
 - Review dan Evaluasi Kinerja : yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah -> Menteri/Pimpinan Lembaga-> MenPANRB
 - Dokumentasi :



Capaian laporan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan

	
<p>Monitoring dan Evaluasi Rusun Kejati Riau dan Rusun Batu Kundur Kabupaten Karimun</p>	
<p>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan BSPS di Kota Solok</p>	<p>Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program BSPS di Kota Solok , Sumatera Barat. Pelaksanaan kegiatan ini di hadiri oleh :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perwakilan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan • Perwakilan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III (Andi Iqbal Syahril, Kania Mulyono, Nurul Nabila Maharani dan Rahajeng Hafidz Bastian) • Koordinator Kota dan TFL BSPS Kota Solok <p>Tim pelaksana Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pada rumah penerima bantuan Sarikem yang berlokasi di Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan rumah swadaya berlangsung sesuai ketentuan, serta memantau progres pekerjaan dan kecukupan material di lapangan.</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, penerima bantuan telah melaksanakan beberapa pekerjaan secara swadaya, antara lain pekerjaan pondasi, sloof, kerangka atap, penutup atap, dan dinding pengisi. Progres tersebut telah sesuai dengan komponen peningkatan kualitas rumah yang diperbolehkan dalam program BSPS.</p> <p>Tim kemudian melakukan verifikasi terhadap material yang telah diterima. Material tahap pertama yang sudah tersedia di lokasi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Semen 10 sak – Besi Ø 8 mm sebanyak 19 batang – Besi Ø 10 mm sebanyak 12 batang – Kawat beton 2 kg – Paku biasa 0,65 kg

Capaian laporan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan

- Paku seng 2 kotak
- Seng gelombang 30 lembar
- Pasir sebanyak 2,50 m³
- Batako 450 buah
- Kayu ukuran 5/7 sebanyak 28 batang
- Kayu ukuran 5/10 sebanyak 18 batang
- Kusen pintu 1 unit
- Kusen jendela 3 unit

Sementara itu, material tahap kedua belum diterima, sehingga progres pembangunan masih terbatas pada penggunaan material tahap pertama. Tim memberikan arahan agar pendamping dan penerima bantuan terus berkoordinasi untuk memastikan pengiriman material tahap berikutnya dapat dilakukan tepat waktu.

Selain memeriksa progres fisik, tim juga mencatat adanya perubahan lokasi pintu kamar serta rencana perubahan desain awal. Perubahan ini harus disesuaikan kembali dengan gambar rencana dan RAB Program BSPS agar tidak menimbulkan ketidaksesuaian pekerjaan. Tim mengingatkan bahwa setiap perubahan desain harus melalui persetujuan pendamping teknis untuk menjaga ketepatan perencanaan dan efektivitas pelaksanaan swadaya.

Secara umum, pekerjaan berjalan dengan baik meskipun masih menunggu kelengkapan material tahap kedua. Tim berharap kegiatan pembangunan dapat terus dilaksanakan sesuai standar teknis serta mematuhi seluruh ketentuan dalam Program BSPS.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program BSPS di Kota Solok , Sumatera Barat. Pelaksanaan kegiatan ini di hadiri oleh :

- Perwakilan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan
- Perwakilan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III (Andi Iqbal Syahril, Kania Mulyono, Nurul Nabila Maharani dan Rahajeng Hafidz Bastian)
- Koordinator Kota dan TFL BSPS Kota Solok

Sebagai bagian dari rangkaian monitoring dan evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), tim melakukan kunjungan ke Toko Ane Bangunan yang berlokasi di Jalan Bypass, Kota Solok. Kunjungan ini bertujuan untuk memverifikasi ketersediaan material, proses distribusi, serta memastikan transparansi dan kelancaran suplai material kepada penerima bantuan.

Berdasarkan hasil dialog dan pemeriksaan data di toko, disampaikan bahwa sekitar 60%–65% material telah terdistribusi kepada para penerima bantuan. Progres distribusi dinilai cukup baik, meskipun pihak toko mengakui bahwa pengiriman ke wilayah yang berada di daerah terbawah atau akses sulit membutuhkan waktu lebih lama, sehingga sering menjadi penyebab keterlambatan distribusi.

Toko Ane Bangunan juga menunjukkan bukti-bukti pengiriman material sebagai bentuk pertanggungjawaban, termasuk dokumentasi dan catatan pengantaran ke

Capaian laporan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan

masing-masing penerima bantuan. Hal ini menjadi bagian dari upaya memastikan distribusi dilakukan secara transparan dan sesuai kebutuhan di lapangan.

Dari hasil kunjungan, pihak toko menyampaikan bahwa proses pelelangan dan pemilihan toko penyedia material untuk BSPS saat ini dinilai lebih transparan dan fair, sehingga memberikan peluang yang lebih terbuka bagi toko material untuk berpartisipasi secara jujur dan kompetitif.

Pihak toko juga memberikan masukan bahwa pencairan dana sebaiknya dapat dipercepat, sehingga pengadaan dan distribusi material bisa berjalan lebih lancar tanpa menunggu terlalu lama. Selain itu, mereka menyatakan bahwa pengiriman material umumnya disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan masing-masing penerima bantuan, agar tidak terjadi penumpukan material di lokasi dan pekerjaan dapat berlangsung efektif.

Secara keseluruhan, distribusi material dari Toko Ane Bangunan berjalan baik dan terpantau sesuai ketentuan, meskipun terdapat tantangan teknis pada wilayah dengan akses sulit.



3.2.10 Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan

Bantuan pembangunan rumah susun berdasarkan Peraturan Menteri PKP nomor 10 Tahun 2025 tentang pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus. Bantuan pembangunan rumah susun diberikan kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, lembaga pendidikan keagamaan berasrama dan yayasan atau lembaga yang bergerak di bidang sosial, kemanusiaan atau pendidikan. Pembangunan rumah susun bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang dan tanah, serta mengurangi luasan dan mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan program bantuan pembangunan rumah susun untuk mewujudkan rumah susun yang laik fungsi dan layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan.

Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan rumah susun pada tahun 2025 oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III terdiri dari pembangunan rumah susun. Kinerja pelaksanaan penyelenggaraan rumah susun diukur dengan menilai persentase dari perbandingan realisasi pembangunan atau pemeliharaan rumah susun terhadap target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja pada tahun bersangkutan. Secara umum pengukuran terhadap persentase capaian kinerja penyelenggaraan rumah susun di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah unit rumah susun yang dibangun atau dipelihara}}{\text{Jumlah unit usulan rumah susun atau dipelihara}} \times 100$$

Tabel 3. 22. Capaian pembangunan rumah susun Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III TA 2025

Jumlah rumah susun yang dibangun				
No	Lokasi Rumah Susun	Target (unit)	Realisasi (unit)	Capaian (%)
1	Provinsi Riau	44	44	100
2	Provinsi Kepulauan Riau	58	58	100
Total		102	102	100

Pembangunan rumah susun yang dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III pada tahun 2025 berada di 2 (dua) provinsi, yaitu Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 3. 23. Rincian pelaksanaan pembangunan rumah susun Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III TA 2025

No	Rumah Susun	Tahun Pelaksanaan	Kabupaten/Kota	Jumlah Tower	Tipologi	Jumlah Unit	Sasaran Penerima
Provinsi Riau							

No	Rumah Susun	Tahun Pelaksanaan	Kabupaten/Kota	Jumlah Tower	Tipologi	Jumlah Unit	Sasaran Penerima
1	Pembangunan Rumah Susun Kejati Riau	MYC 2025	Kota Pekanbaru	1	Tipe Wisma Arunika 36 / 3 lantai	44	ASN
Provinsi Kepulauan Riau							
2	Pembangunan Rumah Susun Pemkab Karimun RSUD Tanjung Batu Kundur	MYC 2024-2025	Kabupaten Karimun	1	Tipe Asrama Wiyata 24 / 4 lantai	58	Pemkab

Penyelenggaraan rumah susun yang dilaksanakan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III pada tahun 2025 tidak terlepas dari isu yang perlu menjadi perhatian untuk perbaikan kinerja yang berkelanjutan sebagaimana berikut ini:

1. Pekerjaan di lapangan beberapa hari tersendat bahkan berhenti sehingga progress rencana tidak tercapai
2. Tenaga kerja masih menunggu pembayaran upah di lapangan dari pihak kontraktor agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan optimal
3. Pengiriman material Sanitair Closet duduk, pompa air, dan utilitas panel dari Jakarta menunggu jadwal kapal dikirim tanggal 26 November 2025
4. Material dan bahan pekerjaan rusun belum semua sampai dan tersedia di lapangan Sebagai upaya tindak lanjut untuk mencapai kinerja yang maksimal dalam penyelenggaraan rumah susun,

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan instruksi kepada pihak Kontraktor segera menyelesaikan permasalahan pembayaran pekerja dan penyediaan material dan bahan onsite di lapangan
2. Memberikan instruksi kepada Kontraktor segera melakukan pembayaran upah agar para pekerja dapat melaksanakan pekerjaan dengan lancar di lapangan
3. Memberikan instruksi kepada Kontraktor Jika via kapal maka akan tiba tanggal 30 November di Lokasi tanjung batu. Alternatif pengiriman lebih cepat jika via darat Jakarta – Riau – Tanjung Batu
4. Memberikan instruksi kepada Kontraktor bahwa Semua material dan bahan terkait pelaksanaan pekerjaan rusun untuk dikirim dan disediakan di proyek sehingga dapat langsung dipasang mengingat waktu pelaksanaan yang semakin sempit



Gambar 3. 16. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Rusun Kejaksaan Tinggi Riau

3.2.11 Unit Rumah Swadaya Melalui Peningkatan Kualitas di Perumahan Perkotaan

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III melaksanakan kegiatan Rumah Swadaya (BSPS) melalui peningkatan kualitas pada tahun 2025 di Delineasi Perkotaan yang mencakup wilayah Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau dengan target sebanyak 248 unit. Kinerja pelaksanaan bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya diukur dengan menilai persentase dari perbandingan realisasi pembangunan rumah swadaya terhadap target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja pada tahun bersangkutan. Secara umum pengukuran terhadap persentase capaian kinerja kegiatan BSPS di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah unit rumah swadaya yang dibangun}}{\text{Jumlah unit usulan rumah swadaya}} \times 100$$

Tabel 3. 24. Tabel Capaian kegiatan BSPS BP3KP Sumatera III TA 2025 di Delineasi Perkotaan

Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Delineasi Perkotaan				
No	Provinsi	Target (unit)	Realisasi (unit)	Capaian (%)
1	Sumatera Barat	191	190	99,5
2	Riau	57	57	100
Total		248	247	99,6

Capaian kinerja BSPS yang dilaksanakan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III pada tahun 2025 di delineasi perkotaan yaitu 247 unit atau 99,6% dari total target 248 unit. Kegiatan BSPS di Perumahan Perkotaan pada Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan di Kota Solok sebanyak 23 unit dan Kota Padang sebanyak 167 unit. Kegiatan BSPS di Perumahan Perkotaan pada Provinsi Riau dilaksanakan di Kota Dumai sebanyak 10 unit dan Kota Pekanbaru sebanyak 47 unit.

Tabel 3. 25. Rincian pelaksanaan kegiatan BSPS Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III TA 2025 Delineasi Perkotaan

No	Kabupaten/Kota	Target (unit)	Realisasi (unit)
Provinsi Sumatera Barat		248	247
A	Kota Padang	168	167
1	Kecamatan Koto Tangah	32	32
2	Kecamatan Kuranji	55	54
3	Kecamatan Lubuk Begalung	11	11
4	Kecamatan Padang Selatan	12	12
5	Kecamatan Padang Timur	11	11
6	Kecamatan Padang Utara	18	18
7	Kecamatan Pauh	20	20
8	Kecamatan Lubuk Kilangan	9	9
B	Kota Solok	23	23
9	Kecamatan Sikarah	17	17
10	Kecamatan Tanjung Harapan	6	6
Provinsi Riau		57	57
A	Kota Dumai	10	10
1	Kecamatan Dumai Barat	10	10
B	Kota Pekanbaru	47	47
2	Kecamatan Tenayan Raya	8	8
3	Kecamatan Kulim	16	16

No	Kabupaten/Kota	Target (unit)	Realisasi (unit)
4	Kecamatan Bukit Raya	2	2
5	Kecamatan Rumbai	4	4
6	Kecamatan Rumbai Timur	17	17

A. Pelaksanaan Fisik BPS

BP3KP Sumatera III melalui Satker PKP Provinsi Sumatera Barat dan Satker Provinsi Riau memastikan pelaksanaan fisik BPS TA 2025 pada delineaasi perkotaan terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

1. Pelaksanaan BPS di Kota Padang



Gambar 3. 17. Proses Pelaksanaan BPS di Kota Padang

2. Pelaksanaan BPS di Kota Solok



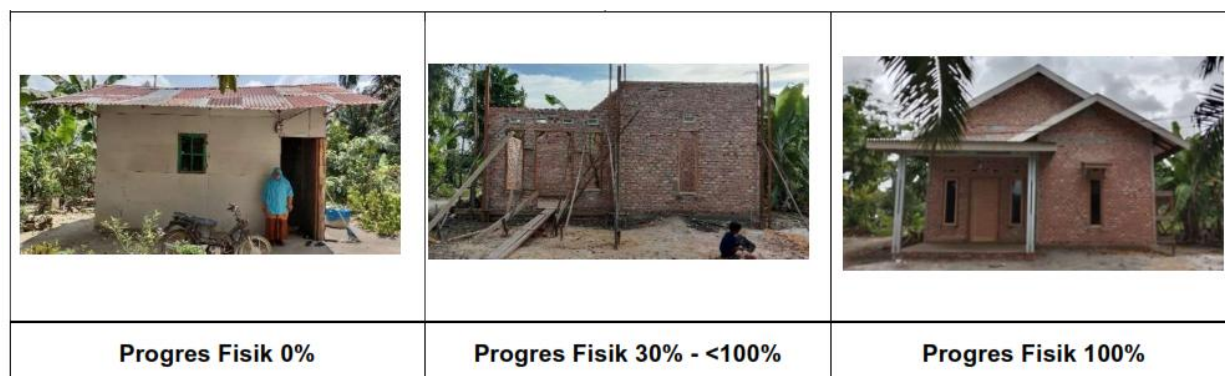
Gambar 3. 18. Proses Pelaksanaan BPS di Kota Solok

3. Pelaksanaan BPS di Kota Dumai



Gambar 3. 19. Proses Pelaksanaan BPS di Kota Dumai

4. Pelaksanaan BPS di Kota Pekanbaru



Gambar 3. 20. Proses Pelaksanaan BSPS di Kota Pekanbaru

B. Permasalahan dan Tindak Lanjut Pelaksanaan BSPS di Delienasi Perkotaan

Beberapa kendala/masalah yang ditemukan selama pelaksanaan BSPS TA 2025 pada delienasi perkotaan di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau, yaitu:

Tabel 3. 26. Tabel Permasalahan Pelaksanaan BSPS di Delineasi Perkotaan

No	Permasalahan	Tindak Lanjut
A	Tahap Perencanaan	
1	Ditemukan Calon Penerima Bantuan (CPB) yang tidak layak sesuai aturan program BSPS	Untuk yang tidak layak sesuai dengan aturan program, tetap disampaikan ke pemangku kepentingan yang ada termasuk pihak pengusul karena kegiatan ini adalah aspirasi dewan. Selanjutnya pengusul/aspirasi mencari pengganti, kemudian fasilitator melakukan proses verifikasi ke CPB yang bersangkutan sesuai aturan yang ada sebelum dibuatkan Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Verifikasi CPB
2	Ditemukan CPB sudah meninggal dunia pada saat proses verifikasi dilakukan di lapangan	Untuk CPB yang sudah meninggal dunia, secara persyaratan bisa dialihkan ke ahli waris yang sudah punya KTP dengan ketentuan rumah tersebut layak sesuai aturan program. Kemudian sebagai dokumen pendukung, pemerintah setempat wajib mengeluarkan surat keterangan kematian untuk CPB yang sudah meninggal dunia
3	Ditemukan CPB yang tidak berada di lokasi atau sedang berada di luar kota	Untuk CPB yang tidak berada di lokasi pada saat proses verifikasi, maka bisa diwakilkan oleh saudaranya dengan memegang surat kuasa dari CPB, namun dengan ketentuan rumah dan CPB tersebut layak sesuai dengan aturan program. Selanjutnya pada saat pelaksanaan, CPB diwajibkan untuk berada di lokasi kegiatan, jikalau tidak bisa berarti dia tidak layak karena itu bukan kebutuhan dari CPB tersebut
4	Ditemukan CPB yang tidak memiliki rumah atau menumpang di tempat saudaranya	Untuk CPB yang tidak punya rumah dan masih menumpang di rumah saudara atau orang lain tentu tidak layak sesuai aturan program, karena salah satu syarat CPB layak adalah yang memiliki rumah satu-satunya yang sedang ditempati dan dalam kondisi tidak layak huni
5	Ditemukan CPB berselisih dengan saudaranya dan sampai ke pengadilan karena persoalan kepemilikan tanah untuk rencana rumah	Untuk syarat menjadi CPB lainnya adalah rumah satu-satunya yang sedang ditempati dan dalam kondisi tidak layak huni dan itu harus berdiri di atas tanah yang tidak bersengketa atau legal secara kepemilikan.

No	Permasalahan	Tindak Lanjut
6	Ditemukan rumah CPB yang tidak layak untuk direhab melainkan harus dibongkar dan dibangun baru kembali, sementara kegiatan ini terkait PKRS bukan PBR	<p>Untuk kasus rumah CPB yang tidak layak lagi untuk direhab melainkan harus dibongkar dan dibangun baru kembali di tempat yang sama. Hal ini masih bisa ditindaklanjuti dengan mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pastikan Rencana Teknis dan RAB ada dan sesuai dengan kemampuan dana yang ada, terutama pembiayaan yang berasal dari aspek swadaya penerima bantuan 2. Pastikan komitmen PB untuk bisa menyelesaikan rumah sesuai waktu ayng telah ditentukan berdasarkan RKT 3. Libatkan pemerintah atau pemangku kepentingan setempat untuk ikut bersama mengawal dan bertanggung jawab terhadap penyelesaian rumah tersebut
B	Tahap Pelaksanaan	
1	Terlambatnya pendistribusian bahan bangunan atau material oleh toko bahan bangunan sehingga masih ada beberapa penerima abntuan yang stagnan di lapangan	Fasilitator telah melakukan monitoring dan kontrol yang lebih kontiniu sehingga apabila ditemukan permasalahan tersebut maka secepatnya difasilitasi penyelesaiannya sehingga tidak berlarut terlalu lama.
2	Sulit mendapatkan tukang sesuai kebutuhan rumah yang sedang dibangun di beberapa lokasi, seingga kebanyakan satu tukang untuk menindaklanjuti beberapa rumah PB yang sedang dikerjakan	Sebelum masuk ke tahap pelaksanaan atau masih di tahap persiapan, masyarakat dipastikan setiap CPB memiliki tukang untuk melaksanakan rumahnya termasuk ketersediaan dana untuk upah tukang. Apabila saat pelaksanaan ditemukan kasus seperti hal tersebut, maka difasilitasi PB yang bersangkutan untuk mencari tukang yang lain dari luar lokasi kegiatan dengan ketentuan PB memiliki dana untuk upah untuk tukang tersebut.
3	Pelaksanaan kegiatan BPS yang bersamaan dengan kegiatan yang dibiayai oleh dinas-dinas di kabupaten/kota yang bersangkutan sehingga menambah sulitnya mendapatkan material	Sesuai dengan surat perjanjian kontrak antara kedua belah pihak, KPB bersama dengan fasilitator memfasilitasi toko penyedia bahan bangunan untuk tetap komit dengan perjanjian kerjasama termasuk memfasilitasi toko tersebut untuk merealisasikan material sesuai kebutuhan yang da dari manapun dengan ketentuan legal untuk digunakan
4	Cuaca yang sering turun hujan sehingga mengakibatkan muka air sungai mengakibatkan muka air sungai dan mengakibatkan toko penyedia bahan bangunan kesulitan mendapatkan material lokal seperti Pasir, Kerikil, Batako, dan Kayu. Terkait dengan hal tersebut, kondisi jalan penghubung yang relatif rusak dengan kondisi PB yang menyebar	Difasilitasi toko bahan bangunan agar tetap melakukan supply material ke PB yang masih bisa untuk dilakukan, bahan pabrikasi maupun yang non pabrikasi. Koordinasi dengan pemangku kepentingan agar penanganan permasalahan ini dapat ditanggulangi secara bersama terutama yang kesulitan.
5	Pada saat pelaksanaan kegiatan yang mengundurkan diri sebagai penerima bantuan setelah yang bersangkutan di SK kan oleh PP karena berbagai alasan dan pertimbangan.	Tidak ada lagi waktu untuk mengganti penerima bantuan karena kegiatan ini berlangsung di akhir tahun sehingga tidak memungkinkan lagi untuk diselesaikan. Karena tidak memungkinkan lagi untuk melakukan proses penggantian penerima bantuan sesuai mekanisme yang ada, maka PPK sebagai penanggungjawab kegiatan memutuskan untuk

No	Permasalahan	Tindak Lanjut
	Penerima bantuan tidak mau lagi mematuhi dan mengikuti aturan program sehingga yang bersangkutan tidak layak lagi untuk dilanjutkan sebagai penerima bantuan.	mengembalikan lagi ke kas negara karena tidak terserap menjadi kegiatan.

3.2.12 Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan

Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan pada tahun 2025 sebanyak 1 Kegiatan dengan persentase capaian 100% terhadap target Perjanjian Kinerja tahun 2025.

Tabel 3. 27. Laporan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan TA 2025

Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan TA 2025		
Target	Realisasi	Capaian (%)
1	1	100

Tabel 3. 28. Capaian Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan TA 2025

Capaian Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan TA 2025	
Kegiatan	Uraian Kegiatan
Rapat Sinkronisasi Program dan Konsolidasi Pendataan Perumahan I di Wilayah BP3KP Sumatera III	<p>Sinkronisasi dan Konsolidasi Pendataan Perumahan di Wilayah BP3KP Sumatera III merupakan kegiatan strategis yang dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera III dalam rangka mendukung pencapaian Program Tiga Juta Rumah sesuai dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan program dan kegiatan perumahan antara pemerintah pusat dan daerah, serta memperkuat kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan di bidang perumahan. Melalui kegiatan ini, BP3KP Sumatera III melakukan evaluasi dan konsolidasi pendataan pembangunan serta renovasi rumah di wilayah delineasi kawasan perkotaan, perdesaan, dan pesisir di Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Tata Kelola Perumahan Rakyat (TKPR), Pusat Data dan Informasi Kementerian PKP, serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dari 38 kabupaten/kota di wilayah kerja BP3KP Sumatera III.</p> <p>Maksud dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah untuk melakukan sinkronisasi dan konsolidasi pendataan pembangunan perumahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di wilayah kerja BP3KP Sumatera III.</p> <p>Tujuan dari kegiatan Sinkronisasi dan Konsolidasi Pendataan Perumahan ini adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyelaraskan data dan program pembangunan perumahan antara pusat dan daerah agar tercipta keseragaman informasi. • Memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan bidang perumahan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. • Mengidentifikasi capaian pembangunan dan renovasi rumah di kawasan perkotaan, perdesaan, dan pesisir wilayah Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. • Menyediakan basis data yang akurat dan mutakhir sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan program perumahan.

Capaian Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan TA 2025

- Mendukung pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah melalui peningkatan kualitas pendataan dan pelaporan kegiatan perumahan.



Rapat Sinkronisasi Program dan Konsolidasi Pendataan Perumahan II di Wilayah BP3KP Sumatera III merupakan kegiatan strategis yang diselenggarakan dalam rangka mendukung pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang menjadi prioritas nasional Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Kegiatan ini difokuskan pada penguatan sinkronisasi kebijakan serta pemutakhiran dan validasi data perumahan sebagai dasar perencanaan pembangunan perumahan yang tepat sasaran.

Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, meliputi unsur Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau, sektor swasta, Forum CSR, serta filantropi publik melalui BAZNAS Kabupaten/Kota. Keterlibatan multipihak tersebut mencerminkan pendekatan kolaboratif dalam mendukung penyediaan perumahan yang berkelanjutan. Secara konseptual, kegiatan ini dirancang sebagai forum koordinasi lanjutan (Pendataan Perumahan II) untuk menyelaraskan data realisasi dan usulan program perumahan, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta mendukung perencanaan dan penganggaran program perumahan yang lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan di wilayah BP3KP Sumatera III.

Program Rumah Swadaya melalui BSPS tetap menjadi instrumen utama peningkatan keswadayaan masyarakat berpenghasilan rendah melalui kegiatan PKRS dan PBRs. Penetapan lokasi dilakukan secara berjenjang melalui sistem informasi bantuan perumahan dengan tahapan identifikasi kebutuhan perbaikan rumah yang mencakup kondisi kerusakan, pemanfaatan material eksisting, dan tingkat keswadayaan. Pelaksanaan BPS TA 2025 masih menghadapi kendala berupa dampak bencana alam, keterbatasan material dan distribusi, keterbatasan SDM tukang dan pendamping, serta kendala administrasi dan sistem, sehingga diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor.

Kesimpulan hasil rapat Sinkronisasi Program dan Konsolidasi Pendataan Perumahan II di Wilayah BP3KP Sumatera III pelaksanaan program perumahan dalam rangka mendukung Program 3 Juta Rumah telah berjalan melalui berbagai instrumen, antara lain Program Rumah Swadaya (BSPS), penanganan perumahan dan permukiman kumuh, peningkatan kualitas sanitasi, pembangunan rumah susun dan rumah khusus, serta penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU). Dukungan pembiayaan perumahan, inovasi konstruksi, serta kolaborasi dengan BAZNAS dan sektor swasta turut memperkuat upaya penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah kerja BP3KP Sumatera III.

Namun demikian, hasil diskusi menunjukkan bahwa pelaksanaan program masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti dampak bencana alam, keterbatasan material dan distribusi, keterbatasan sumber daya manusia, kendala administrasi dan sistem pendataan, serta belum optimalnya keselarasan regulasi daerah, khususnya terkait pembebasan Retribusi PBG dan BPHTB. Perbedaan

Rapat Sinkronisasi Program dan Konsolidasi Pendataan Perumahan II di Wilayah BP3KP Sumatera III

Capaian Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan TA 2025

muatan kebijakan di tingkat daerah berpotensi menimbulkan hambatan dalam implementasi dan membutuhkan upaya harmonisasi agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan seragam.

Ke depan, pencapaian target perumahan pada Tahun Anggaran 2026 memerlukan penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, pemutakhiran data yang terintegrasi melalui sistem informasi perumahan, serta optimalisasi pemanfaatan skema pembiayaan dan kolaborasi multipihak. Dengan langkah tersebut, diharapkan penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat dilaksanakan secara tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian Program 3 Juta Rumah.



3.2.13 Jumlah laporan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan

Jumlah laporan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan pada tahun 2025 sebanyak 3 laporan dengan persentase capaian 100% terhadap target Perjanjian Kinerja tahun 2025.

Tabel 3. 29. Laporan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan TA 2025

Jumlah laporan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan		
Target	Realisasi	Capaian (%)
3	3	100

Tabel 3. 30. Capaian Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan TA 2025

Capaian Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan TA 2025	
Kegiatan	Uraian Kegiatan
Monitoring dan Evaluasi Hunian Tetap di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar	Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, telah teridentifikasi progres pembangunan hunian tetap beserta beberapa catatan teknis di lapangan yang memerlukan tindak lanjut segera oleh penyedia jasa dan satuan kerja terkait. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar direkomendasikan untuk mempercepat penyediaan fasilitas umum dan sosial pendukung di sekitar lokasi hunian tetap guna mendukung kelayakan huni kawasan. Selain itu, satuan kerja penyediaan perumahan direkomendasikan untuk menindaklanjuti seluruh temuan hasil monitoring fisik hunian tetap dan memastikan seluruh perbaikan telah dilaksanakan secara menyeluruh sebelum proses serah terima kepada penerima manfaat.

Capaian Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan TA 2025

Rapat evaluasi program kegiatan pembangunan perumahan di Provinsi Sumatera Barat



Kegiatan ini dilaksanakan di Auditorium Gubernur Provinsi Sumatera Barat pada Hari Jumat, 26 September 2025. Acara ini dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat (Mahyeldi Anshaarullah), Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan (Imran), Kepala Balai Sumatera III (Yenny Sofyan Mora), serta pejabat pemerintah daerah, pejabat Dinas PUPR Daerah, dan pejabat struktural Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kegiatan ini berisikan pemaparan evaluasi progres pembangunan baru/renobasi rumah MBR bersumber dari APBD daerah dari Gubernur, dilanjutkan dengan sosialisasi peraturan Menteri PKP no 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus oleh Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan. Kemudian acara dilanjutkan dengan sharing session tentang Permen PKP no 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus dan Tata Cara Usulan Bantuan Perumahan Melalui Sistem Informasi Kementerian PKP.



3.2.14 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan

Penyusunan Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III pada tahun 2025 menjadi target kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III sebanyak 3 laporan.

Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan pada tahun 2025 sebanyak 3 laporan dengan persentase capaian 100% terhadap target Perjanjian Kinerja tahun 2025.

Tabel 3. 31. Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan

Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan		
Target	Realisasi	Capaian (%)
3	3	100

Tabel 3. 32. Capaian Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan

Capaian Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	
Kegiatan	Uraian Kegiatan
Sosialisasi BSPS	<p>Telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2025 kepada Calon Penerima Bantuan (CPB) di dua lokasi, yaitu Nagari Tanjung Baringin dan Nagari Aia Manggih Utara. Di Nagari Tanjung Baringin Kec. Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman. Dalam sosialisasi ini disampaikan mekanisme pelaksanaan BSPS sebagaimana tertuang di dalam SE Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PUPR No. 04 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan BSPS.</p> <p>Nagari Tanjung Baringin, kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh 14 Calon Penerima Bantuan yang dihadiri juga oleh Wali Nagari, Perwakilan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Pasaman, Kasi Kesra Camat Lubuk Sikaping, Babinsa dan Ketua LKAM. Sementara di Nagari Aia Manggih Utara, sosialisasi diikuti oleh 20 Calon Penerima bantuan dan dihadiri oleh Bapak Camat Lubuk Sikaping, Wali Nagari, Ketua Bamus dan serta perwakilan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasaman. Turut serta didampingi oleh Koordinator Kabupaten dan Tenaga Fasilitator Teknik serta Pemberdayaan untuk wilayah Kabupaten Pasaman. Materi mekanisme pelaksanaan BSPS disampaikan kepada seluruh CPB mulai dari tahapan, besar bantuan, proses penentuan toko, pelaksanaan fisk sampai pada pelaporan dan telah dilakukan diskusi serta tanya jawab yang interaktif dengan seluruh CPB. Dalam kegiatan tersebut disampaikan bahwa proses renovasi rumah diharapkan dapat diselesaikan paling lambat pada bulan Desember 2025. Oleh karena itu, ditekankan pentingnya kerja sama antara CPB dengan Koordinator Kabupaten (Korkab) dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) agar seluruh tahapan pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai jadwal. Selain itu, Ibu Henny juga menyampaikan pentingnya komitmen dan kesediaan CPB untuk mengikuti seluruh aturan dan ketentuan dalam pelaksanaan program BSPS, guna menghindari terjadinya pelanggaran administratif maupun teknis. Kegiatan berlangsung dengan lancar dan mendapat respon positif dari para CPB serta pihak nagari. Diharapkan hasil sosialisasi ini dapat memperkuat pemahaman dan kesiapan CPB dalam melaksanakan program BSPS secara tertib dan tepat waktu.</p>
Kegiatan Pemilihan Toko Terbuka	 <p>Kegiatan Pemilihan Toko Terbuka (PTT) dilaksanakan sebagai bagian dari tahapan pengadaan bahan bangunan dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dengan mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, keadilan dan non-diskriminasi, partisipasi masyarakat,</p>

Capaian Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan

kesesuaian harga dan mutu, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis BPS tahun berjalan.

Kegiatan diawali dengan sosialisasi singkat mengenai alur pelaksanaan Pemilihan Toko Terbuka kepada seluruh peserta kegiatan. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sama kepada Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dan para pemilik toko terkait mekanisme, persyaratan, serta prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan PTT. Selanjutnya, pemilik toko yang menerima undangan dan menyatakan kesediaannya untuk mengikuti kegiatan menyerahkan kelengkapan data administrasi kepada Kelompok Penerima Bantuan.

Kelengkapan data yang disampaikan oleh para pemilik toko dilakukan pengecekan dan verifikasi awal dengan pendampingan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL). Setelah proses verifikasi, Anggota Kelompok Penerima Bantuan melakukan konfirmasi terhadap pemenuhan persyaratan administrasi, dilanjutkan dengan pembacaan penawaran harga yang diajukan oleh masing-masing toko. Proses ini dilaksanakan secara terbuka dan partisipatif, sehingga seluruh penerima bantuan dapat mengetahui dan menilai penawaran harga serta spesifikasi material yang ditawarkan.



Monitoring dan Evaluasi BPS

Kegiatan Monitoring Pelaksanaan BPS di wilayah kerja BP3KP Sumatera III dilaksanakan untuk meninjau secara langsung kelengkapan proposal serta memastikan bahwa seluruh tahapan kegiatan berjalan sesuai ketentuan. Pemeriksaan proposal menjadi fokus utama, di mana proposal terdiri atas dokumen administrasi dan dokumen teknis. Dokumen administrasi berfungsi menunjukkan bahwa seseorang memenuhi syarat sebagai Calon Penerima Bantuan (CPB), sedangkan dokumen teknis mencakup isian format penilaian kualitas rumah, rencana teknis pekerjaan, dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Secara umum, hasil Monev di wilayah kerja BP3KP Sumatera III menunjukkan bahwa seluruh penerima bantuan layak untuk mendapatkan intervensi perbaikan rumah melalui program BPS. Diharapkan melalui pelaksanaan program ini, masyarakat penerima manfaat dapat memperoleh hunian yang lebih layak, sehat, dan mendukung peningkatan kualitas hidup keluarga.

Pemeriksaan juga dilakukan terhadap toko atau penyedia bahan bangunan, termasuk pengecekan kelancaran proses pemilihan toko terbuka yang dilaksanakan oleh Penerima Bantuan. Tim memastikan bahwa tahapan pemilihan penyedia berjalan sesuai prosedur, transparan, serta tidak terdapat intervensi pihak tertentu. Selain itu, dilakukan penelusuran terkait potensi praktik pungutan liar (pungli) pada saat pemesanan maupun pengiriman material. Berdasarkan hasil wawancara, seluruh pihak yang ditemui menyampaikan bahwa proses berjalan aman, tertib, dan tidak terdapat pungutan liar dalam bentuk apa pun. Laporan pengiriman material juga telah disampaikan oleh penyedia sesuai ketentuan Format, sehingga dapat dipastikan bahwa distribusi bahan bangunan berlangsung sesuai aturan.

Capaian Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan



Inti dari paparan progress masing-masing kota / kabupaten:

- Distribusi bahan tahap I sudah dilakukan, hanya saja untuk tahap II belum dapat dilakukan karena kondisi cuaca, jalan putus dan keterlambatan pasokan pasir kayu-batako-material pabrikaan, keterbatasan armada dan stok toko, serta kesulitan ketersediaan tukang.
- Untuk daerah yang terputus, Membuat laporan kronologis kejadian. Menyusun berita acara keterlambatan. Mengajukan permohonan perpanjangan waktu. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Nagari dan PPK. Menyusun rencana percepatan pekerjaan. Melakukan dokumentasi dan pelaporan secara berkala.



Rapat Evaluasi Akhir Kinerja Korkab / Korkot dan TFL Pelaksana Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Provinsi Sumatera Barat



3.2.15 Jumlah rumah khusus yang terbangun di Perumahan Perdesaan

Rumah khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus. Penyediaan rumah khusus adalah pembangunan rumah khusus yang berbentuk rumah tunggal dan rumah deret dengan tipologi berupa rumah tapak atau rumah panggung beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Penerima manfaat penyediaan rumah khusus merupakan perorangan maupun kelompok masyarakat yang memenuhi kriteria untuk menghuni rumah khusus, yaitu petugas / masyarakat di wilayah perbatasan negara, lokasi terpencar di pulau terluar, daerah terpencil, dan daerah tertinggal, masyarakat korban bencana serta masyarakat yang terkena dampak program pembangunan Pemerintah Pusat atau kebutuhan khusus lainnya.

Kinerja pelaksanaan penyediaan rumah khusus diukur dengan menilai persentase dari perbandingan realisasi pembangunan rumah khusus terhadap target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja pada tahun bersangkutan. Secara umum pengukuran terhadap persentase capaian kinerja penyediaan rumah khusus di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah unit rumah khusus yang dibangun atau dipelihara}}{\text{Jumlah unit usulan rumah khusus yang dibangun atau dipelihara}} \times 100$$

Tabel 3. 33. Capaian pembangunan rumah khusus Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III TA 2025

Jumlah rumah khusus yang dibangun				
No	Lokasi Rumah Khusus	Target (unit)	Realisasi (unit)	Capaian (%)
1	Kabupaten Agam	80	80	100
2	Kabupaten Tanah Datar	60	60	100
Total		140	140	100

Pada tahun 2024, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III melaksanakan penyediaan rumah khusus dalam rangka menyediakan hunian tetap pasca bencana banjir bandang lahar dingin dan tanah longsor di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam.

Tabel 3. 34. Rincian pelaksanaan pembangunan rumah khusus Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III TA 2024

No	Rumah Khusus	Tahun Pelaksanaan	Tipe	Jumlah Unit	Sasaran Penerima
Provinsi Sumatera Barat					
1	Hunian Tetap Pascabencana banjir bandang lahar dingin dan tanah longsor Kabupaten Agam	2024	Single Unit	80	Masyarakat korban bencana
2	Hunian Tetap Pascabencana banjir bandang lahar dingin dan tanah longsor Kabupaten Tanah Datar	2024	Single Unit	60	Masyarakat korban bencana

Kendala dalam pelaksanaan penyediaan rumah khusus pada tahun 2024 dan perlu menjadi perhatian untuk perbaikan kinerja yang berkelanjutan, yaitu:

1. Keterlambatan pengiriman material.
2. Kurangnya tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan di setiap unit rumah khusus.

Upaya yang dilakukan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III dalam memenuhi pencapaian kinerja kegiatan rumah khusus, yaitu:

1. Melakukan koordinasi dengan pemilik toko material untuk segera mendatangkan material yang dibutuhkan.
2. Menambah tenaga kerja untuk percepatan progres penyelesaian unit rumah khusus.

3.2.16 Unit Rumah Swadaya Melalui Peningkatan Kualitas di Perumahan Perdesaan

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III melaksanakan kegiatan Rumah Swadaya (BSPS) melalui peningkatan kualitas pada tahun 2025 di Delineasi Perdesaan yang mencakup wilayah Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau dengan target sebanyak 897 unit. Kinerja pelaksanaan bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya diukur dengan menilai persentase dari perbandingan realisasi pembangunan rumah swadaya terhadap target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja pada tahun bersangkutan. Secara umum pengukuran terhadap persentase capaian kinerja kegiatan BSPS di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah unit rumah swadaya yang dibangun}}{\text{Jumlah unit usulan rumah swadaya}} \times 100$$

Tabel 3. 35. Tabel Capaian kegiatan BSPS BP3KP Sumatera III TA 2025 di Delineasi Perdesaan

Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Delineasi Perdesaan				
No	Provinsi	Target (unit)	Realisasi (unit)	Capaian (%)
1	Sumatera Barat	521	518	99,4
2	Riau	376	376	100
Total		897	894	99,7

Capaian kinerja BSPS yang dilaksanakan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III pada tahun 2025 di delineasi perdesaan yaitu 894 unit atau 99,7% dari total target 897 unit.

Tabel 3. 36. Rincian pelaksanaan kegiatan BSPS Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III TA 2025 Delineasi Perdesaan

No	Kabupaten/Kota	Target (unit)	Realisasi (unit)
Provinsi Sumatera Barat		521	518
A	Kabupaten Agam	17	17

No	Kabupaten/Kota	Target (unit)	Realisasi (unit)
1	Kecamatan Candung	4	4
2	Kecamatan Lubuk Basung	12	12
3	Kecamatan Palembang	1	1
B	Kabupaten Dhamasraya	50	50
4	Kecamatan Koto Baru	6	6
5	Kecamatan Koto Besar	10	10
6	Kecamatan Pulau Punjung	12	12
7	Kecamatan Sembilan Koto	4	4
8	Kecamatan Sitiung	18	18
C	Kabupaten Pasaman	46	46
9	Kecamatan Lubuk Sikaping	46	46
D	Kabupaten Solok Selatan	385	382
10	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh	63	68
11	Kecamatan Pauh Duo	35	35
12	Kecamatan Sangir	114	121
13	Kecamatan Sangir Balai Janggo	22	21
14	Kecamatan Sangir Batang Hari	56	46
15	Kecamatan Sangir Jujuan	20	20
16	Kecamatan Sungai Pagu	75	71
E	Kabupaten Tanah Datar	23	23
17	Kecamatan Lima Kaum	10	10
18	Kecamatan Sungai Tarab	13	13
Provinsi Riau		376	376
A	Kabupaten Pelalawan	20	20
1	Kecamatan Kampar	5	5
2	Kecamatan Kerinci	5	5
3	Kecamatan Pangkalan Lesung	5	5
4	Kecamatan Langgam	5	5
B	Kabupaten Siak	20	20
5	Kecamatan Koto Gasib	20	20
C	Kabupaten Rokan Hilir	30	30
6	Kecamatan Pujud	25	25
7	Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan	5	5

No	Kabupaten/Kota	Target (unit)	Realisasi (unit)
D	Kabupaten Indragiri Hilir	50	50
8	Kecamatan Batang Tuaka	11	11
9	Kecamatan Gaung	7	7
10	Kecamatan Kemuning	5	5
11	Kecamatan Keritang	9	9
12	Kecamatan Tembilahan Hulu	19	18
E	Kabupaten Indragiri Hulu	24	24
13	Kecamatan Kelayang	5	5
14	Kecamatan Rengat	5	5
15	Kecamatan Pasir Penyau	5	5
16	Kecamatan Lubuk Batu Jaya	5	5
17	Kecamatan Rakit Kulim	4	4
F	Kabupaten Kuantan Singingi	28	28
18	Kecamatan Logas Tanah Darat	5	5
19	Kecamatan Kuantan Tengah	10	10
20	Kecamatan Singingi	5	5
21	Kecamatan Kuantan Mudik	8	8
G	Kabupaten Kampar	194	194
22	Kecamatan Kampar	25	25
23	Kecamatan Kampa	19	19
24	Kecamatan Rumbio Jaya	18	18
25	Kecamatan Tambang	10	10
26	Kecamatan Siak Hulu	20	20
27	Kecamatan Gunung Sahilan	10	10
28	Kecamatan Kampar Kiri Hilir	10	10
29	Kecamatan Kampar Kiri Tengah	23	23
30	Kecamatan Salo	10	10
31	Kecamatan Koto Kampar Hulu	10	10
32	Kecamatan Tapung Hulu	25	25
33	Kecamatan Tapung	9	9
34	Kecamatan Bangkinang Kota	5	5
H	Kabupaten Rokan Hulu	10	10
35	Kecamatan Tambusai	19	19



Gambar 3. 22. Pelaksanaan BSPS di Provinsi Riau

B. Permasalahan dan Tindak Lanjut Pelaksanaan BSPS di Delienasi Perdesaan

Beberapa kendala/masalah yang ditemukan selama pelaksanaan BSPS TA 2025 pada delienasi perdesaan di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau, yaitu:

Tabel 3. 37. Tabel Permasalahan Pelaksanaan BSPS di Delineasi Perdesaan

No	Permasalahan	Tindak Lanjut
A	Tahap Perencanaan	
1	Ditemukan Calon Penerima Bantuan (CPB) yang tidak layak sesuai aturan program BSPS	Untuk yang tidak layak sesuai dengan aturan program, tetap disampaikan ke pemangku kepentingan yang ada termasuk pihak pengusul karena kegiatan ini adalah aspirasi dewan. Selanjutnya pengusul/aspirasi mencari pengganti, kemudian fasilitator melakukan proses verifikasi ke CPB

No	Permasalahan	Tindak Lanjut
		yang bersangkutan sesuai aturan yang ada sebelum dibuatkan Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Verifikasi CPB
2	Ditemukan CPB sudah meninggal dunia pada saat proses verifikasi dilakukan di lapangan	Untuk CPB yang sudah meninggal dunia, secara persyaratan bisa dialihkan ke ahli waris yang sudah punya KTP dengan ketentuan rumah tersebut layak sesuai aturan program. Kemudian sebagai dokumen pendukung, pemerintah setempat wajib mengeluarkan surat keterangan kematian untuk CPB yang sudah meninggal dunia
3	Ditemukan CPB yang tidak berada di lokasi atau sedang berada di luar kota	Untuk CPB yang tidak berada di lokasi pada saat proses verifikasi, maka bisa diwakilkan oleh saudaranya dengan memegang surat kuasa dari CPB, namun dengan ketentuan rumah dan CPB tersebut layak sesuai dengan aturan program. Selanjutnya pada saat pelaksanaan, CPB diwajibkan untuk berada di lokasi kegiatan, jikalau tidak bisa berarti dia tidak layak karena itu bukan kebutuhan dari CPB tersebut
4	Ditemukan CPB yang tidak memiliki rumah atau menumpang di tempat saudaranya	Untuk CPB yang tidak punya rumah dan masih menumpang di rumah saudara atau orang lain tentu tidak layak sesuai aturan program, karena salah satu syarat CPB layak adalah yang memiliki rumah satu-satunya yang sedang ditempati dan dalam kondisi tidak layak huni
5	Ditemukan CPB berselisih dengan saudaranya dan sampai ke pengadilan karena persoalan kepemilikan tanah untuk rencana rumah	Untuk syarat menjadi CPB lainnya adalah rumah satu-satunya yang sedang ditempati dan dalam kondisi tidak layak huni dan itu harus berdiri di atas tanah yang tidak bersengketa atau legal secara kepemilikan.
6	Ditemukan rumah CPB yang tidak layak untuk direhab melainkan harus dibongkar dan dibangun baru kembali, sementara kegiatan ini terkait PKRS bukan PBR	Untuk kasus rumah CPB yang tidak layak lagi untuk direhab melainkan harus dibongkar dan dibangun baru kembali di tempat yang sama. Hal ini masih bisa ditindaklanjuti dengan mempertimbangkan beberapa hal, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pastikan Rencana Teknis dan RAB ada dan sesuai dengan kemampuan dana yang ada, terutama pembiayaan yang berasal dari aspek swadaya penerima bantuan 2. Pastikan komitmen PB untuk bisa menyelesaikan rumah sesuai waktu yang telah ditentukan berdasarkan RKTL 3. Libatkan pemerintah atau pemangku kepentingan setempat untuk ikut bersama mengawal dan bertanggung jawab terhadap penyelesaian rumah tersebut
B	Tahap Pelaksanaan	
1	Terlambatnya pendistribusian bahan bangunan atau material oleh toko bahan bangunan sehingga masih ada beberapa penerima bantuan yang stagnan di lapangan	Fasilitator telah melakukan monitoring dan kontrol yang lebih kontiniu sehingga apabila ditemukan permasalahan tersebut maka secepatnya difasilitasi penyelesaiannya sehingga tidak berlarut terlalu lama.
2	Sulit mendapatkan tukang sesuai kebutuhan rumah yang sedang dibangun di beberapa lokasi, sehingga kebanyakan satu tukang	Sebelum masuk ke tahap pelaksanaan atau masih di tahap persiapan, masyarakat dipastikan setiap CPB memiliki tukang untuk melaksanakan rumahnya termasuk ketersediaan dana untuk upah tukang. Apabila saat pelaksanaan ditemukan kasus seperti hal tersebut, maka

No	Permasalahan	Tindak Lanjut
	untuk menindaklanjuti beberapa rumah PB yang sedang dikerjakan	difasilitasi PB yang bersangkutan untuk mencari tukang yang lain dari luar lokasi kegiatan dengan ketentuan PB memiliki dana untuk upah untuk tukang tersebut.
3	Pelaksanaan kegiatan BSPS yang bersamaan dengan kegiatan yang dibiayai oleh dinas-dinas di kabupaten/kota yang bersangkutan sehingga menambah sulitnya mendapatkan material	Sesuai dengan surat perjanjian kontrak antara kedua belah pihak, KPB bersama dengan fasilitator memfasilitasi toko penyedia bahan bangunan untuk tetap komit dengan perjanjian kerjasama termasuk memfasilitasi toko tersebut untuk merealisasikan material sesuai kebutuhan yang da dari manapun dengan ketentuan legal untuk digunakan
4	Cuaca yang sering turun hujan sehingga mengakibatkan muka air sungai mengakibatkan muka air sungai dan mengakibatkan toko penyedia bahan bangunan kesulitan mendapatkan material lokal seperti Pasir, Kerikil, Batako, dan Kayu. Terkait dengan hal tersebut, kondisi jalan penghubung yang relatif rusak dengan kondisi PB yang menyebar	Difasilitasi toko bahan bangunan agar tetap melakukan supply material ke PB yang masih bisa untuk dilakukan, bahan pabrikan maupun yang non pabrikan. Koordinasi dengan pemangku kepentingan agar penanganan permasalahan ini dapat ditanggulangi secara bersama terutama yang kesulitan.
5	Pada saat pelaksanaan kegiatan yang mengundurkan diri sebagai penerima bantuan setelah yang bersangkutan di SK kan oleh PP karena berbagai alasan dan pertimbangan. Penerima bantuan tidak mau lagi mematuhi dan mengikuti aturan program sehingga yang bersangkutan tidak layak lagi untuk dilanjutkan sebagai penerima bantuan.	Tidak ada lagi waktu untuk mengganti penerima bantuan karena kegiatan ini berlangsung di akhir tahun sehingga tidak memungkinkan lagi untuk diselesaikan. Karena tidak memungkinkan lagi untuk melakukan proses penggantian penerima bantuan sesuai mekanisme yang ada, maka PPK sebagai penanggungjawab kegiatan memutuskan untuk mengembalikan lagi ke kas negara karena tidak terserap menjadi kegiatan.

3.2.17 Pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko dan dokumen Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas

Target prioritas pada tahun 2024/2025 ini adalah memastikan transisi kelembagaan tidak mengurangi kualitas layanan, melainkan justru meningkatkan efektivitas penyediaan hunian bagi masyarakat. Fokus pelaksanaan rencana kerja dibagi ke dalam enam area perubahan (Pokja) sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan Pada Pokja Manajemen Perubahan, rencana kerja difokuskan untuk memastikan transformasi pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) pegawai dapat beradaptasi dengan transisi kelembagaan menjadi Kementerian PKP. Kegiatan utama meliputi penyusunan rencana kerja ZI yang adaptif, serta pelaksanaan internalisasi nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK secara intensif kepada seluruh pegawai di balai maupun satuan kerja (Satker) di bawahnya. Selain itu, penguatan peran Agen

- Perubahan (Agent of Change) terus dilakukan agar mampu menjadi teladan (role model) integritas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
2. Penataan Tatalaksana Rencana kerja pada Pokja Penataan Tatalaksana tahun ini memprioritaskan evaluasi dan penyusunan ulang Standar Operasional Prosedur (SOP) agar selaras dengan struktur organisasi baru BP3KP Sumatera III. Upaya ini dibarengi dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi (e Office/SPBE) untuk mempercepat proses administrasi dan layanan perumahan. Tujuannya adalah memangkas birokrasi yang berbelit serta meningkatkan keterbukaan informasi publik agar masyarakat dapat mengakses prosedur layanan dengan mudah dan transparan.
Penataan Sistem Manajemen SDM Pokja
 3. Penataan Sistem Manajemen SDM pada tahun ini berfokus pada penataan peta jabatan dan analisis beban kerja yang sesuai dengan kebutuhan organisasi baru. Selain itu, pengembangan kompetensi pegawai menjadi prioritas utama, salah satunya melalui pengusulan pegawai untuk mengikuti Laporan Pembangunan Zona Integritas TA 2025 6 pelatihan sertifikasi Certified Risk Officer in Public Sector (CROP). Langkah ini diambil untuk mencetak SDM yang profesional dan mampu mengawal pelaksanaan Manajemen Risiko di lingkungan BP3KP Sumatera III secara efektif.
 4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja Dalam rangka mewujudkan birokrasi yang berorientasi hasil, Pokja Penguatan Akuntabilitas Kinerja memfokuskan kegiatannya pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) yang berkualitas dan tepat waktu. Selain itu, pengawalan ketat dilakukan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) berjenjang mulai dari pimpinan hingga staf. Hal ini dilakukan untuk memastikan setiap target kinerja individu berkontribusi langsung terhadap pencapaian target strategis penyediaan perumahan nasional.
 5. Penguatan Pengawasan Pokja Penguatan Pengawasan menitikberatkan rencana kerjanya pada upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan pengendalian gratifikasi. Kegiatan Public Campaign dilaksanakan secara lebih masif dan menyentuh masyarakat langsung, termasuk melalui kampanye "Gerakan Tolak Gratifikasi" di ruang publik dan media digital. Selain itu, sistem pengaduan masyarakat (Whistleblowing System) diperkuat untuk memastikan setiap laporan ditindaklanjuti secara transparan, guna menjaga integritas organisasi.
 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pada Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, fokus utama diarahkan pada pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala beserta tindak lanjut perbaikannya. Selain itu, peningkatan kualitas layanan informasi juga dilakukan melalui optimalisasi konten media sosial yang dikelola oleh BP3KP Sumatera III. Upaya ini bertujuan untuk menyajikan informasi program

perumahan yang akurat, edukatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah semakin meningkat.

Tabel 3. 38. Tabel Capaian Pembangunan Zona Integritas Tiap Area Perubahan

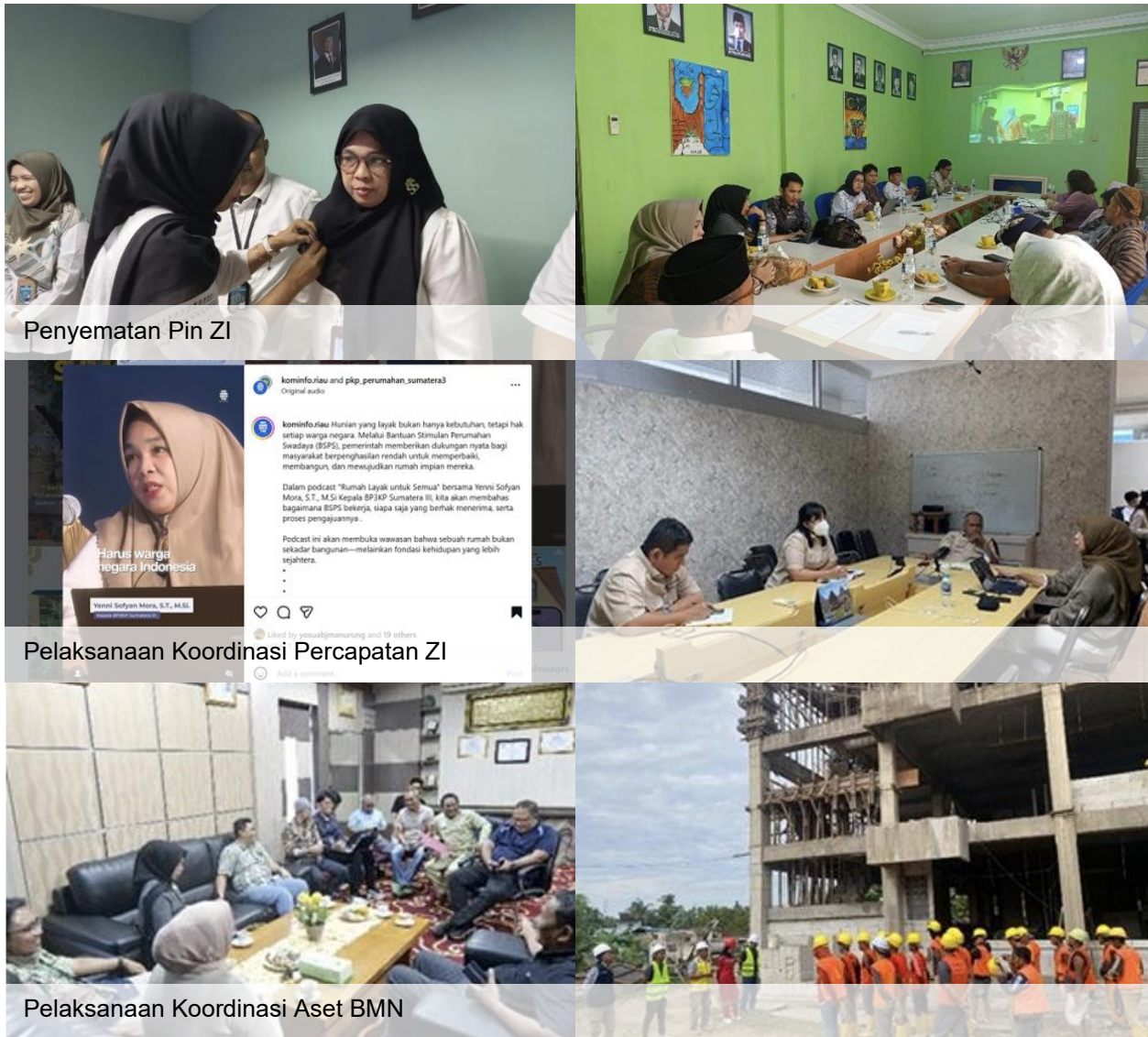
Capaian Pembangunan Zona Integritas Tiap Area Perubahan	
Kegiatan	Uraian Kegiatan
Pokja Manajemen Perubahan	PODCAST (Rapat Koordinasi dan Bincang Seru Berintegritas) Terlaksananya internalisasi budaya kerja melalui Morning Briefing rutin (Senin-Jumat) yang diisi dengan sharing session, games, dan senam sehat, serta Rapat Koordinasi mingguan untuk memastikan progres pembangunan di Sumatera III tetap terpantau.
	Penyematan PIN ZI, Menjadi simbol identitas "Agen Perubahan" bagi seluruh pegawai untuk menjaga marwah institusi.
Pokja Penata Tata Laksana	Studi Tiru ke Kemenag Kota Batam Melakukan benchmarking strategi manajemen perubahan dari instansi peraih predikat WBK untuk mematangkan strategi internal Balai.
	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pada tahun 2025 ini telah dilaksanakan reviu secara komprehensif terhadap seluruh SOP di lingkungan BP3KP Sumatera III.
	Peta Proses Bisnis Penyusunan peta proses bisnis yang selaras dengan tugas dan fungsi Balai sebagai ujung tombak pelaksanaan program perumahan di daerah, guna memastikan alur kerja antar unit maupun antar Satker berjalan secara terintegrasi.
	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam proses administrasi perkantoran (e-office)
	Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Penyediaan akses informasi yang transparan bagi pemangku kepentingan mengenai program perumahan melalui kanal digital resmi dan media informasi di kantor Balai maupun Satuan Kerja.
	Koordinasi Percepatan ZI/MR dengan Ditjen TKPR Penyelarasan roadmap pembangunan ZI dengan Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (TKPR) untuk memastikan tata laksana organisasi sesuai standar kementerian.
	Koordinasi Aset BMN (Karimun & Batam) Monitoring dan Evaluasi pada Satker Provinsi Sumatera Barat, Tim Pembangunan ZI melaksanakan kunjungan ke Satker Provinsi Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau dengan fokus utama pada pemetaan awal implementasi 6 Area Perubahan.
	Monitoring dan Evaluasi pada Satker Provinsi Sumatera Barat, Tim Pembangunan ZI Melaksanakan kunjungan ke Satker Provinsi Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau dengan fokus utama pada pemetaan awal implementasi 6 Area Perubahan.
	Rapat Rutin Tim Kerja ZI Monitoring berkala untuk memastikan progres pembangunan ZI tetap terjaga.
	Kebutuhan pegawai berupa peta dan analisis jabatan Telah tersusunnya perencanaan kebutuhan pegawai berupa peta dan analisis jabatan;
Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM	kegiatan pendidikan pelatihan (Diklat) dan sertifikasi CROP
	kegiatan pendidikan pelatihan (Diklat) dan sertifikasi manajemen risiko
	Penandatanganan SPK Pegawai PPPK (Jakarta)
	Evaluasi terhadap kinerja pegawai secara berkala
	Sosialisasi Manajemen Risiko/RCM

Capaian Pembangunan Zona Integritas Tiap Area Perubahan	
Pokja Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Monev Aset Rusun (Indragiri Hilir) Memastikan aset hasil pembangunan tepat mutu dan siap fungsi sebelum diserahkan, sebagai bentuk tanggung jawab kinerja kepada masyarakat.
	Monev BPS (Kabupaten Pelalawan) Verifikasi progres fisik pembangunan rumah swadaya untuk memastikan dana stimulan dikonversi menjadi hunian layak secara akuntabel.
	Koordinasi dengan Direktur Jenderal TKPR, direktorat KPTA (Kepatuhan Intern) Memastikan seluruh kinerja Balai memenuhi standar kepatuhan yang dipersyaratkan kementerian.
Pokja Penguatan Pengawasan	Sosialisasi Internal Gerakan Anti Gratifikasi: Dilakukan rutin melalui metode hybrid (Zoom & Luring).
	Sosialisasi Eksternal Anti Gratifikasi (Padang, Batam, Riau): Kampanye masif menolak gratifikasi kepada pegawai, Pemerintah Daerah, hingga mitra pengembang.
	Penandatanganan Pakta Integritas
	Edukasi Anti-Pungli pada Program BPS Mitigasi risiko penyimpangan dana bantuan di tingkat desa melalui pengawasan langsung di lapangan.
	Pengendalian Risiko K3 (Karimun)
Pokja Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	Sosialisasi dan Pengendalian Risiko Kota Dumai: Pelaksanaan kegiatan khusus di lokasi BPS Kota Dumai Pelaksanaan kegiatan khusus di lokasi BPS Kota Dumai yang meliputi Sosialisasi Anti-Gratifikasi kepada penerima bantuan dan pemasangan stiker Stiker Anti Gratifikasi di rumah-rumah warga sebagai sarana pengawasan partisipatif.
	Peningkatan Inovasi Pelayanan dan Sarana Prasarana Telah dilakukan peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima, seperti penyediaan ruang tunggu yang representatif, ruang bermain anak, serta ruang laktasi.
	Sosialisasi Pendataan Pembiayaan (Kota Batam) Memberikan kepastian layanan pendataan yang objektif dan bebas intervensi bagi mitra pengembang dan swasta.
	Sosialisasi Klinik PKP di CFD Pekanbaru Inovasi pelayanan publik (jemput bola) untuk memberikan konsultasi gratis dan kampanye ZI kepada masyarakat.
	Klinik PKP (Kantor/Mobile) Kanal konsultasi teknis perumahan bagi pemda dan masyarakat umum secara responsif.

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III pada tahun 2025, yaitu:

- a. Kuantitas SDM yang Terbatas: Jumlah pegawai belum ideal dibanding beban kerja dan luas wilayah cakupan (Riau, Sumbar, Kepri), sehingga terjadi perangkapan tugas (dual role) pada fungsi krusial Tim Pokja ZI.
- b. Belum Optimalnya Kapasitas Pegawai Baru (CPNS): Pegawai baru masih dalam masa orientasi/Latsar, sehingga kontribusi dalam pembangunan ZI belum maksimal karena keterbatasan kewenangan administratif dan waktu.

- c. Tekanan Target Progres Fisik yang Tinggi: Target percepatan pembangunan (Rusun dan BSPS) menuntut fokus utama di lapangan, sehingga manajemen waktu untuk agenda internalisasi ZI dan pemenuhan dokumen evidence menjadi tantangan.
- d. Dinamika Transisi Kelembagaan: Perubahan nomenklatur menjadi Kementerian PKP menuntut penyesuaian cepat terhadap regulasi, tata kerja, dan aplikasi sistem informasi (seperti SMART3 dan PA'CIK) pasca pemisahan kementerian.
- e. Tantangan Geografis Wilayah Sumatera III: Luasnya wilayah yang mencakup kepulauan (Kepri) dan pegunungan (Sumbar) menyulitkan standarisasi pengawasan dan pelayanan publik yang seragam secara real-time.
- f. Kompetensi Manajemen Risiko yang Perlu Peningkatan: Pemahaman mengenai penyusunan Risk Control Matrix (RCM) masih beragam; mitigasi risiko teknis bangunan perlu lebih berbasis data lapangan agar tidak sekadar menjadi formalitas dokumen.
- g. Kendala Administrasi Aset dengan Pihak Eksternal: Kesulitan koordinasi serah terima aset dengan Pemda/Yayasan yang berpotensi menimbulkan risiko hukum dan menghambat optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN).
- h. Konsistensi Budaya Kerja Berintegritas: Belum seragamnya semangat seluruh pegawai, di mana sebagian masih menganggap ZI sebagai pemenuhan dokumen administratif, bukan transformasi budaya kerja.
- i. Keterbatasan Anggaran Sarana Pelayanan: Anggaran terbatas untuk renovasi ruang pelayanan publik di tingkat Satker agar setara dengan standar operasional di kantor Balai.
- j. Beban Kerja dan Penugasan Ad-Hoc: Penugasan mendadak pada Proyek Strategis Nasional sering menyebabkan jadwal rapat koordinasi ZI dan audit internal mengalami penundaan.
- k. Fluktuasi Capaian Output Satker: Capaian fisik pada beberapa Satker terkendala faktor eksternal seperti cuaca, ketersediaan material, atau kendala sosial di lapangan yang menghambat target 100% tepat waktu.



Gambar 3. 23. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan kinerja pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko

3.2.18 Layanan perkantoran

Jumlah layanan perkantoran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III pada tahun 2025 sebanyak 4 layanan dengan persentase capaian 100% terhadap target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2025.

Tabel 3. 39. Capaian layanan perkantoran TA 2025

Jumlah layanan perkantoran		
Target	Realisasi	Capaian (%)
4 layanan	4 layanan	100

Pelaksanaan kegiatan layanan perkantoran dilakukan dengan maksud agar operasionalisasi perkantoran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III dapat berjalan dengan baik dengan menyediakan dukungan teknis dan dukungan operasional. Bentuk dukungan layanan perkantoran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III yaitu untuk kegiatan operasional dan

pemeliharaan kantor, honorarium PPNPN Substantif dan pegawai pendukung serta honorarium pengelola keuangan.

Dalam pelaksanaan pemberian layanan, terdapat pegawai non ASN yang diterima menjadi pegawai ASN menjadi isu pencapaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III sehingga perlu adanya penyesuaian dalam penyusunan program dan anggaran terkait honorarium pegawai. Namun, kendala tersebut dapat diatasi dengan segera melakukan koordinasi dan pelaporan kepada pusat terkait adanya perubahan jumlah pegawai sehingga pada tahun 2025, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III dapat memenuhi pencapaian kinerja pemberian layanan (sarana dan prasarana internal, dukungan manajemen satker serta layanan perkantoran).

3.3 Analisis Perbandingan Kinerja

3.3.1 Analisis Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya dan Beberapa Tahun Terakhir

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III melaksanakan program dan kegiatan tahun 2025 berdasarkan target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK). Perbandingan realisasi kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III dalam rentang periode tahun 2021-2024 yang masih memiliki nama BP2P Sumatera III dibawah Kementerian PUPR dan Tahun 2025 berubah menjadi BP3KP Sumatera III dibawah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menunjukkan persentase kinerja yang baik dan hampir seluruhnya memenuhi pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, dan terdapat juga kinerja yang melebihi target 100%. Terdapat penurunan kinerja sebesar 0,04 % yang dialami Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Jika dilakukan perbandingan kinerja periode 2021-2025, terdapat kinerja yang belum memenuhi target yang maksimal, yaitu pada indikator kinerja kegiatan jumlah bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya. Tidak tercapainya target maksimal tersebut disebabkan masih adanya kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan BSPS pada tahun 2021, 2022, 2023,2024, dan 2025.

1. Tahun 2021, terdapat 2.502 unit yang tidak tercapai dalam pelaksanaan BSPS (2.500 unit di Provinsi Sumatera Barat, 1 unit di Provinsi Kepulauan Riau). Realisasi di Provinsi Sumatera Barat relatif rendah disebabkan alokasi anggaran yang rendah karena terjadinya Pandemi COVID-19 dan anggaran BSPS yang bersumber dari NAHP yang tidak dapat diserap sehingga perlu dikembalikan kepada negara serta tidak tercapainya 1 unit di Provinsi Kepulauan Riau akibat calon penerima bantuan yang terdata pernah menerima bantuan pada tahun 2017.

2. Tahun 2022, terdapat 23 unit yang tidak tercapai dalam pelaksanaan BSPS (1 unit di Provinsi Kepulauan Riau, 22 unit di Provinsi Sumatera Barat). Tidak tercapainya 1 unit di Provinsi Kepulauan Riau terjadi karena pengunduran diri calon penerima bantuan akibat ketidakmampuan berswadaya, sedangkan di Provinsi Sumatera Barat tidak tercapai maksimal akibat calon penerima bantuan terdata pernah menerima bantuan pada tahun sebelumnya.
3. Tahun 2023, terdapat 36 unit yang tidak tercapai dalam pelaksanaan BSPS di Provinsi Sumatera Barat. Tidak tercapainya kegiatan ini secara maksimal dikarenakan pengunduran diri calon penerima bantuan karena ketidakmampuan berswadaya namun tidak dapat dilakukan pengganti karena tahun anggaran yang hampir berakhir. Terdapat juga masyarakat yang tidak mampu memenuhi dokumen persyaratan serta adanya permasalahan lahan.
4. Tahun 2024, terdapat 45 unit yang tidak tercapai dalam pelaksanaan BSPS di Provinsi Sumatera Barat (40 unit) dan Provinsi Riau (5 unit).
5. Tahun 2025, terdapat 4 unit yang tidak tercapai dalam pelaksanaan BSPS di Provinsi Sumatera Barat. Tidak tercapainya kegiatan ini secara maksimal karena adanya beberapa lokasi terdampak bencana hidrometeorologi yang terjadi di wilayah Sumatera Barat, seperti hujan dengan intensitas tinggi dan genangan, pelaksanaan pekerjaan sempat terhenti sementara guna menjaga keselamatan pelaksana dan penerima bantuan. Dan pengunduran diri calon penerima bantuan karena ketidakmampuan berswadaya namun tidak dapat dilakukan pengganti karena tahun anggaran yang hampir berakhir

Tabel 3. 40. Realisasi kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III tahun 2021-2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Satuan	2021-2025		PK 2021			PK 2022			PK 2023			PK 2024			PK 2025			
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan																			
1	Jumlah laporan penyusunan perencanaan penyediaan perumahan	laporan	22	22	6	6	100,00	7	7	100,00	6	6	100,00	3	3	100,00			
2	Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	unit	34.804	32.198	7.550	5.048	66,86	8.380	8.357	99,73	10.640	10.604	99,66	8.234	8.189	99,45			
3	Jumlah Rumah Susun yang dibangun	unit	1.124	1.124	459	459	100,00	212	212	100,00	371	371	100,00	85	85	100,00			
4	Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	tower	37	37	-	-	-	16	16	100,00	17	17	100,00	4	4	100,00			
5	Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	unit	267	297	25	25	100,00	2	2	100,00	100	100	100,00	140	140	100,00			
6	Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara	unit	75	75	-	-	-	-	-	-	75	75	100,00	-	-	-			
7	Jumlah Rumah umum yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU	unit	3.746	4.318	831	831	100,00	370	370	100,00	1.975	2.547	128,96	570	570	100,00			
8	Jumlah laporan pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko	laporan	5	5	-	-	-	-	-	-	2	2	100,00	3	3	100,00			
9	Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1													1	1	100

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Satuan	2021-2025		PK 2021			PK 2022			PK 2023			PK 2024			PK 2025		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
10	Jumlah dokumen Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	1											1	1	100	
11	Jumlah dokumen Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	Laporan	1	1											1	1	100	
12	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	2	2											2	2	100	
13	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Kegiatan	1	1											1	1	100	
14	Jumlah laporan kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	Laporan	1	1											1	1	100	
15	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan	Laporan	4	4											4	4	100	

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Satuan	2021-2025		PK 2021			PK 2022			PK 2023			PK 2024			PK 2025		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Penanganan Kumuh																		
16 Jumlah laporan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Laporan	4	4												4	4	100	
17 Jumlah laporan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Laporan	3	3												3	3	100	
18 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	Laporan	3	3												3	3	100	
19 Jumlah dokumen Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	Rekomendasi Kebijakan	1	1												1	1	100	
20 Jumlah dokumen Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	Rekomendasi Kebijakan	1	1												1	1	100	
21 Jumlah Komponen Rumah Untuk Mitigasi Bencana Perumahan Perdesaan	Unit	1	1												1	1	100	
22 Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas di	Unit	10	10												10	10	100	

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Satuan	2021-2025		PK 2021			PK 2022			PK 2023			PK 2024			PK 2025			
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Kawasan Permukiman																			
23 Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas di Perumahan Perkotaan	Unit	248	247														248	247	99,60
24 Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas di Perumahan Perdesaan	Unit	897	811														897	894	99,67
25 Jumlah rumah khusus yang terbangun di Perumahan Perdesaan	Unit	140	140														140	140	100
26 Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	Unit	102	102														102	102	100
27 Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu di Kawasan Permukiman	Hektar	103.72	103.72														103.72	103.72	100
Program Dukungan Manajemen																			
1	Jumlah layanan sarana dan prasarana internal	layanan	13	13	4	4	100,00	4	4	100,00	1	1	100,00	1	1	100,00			
2	Jumlah layanan dukungan manajemen satker	layanan	19	19	4	4	100,00	4	4	100,00	4	4	100,00	4	4	100,00			
3	Jumlah layanan perkantoran	layanan	19	19	3	3	100,00	4	4	100,00	4	4	100,00	4	4	100,00	4	4	100,00

3.3.2 Analisis Perbandingan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III dengan Target Jangka Menengah

Upaya pencapaian yang dilaksanakan setiap tahun merupakan bentuk komitmen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III dalam mencapai target lima tahun yang telah disusun dalam Rencana Strategis 2025-2029.

Tabel 3. 41. Perbandingan kinerja berdasarkan target Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III TA 2025

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Satuan	2025			
		Target Renstra & PK	Realisasi	Capaian (%)	
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan					
KEGIATAN: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi					
1	Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100
2	Jumlah dokumen Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100
3	Jumlah dokumen Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	Laporan	1	1	100
4	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	2	2	100
5	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Kegiatan	1	1	100
6	Jumlah laporan kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	Laporan	1	1	100
7	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	Laporan	4	4	100
8	Jumlah laporan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Laporan	4	4	100
9	Jumlah laporan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Laporan	3	3	100
10	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	Laporan	3	3	100

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Satuan	2025			
		Target Renstra & PK	Realisasi	Capaian (%)	
11	Jumlah dokumen Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100
12	Jumlah dokumen Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100
13	Jumlah Komponen Rumah Untuk Mitigasi Bencana Perumahan Perdesaan	Unit	0	0	0
KEGIATAN: Penyediaan Rumah Layak Huni					
1	Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas di Kawasan Permukiman	Unit	10	10	100
2	Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas di Perumahan Perkotaan	Unit	248	247	99,60
3	Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas di Perumahan Perdesaan	Unit	897	894	99,67
4	Jumlah rumah khusus yang terbangun di Perumahan Perdesaan	Unit	140	140	100
5	Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	Unit	102	101	100
6	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu di Kawasan Permukiman	Hektar	103.72	103.72	100
SK. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman					
1	Jumlah layanan perkantoran	layanan	4	4	100

Capaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III memiliki selisih perbandingan dengan target strategis yang ditetapkan dalam Rencana Strategis 2025-2029 TA 2025 tidak tercapai. Program yang tidak terealisasi ada program BPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya), di sebabkan beberapa lokasi terdampak bencana hidrometeorologi yang terjadi di wilayah Sumatera Barat, seperti hujan dengan intensitas tinggi dan genangan, pelaksanaan pekerjaan sempat terhenti sementara guna menjaga keselamatan pelaksana dan penerima bantuan.

3.3.3 Perbandingan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Tahun 2025 dengan Organisasi Sejenis yang Setara

Dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja serta sebagai upaya peningkatan kinerja pada waktu mendatang, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III melakukan perbandingan kinerja dengan capaian organisasi sejenis yang setara indikator kegiatannya. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sumatera V menjadi referensi perbandingan dalam mengevaluasi capaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III pada tahun 2025. Perbandingan tersebut dilakukan karena Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V berkontribusi terhadap pemenuhan sasaran kegiatan meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Keduanya juga memiliki kesamaan dari segi cakupan wilayah yang terdiri dari 3 (tiga) provinsi.

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Satuan	BP3KP Sumatera III			BP3KP Sumatera V			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Sekretariat Jenderal								
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen								
1	Tingkat Layanan Dukungan Manajemen	Layanan	4	4	100	4	4	100
Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman								
Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni								
1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	Laporan	1	1	100	1	1	100
2	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100	1	1	100
Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman								
1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	Laporan	4	4	100	4	4	100
Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu								

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Satuan	BP3KP Sumatera III			BP3KP Sumatera V		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1 Jumlah Luasan Penanganan Permukiman Kumuh	Hektar	103,72	103,72	100	0,2	0,2	100
Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah kawasan permukiman							
1 Jumlah Rumah Swadaya Kawasan Permukiman	Unit	10	10	100	1201	1201	100
Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan							
Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi Dalam Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan							
1 Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Kegiatan	1	1	100	1	1	100
2 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Laporan	3	3	100	3	3	100
Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan							
1 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	Laporan	3	3	100	3	3	100
2 Jumlah Rumah Swadaya Perdesaan	Unit	897	894	99,67	1652	1648	99,75
Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan							
1 Jumlah Rumah Khusus Perdesaan	Unit	140	140	100	-	-	-
2 Jumlah Komponen Rumah Untuk Mitigasi Bencana Perumahan Perdesaan	Unit	1	-*	-*	-	-	-
Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan							

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Satuan	BP3KP Sumatera III			BP3KP Sumatera V			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi Dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan								
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100	1	1	100
2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Laporan	4	4	100	4	4	100
Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan								
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100	1	1	100
2	Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	unit	248	247	99,60	257	257	100
Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan								
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	2	2	100	1	1	100
2	Jumlah Rumah Hunia ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	Unit	102	102	100	-	-	-
Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko								
Meningkatnya Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman								
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik,	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100	1	1	100

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Satuan	BP3KP Sumatera III			BP3KP Sumatera V		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Transparansi dan Akuntabilitas							
2 Jumlah Rekomendasi Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100	1	1	100

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera V telah melaksanakan kegiatan tahun 2025 dengan upaya yang maksimal dan mencapai kinerja yang maksimal. Secara umum, keduanya telah memenuhi pencapaian target Perjanjian Kinerja, kecuali pada indikator jumlah bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya. Jika dibandingkan dari jumlah indikator kinerja, terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang berbeda yaitu Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III melakukan pembangunan rumah khusus dan rumah susun pada tahun 2025.

3.4 Analisis Realisasi Anggaran

3.4.1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Pagu anggaran yang dimiliki oleh balai dan satuan kerja di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III berdasarkan DIPA petikan awal tahun 2025 digunakan dalam rangka mendukung Program Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Program Dukungan Manajemen sebanyak Rp 178,096,362,000,- menjadi Rp 182.839.655.000,- setelah beberapa kali mengalami revisi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 42. Pagu anggaran pelaksanaan Program dan Kegiatan di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III berdasarkan DIPA Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp Ribu)	
		Semula	Menjadi
Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan		194.564.724	179.387.460
1	Balai	2,785,987	2.486.369
2	Sumatera Barat	88,675,687	109.892.120
3	Riau	65,393,088	38.800.819
4	Kepulauan Riau	37,709,962	28.208.152
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman		397.171	3.452.195
1	Balai	164.688	1.353.194
2	Sumatera Barat	76.839	741.375
3	Riau	70.832	654.112
4	Kepulauan Riau	84.812	1.177.772
Total		194.961.895	182.839.655

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III sesuai dengan Surat Direktur Jenderal dan Surat Sekretaris Jenderal Anggaran. Mengalami beberapa kali perubahan pada setiap Direktorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal dengan total akumulasi DIPA sebesar Rp 3.839.563.000,-. Dengan rincian kronologi sebagai berikut :

Tabel 3. 43.Kronologi perubahan DIPA Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III TA 2025

Petikan DIPA	Tanggal Terbit	Pagu Anggaran (Rp Ribu)	Keterangan	Uraian Perubahan Pagu Anggaran
Sekretariat Jenderal				
Awal	02 Desember 2024	164.688		
Revisi 01	11 Juni 2025	1.251.514	Perubahan Pagu Anggaran	Perubahan pada RKA
Revisi 02	15 Juli 2025	1.251.514	Revisi Kanwil DJPb Hal III DIPA	
Revisi 03	14 Oktober 2025	1.251.514	Revisi Kanwil DJPb Hal III DIPA	
Revisi 04	13 November 2025	1.353.194	Revisi Dit PA	Perubahan Pagu Anggaran dan RKA
Revisi 05	05 Desember 2025	1.353.194	Pemutakhiran KPA	
Revisi 06	10 Desember 2025	1.353.194	Pemutakhiran KPA	
Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman				
Awal	02 Desember 2024	50,000		
Revisi 01	25 Juni 2025	165,020	Perubahan Pagu Anggaran	Perubahan pada RKA
Revisi 02	15 Juli 2025	165,020	Revisi Kanwil DJPb Hal.III DIPA	
Revisi 03	15 Agustus 2025	495,320	Revisi DJA	Perubahan Pagu Anggaran dan RKA. Penambahan Output pada Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan
Revisi 04	16 Oktober 2025	495,320	Revisi Kanwil DJPb Hal.III DIPA	
Revisi 05	11 November 2025	495,320	Revisi POK	
Revisi 06	03 Desember 2025	495,320	Pemutakhiran KPA	
Revisi 07	10 Desember 2025	495,320	Pemutakhiran KPA	
Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan				
Awal	02 Desember 2024	131,932		
Revisi 01	03 Juli 2025	252,620	Perubahan Pagu Anggaran	
Revisi 02	15 Juli 2025	252,620	Revisi Kanwil DJPb Hal.III DIPA	
Revisi 03	24 Oktober 2025	546,356	Revisi DJA	Perubahan Pagu dan Penambahan Output, Penambahan Output pada Pemantauan dan Evaluasi Pelaporan Perumahan Perdesaan
Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan				
Awal	02 Desember 2024	100,000		
Revisi 01	03 Juli 2025	240,216	Perubahan Pagu Anggaran	Perubahan Pada RKA

Petikan DIPA	Tanggal Terbit	Pagu Anggaran (Rp Ribu)	Keterangan	Uraian Perubahan Pagu Anggaran
Revisi 02	15 Juli 2025	240,216	Revisi Kanwil DJPb Hal.III DIPA	
Revisi 03	09 Agustus 2025	1,141,227	Revisi DJA	Perubahan Pagu Anggaran
Revisi 04	14 Oktober 2025	1,141,227	Revisi Kanwil DJPb Hal.III DIPA	
Revisi 05	02 Desember 2025	1,141,227	Revisi Pemutakhiran KPA	
Revisi 06	10 Desember 2025	1,141,227	Revisi Pemutakhiran KPA	
Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Korupsi				
Awal	02 Desember 2024	45,000		
Revisi 01	24 Juni 2025	303,466	Perubahan Pagu Anggaran	
Revisi 02	15 Juli 2025	303,466	Revisi Kanwil DJPb Hal.III DIPA	
Revisi 03	14 Oktober 2025	303,466	Revisi Kanwil DJPb Hal.III DIPA	
Revisi 04	04 Desember 2025	303,466	Pemutakhiran KPA	

Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Surat masing-masing Direktur Jenderal dan Sekretaris Jenderal. . Mengalami beberapa kali perubahan pada setiap Direktorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal dengan total akumulasi DIPA sebesar Rp 110.633.495.000,-. Dengan rincian kronologi sebagai berikut :

Tabel 3. 44. Kronologi perubahan DIPA Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat TA 2025

No	Petikan DIPA	Tanggal Terbit DIPA	Pagu Anggaran (Rp. 000)	Keterangan	Uraian Perubahan Pagu Anggaran
Sekretariat Jenderal					
1.	Awal	02 Desember 2024	76.839.000		
2.	Revisi 01	11 Juni 2025	575.135.000	Revisi DJA	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan Anggaran pada Klasifikasi Rincian Output 1 7665.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 76.839.000 menjadi 575.135.000 • Penambahan Anggaran pada Rincian Output 01 EBA.994 : Layanan Perkantoran 76.839.000 menjadi 575.135.000
3.	Revisi 02	02 Juli 2025	575.135.000	Revisi Hal III DJPb	
4.	Revisi 03	10 Oktober 2025	575.135.000	Revisi Hal III DJPb	

No	Petikan DIPA	Tanggal Terbit DIPA	Pagu Anggaran (Rp. 000)	Keterangan	Uraian Perubahan Pagu Anggaran
5.	Revisi 04	13 November 2025	741.375.000	Revisi PISK Dit. PA	<ul style="list-style-type: none"> ✦ Pengurangan Anggaran pada Klasifikasi Rincian Output 1 7665.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 575.135.000 menjadi 741.375.000 ✦ Pengurangan Anggaran pada Klasifikasi Rincian Output 1 7665.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 575.135.000 menjadi 741.375.000
6.	Revisi 05	01 Desember 2025	741.375.000	Revisi Pemutakhiran KPA	
Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman					
1.	Awal	02 Desember 2024	8.248.120.000		
2.	Revisi 01	21 Mei 2025	1.054.120.000	Revisi DJA	<ul style="list-style-type: none"> ✦ Pengurangan Anggaran pada Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman sebesar 330.00 unit 7.194.000.000
3.	Revisi 02	25 Juni 2025	1.141.244.000	Revisi DJA	<ul style="list-style-type: none"> ✦ Penambahan Anggaran pada FAE.003 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh 87.124.000
4.	Revisi 03	02 Juli 2025	1.141.244.000	Revisi Hal III DJPb	
5.	Revisi 04	15 Agustus 2025	19.935.723.000	Revisi DJA	<ul style="list-style-type: none"> ✦ Pergantian RBB.001 pada kegiatan Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman 1.054.120.000 diganti menjadi RBB.005 Penanganan Permukiman Kumuh sebesar 19.848.599.000

No	Petikan DIPA	Tanggal Terbit DIPA	Pagu Anggaran (Rp. 000)	Keterangan	Uraian Perubahan Pagu Anggaran
6.	Revisi 05	02 Oktober 2025	19.675.454.000	Revisi DJA	• Penambahan RBB.003 pada kegiatan Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman 374.277.000
7.	Revisi 06	10 Oktober 2025	19.675.454.000	Revisi Hal III DJPb	
8.	Revisi 07	22 November 2025	19.675.454.000	Revisi Pemutakhiran KPA	
Diectorat Jenderal Perumahan Perdesaan					
1.	Awal	02 Desember 2024	75.069.377.000		
2.	Revisi 01	20 Mei 2025	61.262.135.000	Revisi DJA	• Pengurangan RBB.007 pada kegiatan Rumah Swadaya Perdesaan 13.807.242.000
3.	Revisi 02	03 Juli 2025	61.353.555.000	Revisi DJA	• Penambahan FAE.001 pada kegiatan Pemantauan 113.829.000
4.	Revisi 03	21 Agustus 2025	77.872.504.000	Revisi DJA	• Penambahan RBB.007 Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan 8.891.149.000
5.	Revisi 04	24 Oktober 2025	85.492.615.000	Revisi DJA	• Penambahan FAE.005 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan 79.896.000 • Penambahan RBB.005 Komponen Rumah Untuk Mitigasi Bencana Perumahan Perdesaan 4.900.000.000
Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan					
1.	Awal	02 Desember 2024	5.358.190.000		
2.	Revisi 01	21 Mei 2025	20.000.000	Revisi DJA	• Pengurangan RBB.008 pada kegiatan Rumah Swadaya Perkotaan sebesar 5.358.190.000

No	Petikan DIPA	Tanggal Terbit DIPA	Pagu Anggaran (Rp. 000)	Keterangan	Uraian Perubahan Pagu Anggaran
3.	Revisi 02	03 Juli 2025	105.125.000	Revisi DJA	• Penambahan FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan sebesar 85.125.000
4.	Revisi 03	09 Agustus 2025	527.104.000	Revisi DJA	• Penambahan FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan 507.104.000
5.	Revisi 04	25 Agustus 2025	6.391.670.000	Revisi DJA	• Penambahan RBB.008 Rumah Swadaya Perkotaan menjadi 5.884.566.000
6.	Revisi 05	10 Oktober 2025	6.391.670.000	Revisi Hal III DJPb	
7.	Revisi 06	17 Oktober 2025	4.724.051.000	Revisi DJA	

Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau sesuai dengan Surat masing-masing Direktur Jenderal dan Sekretaris Jenderal. . Mengalami beberapa kali perubahan pada setiap Direktorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal dengan total akumulasi DIPA sebesar Rp 39.504.333.000,-. Dengan rincian kronologi sebagai berikut :

Tabel 3. 45.Kronologi perubahan DIPA Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau TA 2025

Petikan DIPA	Tanggal Terbit	Pagu Anggaran (Rp Ribu)	Keterangan	Uraian Perubahan Pagu Anggaran
Sekretariat Jenderal				
Awal	2 Desember 2024	70,832		
Revisi 01	11 Juni 2025	567,434		Terdapat penyesuaian anggaran pada kegiatan : Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal yaitu Layanan Perkantoran
Revisi 02	29 Agustus 2025	567,434	Revisi Pemutakhiran KPA	
Revisi 03	13 November 2025	703,514	Revisi Pemutakhiran KPA	Terdapat penyesuaian anggaran pada kegiatan : Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal yaitu Layanan Perkantoran
Revisi 04	1 Desember 2025	703,514	Revisi Pemutakhiran KPA	
Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman				
Awal	2 Desember 2024	26,744,827		

Petikan DIPA	Tanggal Terbit	Pagu Anggaran (Rp Ribu)	Keterangan	Uraian Perubahan Pagu Anggaran
Revisi 01	21 Mei 2025	19,550,827		Terdapat penyesuaian anggaran dan output pada kegiatan : Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman yaitu Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman
Revisi 02	25 Juni 2025	19,636,133		Terdapat penyesuaian anggaran dan output pada kegiatan : Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman yaitu Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan
Revisi 03	8 Juli 2025	19,636,133	Revisi Kanwil	
Revisi 04	15 Agustus 2025	11,246,766	Revisi DJA	Terdapat penyesuaian anggaran pada kegiatan : Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman yaitu Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman
Revisi 05	2 Oktober 2025	8,899,434		Terdapat penyesuaian anggaran pada kegiatan : Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman yaitu Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman
Revisi 06	14 Oktober 2025	8,899,434	Revisi Kanwil	
Revisi 07	10 Desember 2025	8,899,434	Revisi Pemutakhiran KPA	
Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan				
Awal	2 Desember 2024	13,555,019		
Revisi 01	20 Mei 2025	22,409		Terdapat penyesuaian anggaran dan output pada kegiatan : Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan yaitu Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman
Revisi 02	3 Juli 2025	111,919		Terdapat penyesuaian anggaran pada kegiatan : Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan yaitu Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan
Revisi 03	21 Agustus 2025	8,574,046		Terdapat penyesuaian anggaran dan output pada

Petikan DIPA	Tanggal Terbit	Pagu Anggaran (Rp Ribu)	Keterangan	Uraian Perubahan Pagu Anggaran
				kegiatan : Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan yaitu Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman
Revisi 04	16 September 2025	8,574,046		
Revisi 05	24 Oktober 2025	8,535,521		Terdapat penyesuaian anggaran dan output pada kegiatan : Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan yaitu Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan dan Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman
Revisi 06	24 November 2025	8,535,521		
Revisi 07	30 November 2025	8,535,521		
Revisi 08	11 Desember 2025	8,535,521		
Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan				
Awal	2 Desember 2024	25,093,242		
Revisi 01	21 Mei 2025	19,484,580		Terdapat penyesuaian anggaran pada kegiatan : Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan yaitu Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman
Revisi 02	3 Juli 2025	19,575,100		Terdapat penyesuaian anggaran dan output pada kegiatan : Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan yaitu Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan dan Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman
Revisi 03	9 Juli 2025	19,575,100		
Revisi 04	9 Agustus 2025	19,996,079		Terdapat penyesuaian anggaran pada kegiatan : Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan yaitu Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan
Revisi 05	25 Agustus 2025	21,285,044		Terdapat penyesuaian anggaran dan output pada kegiatan : Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan yaitu Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman

Petikan DIPA	Tanggal Terbit	Pagu Anggaran (Rp Ribu)	Keterangan	Uraian Perubahan Pagu Anggaran
Revisi 06	18 September 2025	21,285,044		
Revisi 07	17 Oktober 2025	21,365,864		Terdapat penyesuaian anggaran dan output pada kegiatan : Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan yaitu Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman
Revisi 08	26 November 2025	21,365,864		
Revisi 09	10 Desember 2025	21,365,864		

Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Surat masing-masing Direktur Jenderal dan Sekretaris Jenderal. . Mengalami beberapa kali perubahan pada setiap Direktorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal dengan total akumulasi DIPA sebesar Rp 28,862,264,000,-. Dengan rincian kronologi sebagai berikut :

Tabel 3. 46.Kronologi perubahan DIPA Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau TA 2025

Petikan DIPA	Tanggal Terbit	Pagu Anggaran (Rp Ribu)	Keterangan	Uraian Perubahan Pagu Anggaran
Sekretariat Jenderal				
Awal	02 Desember 2024	84.812		
Revisi 01	11 Juni 2025	556.592	Revisi DJA	Terdapat penyesuaian anggaran pada kegiatan: Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal
Revisi 02	04 Juli 2025	556.592	Revisi Kanwil	
Revisi 03	27 Agustus 2025	556.592	Revisi KPA (POK)	
Revisi 04	06 Oktober 2025	556.592	Revisi KPA (POK)	
Revisi 05	14 Oktober 2025	556.592	Revisi Kanwil	
Revisi 06	07 November 2025	556.592	Revisi KPA (POK)	
Revisi 07	13 November 2025	654.112	Revisi DJA	Terdapat penyesuaian anggaran pada kegiatan: Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal
Revisi 08	28 November 2025	654.112	Revisi KPA (POK)	
Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman				
Awal	02 Desember 2024	5.412.821		
Revisi 01	25 Juni 2025	5.499.155	Revisi DJA	Terdapat penyesuaian anggaran dan output pada kegiatan: Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman yaitu

Petikan DIPA	Tanggal Terbit	Pagu Anggaran (Rp Ribu)	Keterangan	Uraian Perubahan Pagu Anggaran
				Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan
Revisi 02	25 Juli 2025	5.499.155	Revisi KPA (POK)	
Revisi 03	15 Agustus 2025	86.334	Revisi DJA	Terdapat penyesuaian anggaran dan output pada kegiatan: Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman yaitu Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman
Revisi 04	20 Agustus 2025	86.334	Revisi KPA (POK)	
Revisi 05	02 Oktober 2025	713.986	Revisi DJA	Terdapat penyesuaian anggaran dan output pada kegiatan: Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman yaitu Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman
Revisi 06	06 Oktober 2025	713.986	Revisi KPA (POK)	
Revisi 07	14 Oktober 2025	713.986	Revisi Kanwil	
Revisi 08	28 November 2025	713.986	Revisi KPA (POK)	
Revisi 09	08 Desember 2025	713.986	Revisi KPA (POK)	
Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan				
Awal	02 Desember 2024	22.409		
Revisi 01	03 Juli 2025	112.999	Revisi DJA	Terdapat penyesuaian anggaran pada kegiatan: Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman yaitu Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan
Revisi 02	26 Agustus 2025	112.999	Revisi KPA (POK)	
Revisi 03	24 Oktober 2025	66.198	Revisi DJA	Terdapat penyesuaian anggaran pada kegiatan: Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman yaitu Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan
Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan				
Awal	02 Desember 2024	32.274.732		
Revisi 01	21 Mei 2025	26.938.628	Revisi DJA	Terdapat penyesuaian anggaran dan output pada kegiatan: Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan

Petikan DIPA	Tanggal Terbit	Pagu Anggaran (Rp Ribu)	Keterangan	Uraian Perubahan Pagu Anggaran
				yaitu Rumah Swadaya Perkotaan
Revisi 02	03 Juli 2025	27.025.989	Revisi DJA	Terdapat penyesuaian anggaran kegiatan: Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan yaitu Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan
Revisi 03	13 Juli 2025	27.025.989	Revisi Kanwil	
Revisi 04	09 Agustus 2025	27.447.968	Revisi DJA	Terdapat penyesuaian anggaran kegiatan: Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan yaitu Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan
Revisi 05	25 Agustus 2025	27.427.968	Revisi DJA	Terdapat penyesuaian anggaran dan output pada kegiatan: Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan yaitu Rumah Swadaya Perkotaan
Revisi 06	25 September 2025	27.427.968	Revisi KPA (POK)	
Revisi 07	01 Oktober 2025	27.427.968	Revisi KPA (POK)	
Revisi 08	10 Oktober 2025	27.427.968	Revisi Kanwil	
Revisi 09	20 Oktober 2025	27.427.968	Revisi KPA (POK)	
Revisi 10	03 November 2025	27.427.968	Revisi KPA (POK)	
Revisi 11	09 Desember 2025	27.427.968	Revisi KPA (POK)	
Revisi 12	10 Desember 2025	27.427.968	Revisi KPA (POK)	

3.4.2 Realisasi Anggaran TA 2025

Alokasi pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam PK revisi akhir tahun 2025 sebesar Rp 182.839.655.000,- dipergunakan dalam rangka merealisasikan komitmen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Akses Perumahan yang Layak dan Aman serta Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan. Perbandingan pagu DIPA dan realisasi anggaran masing-masing satuan kerja di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III TA 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 47. Realisasi Anggaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III TA 2024

Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Nilai Efisiensi (%)
		Realisasi (Rp)	(%)		
1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III	3.839.563.000	3.112.890.440	81,07	100,00	123,35
2 Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat	110.633.495.000	95.222.258.349	86,07	99,91	116,08
3 Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau	39.504.333.000	39.155.083.991	99,12	100,00	100,89
4 Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau	28.862.264.000	27.184.753.513	94,19	100,00	106,17
Total	182.839.655.000	164.674.986.293	90,07	99,98	111,00

Pagu anggaran yang dipergunakan dalam pembiayaan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III pada tahun 2025 berdasarkan data dari *eMonitoring* terealisasi sebesar Rp 164.674.986.293,- (90,07%). Secara umum nilai efisiensi anggaran di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III pada tahun 2025 mencapai nilai 111,00 %. Nilai tersebut menunjukkan bahwa telah dilakukan efisiensi anggaran pada pelaksanaan kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III, yaitu berhasil mencapai realisasi fisik yang lebih besar dengan anggaran yang lebih sedikit.

3.4.3 Perbandingan Realisasi Anggaran TA 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Pada pelaksanaan kegiatan tahun 2025, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III didukung dengan anggaran yang memiliki nilai berbeda dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena pemisahan Kementerian PUPR menjadi Kementerian PU dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Sehingga Balai memiliki 5 DIPA sesuai dengan Unit Organisasi (Unor).

Tabel 3. 48. Realisasi Anggaran BP2P 2024 dan BP3KP 2025

Satuan Kerja	2024					2025				
	Pagu	Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Nilai Efisiensi (%)	Pagu	Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Nilai Efisiensi (%)
	(Rp)	Realisasi (Rp)	(%)			(Rp)	Realisasi (Rp)	(%)		
1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III	6.139.682.000	6.091.008.185	99,21	100,00	100,80	3.839.563.000	3.112.890.440	81,07	100,00	123,35
2 Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat	116.393.404.000	115.129.012.624	98,91	99,32	100,41	110.633.495.000	95.222.258.349	86,07	99,91	116,08
3 Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau	86.300.406.000	86.293.867.820	99,99	99,99	100,00	39.504.333.000	39.155.083.991	99,12	100,00	100,89
4 Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau	37.731.773.000	37.719.554.753	99,97	100,00	100,03	28.862.264.000	27.184.753.513	94,19	100,00	106,17
Total	246.565.265.000	245.233.443.382	99,46	99,68	100,22	182.839.655.000	164.674.986.293	90,07	99,98	111,00

3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III dapat menyelesaikan kegiatan tahun 2025 karena adanya dukungan alokasi anggaran yang ditetapkan untuk memenuhi pencapaian target Perjanjian Kinerja. Pada tabel di bawah ini dapat dilihat efisiensi anggaran yang telah diupayakan dalam pencapaian target rincian *output* kegiatan di balai maupun satuan kerja di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III pada tahun 2025. Nilai efisiensi tersebut dinilai dari perbandingan realisasi fisik dan penggunaan anggaran yang ada.

Nilai efisiensi realisasi fisik terhadap anggaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III pada tahun 2025 secara umum mencapai $\geq 100\%$. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III telah melakukan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Namun, masih terdapat beberapa rincian *output* yang tidak memenuhi target karena adanya kegiatan fisik BSPS yang tidak mencapai target di Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 3. 49. Efisiensi Anggaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Tahun 2025

No	Rincian Output	Target	Realisasi (%)		Efisiensi (%)
			Anggaran	Fisik	Fisik / Anggaran
Satuan Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III					
1	Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan / Kajian	85,8	100	116,55
2	Jumlah dokumen Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan / Kajian	94,7	100	105,60
3	Jumlah dokumen Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Layanan / Laporan / Dokumen	34,9	100	286,53
4	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	2 Rekomendasi Kebijakan / Kajian	66,6	100	150,15
5	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Kegiatan / Laporan / Dokumen	83,6	100	119,62
6	Jumlah laporan kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1 Layanan / Laporan / Dokumen	93,4	100	107,07
7	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	1 Layanan / Laporan / Dokumen	95,2	100	105,04
8	Jumlah laporan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Layanan / Laporan / Dokumen	84,9	100	117,76

No	Rincian Output	Target	Realisasi (%)		Efisiensi (%)
			Anggaran	Fisik	Fisik / Anggaran
9	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1 Layanan / Laporan / Dokumen	36,4	100	274,73
10	Jumlah dokumen Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1 Rekomendasi Kebijakan / Kajian	95,7	100	104,49
11	Jumlah dokumen Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	1 Rekomendasi Kebijakan / Kajian	95,3	100	104,93
12	Layanan Perkantoran	1 Layanan / Laporan / Dokumen	86,8	100	115,21
Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat					
1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	1 Layanan / Laporan / Dokumen	96,04	100	104,12
2	Jumlah laporan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Layanan / Laporan / Dokumen	74,19	100	134,79
3	Jumlah laporan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Layanan / Laporan / Dokumen	98,13	100	101,91
4	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1 Layanan / Laporan / Dokumen	90,46	100	110,55
5	Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas di Kawasan Permukiman	10 unit / Hektar / KK / Liter / detik / SR	100	100	100,00
6	Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas di Perumahan Perkotaan	191 unit / Hektar / KK / Liter / detik / SR	99,21	99,21	99,21
7	Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas di Perumahan Perdesaan	521 unit / Hektar / KK / Liter / detik / SR	99,42	99,42	99,42
8	Jumlah rumah khusus yang terbangun di Perumahan Perdesaan	140 unit / Hektar / KK / Liter / detik / SR	100	100	100,00
9	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu di Kawasan Permukiman	68,04 Hektar / KK / Liter / detik / SR	100	100	100,00
10	Jumlah Komponen Rumah Untuk Mitigasi Bencana Perumahan Perdesaan	1 Layanan / Laporan / Dokumen			
9	Layanan Perkantoran	1 Layanan / Laporan / Dokumen	97,67	100,00	102,39
Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau					
1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	1 Layanan / Laporan / Dokumen	83,34	100,00	117,18
2	Jumlah laporan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Layanan / Laporan / Dokumen	98,72	100,00	101,30

No	Rincian Output	Target	Realisasi (%)		Efisiensi (%)
			Anggaran	Fisik	Fisik / Anggaran
3	Jumlah laporan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Layanan / Laporan / Dokumen	99,57	100,00	100,43
4	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1 Layanan / Laporan / Dokumen	95,36	100,00	104,87
5	Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas di Perumahan Perkotaan	57 unit / Hektar / KK / Liter / detik / SR	99,98	100,00	100,02
6	Jumlah unit rumah swadaya melalui peningkatan kualitas di Perumahan Perdesaan	376 unit / Hektar / KK / Liter / detik / SR	99,97	100,00	100,03
7	Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	44 unit / Hektar / KK / Liter / detik / SR	99,68	100,00	100,32
8	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu di Kawasan Permukiman	35,58 Hektar / KK / Liter / detik / SR	97,43	100,00	102,64
9	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan / Laporan / Dokumen	95,47	100,00	104,74
Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau					
1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	1 Layanan / Laporan / Dokumen	93,03	100,00	107,49
2	Jumlah laporan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Layanan / Laporan / Dokumen	12,21	100,00	819,00
3	Jumlah laporan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Layanan / Laporan / Dokumen	46,50	100,00	215,05
4	Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	58 unit / Hektar / KK / Liter / detik / SR	95,14	100,00	105,11
5	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu di Kawasan Permukiman	0,1 Hektar / KK / Liter / detik / SR	96,65	100,00	103,47
6	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan / Laporan / Dokumen	98,10	100,00	101,94

Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 50. Efisiensi SDM di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

No	Unit Kerja	Jumlah Kegiatan	Pegawai			Rasio Penugasan
			PNS	CPNS	PPPK	
1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III	11	5	16	5	2,11

No	Unit Kerja	Jumlah Kegiatan	Pegawai			Rasio Penugasan
			PNS	CPNS	PPPK	
2	Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Provinsi Sumatera Barat	10	8	10	18	1,39
3	Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau	7	6	11	6	1,52
4	Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau	6	5	9	12	1,04

Berdasarkan tabel tersebut, diasumsikan bahwa 1 (satu) kegiatan dilaksanakan oleh 5 (lima) orang. Rasio penugasan diukur dari perbandingan asumsi jumlah pegawai ideal dalam satu kegiatan dengan jumlah pegawai yang tersedia dikalikan dengan jumlah kegiatan yang harus dilaksanakan.

Jumlah kegiatan yang diukur merupakan jumlah target capaian *output* yang mengacu pada komitmen Perjanjian Kinerja tahun 2025. Sehingga diperoleh rasio penugasan di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III mencapai rentang 2 sampai 3 penugasan per orang. Rasio tersebut menunjukkan bahwa telah dilakukan efisiensi dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III jika dilihat dari segi ketersediaan sumber daya manusia.

3.6 Analisis Pemanfaatan Informasi dalam Laporan Kinerja

Pemanfaatan informasi dalam penyusunan Laporan Kinerja BP3KP Sumatera III merupakan bagian penting dalam menjamin akuntabilitas, transparansi, dan keterukuran pelaksanaan program dan kegiatan. Informasi yang digunakan dalam laporan kinerja bersumber dari data perencanaan, pelaksanaan, serta hasil monitoring dan evaluasi yang dihimpun secara sistematis sepanjang tahun anggaran. Data tersebut meliputi capaian indikator kinerja utama (IKU), realisasi fisik dan keuangan, output kegiatan, serta permasalahan dan tindak lanjut pelaksanaan program di wilayah kerja BP3KP Sumatera III.

Informasi kinerja dimanfaatkan sebagai dasar untuk menilai tingkat pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, seperti Renstra, Rencana Aksi (Renaksi) dan Perjanjian Kinerja. Melalui analisis perbandingan antara target dan realisasi, laporan kinerja mampu memberikan gambaran objektif mengenai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan, khususnya dalam penyelenggaraan program perumahan dan kawasan permukiman, termasuk dukungan terhadap penanganan rumah layak huni bagi MBR.

Selain itu, pemanfaatan informasi kinerja digunakan sebagai alat evaluasi internal untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja. Informasi yang tersaji dalam laporan kinerja menjadi dasar dalam perumusan rekomendasi perbaikan, penyesuaian

strategi pelaksanaan kegiatan, serta peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran pada periode berikutnya. Dengan demikian, laporan kinerja tidak hanya berfungsi sebagai dokumen pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai instrumen manajemen kinerja.

Informasi dalam laporan kinerja BP3KP Sumatera III juga dimanfaatkan sebagai bahan pelaporan kepada pimpinan dan pemangku kepentingan terkait, serta sebagai sarana komunikasi kinerja organisasi kepada publik. Penyajian informasi yang jelas, akurat, dan dapat ditelusuri mendukung prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Secara keseluruhan, pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja BP3KP Sumatera III telah mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data (*evidence-based decision making*), serta menjadi landasan dalam upaya peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan guna mewujudkan pelayanan perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas di wilayah Sumatera III.

Pada pelaksanaan kegiatan **Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)**, informasi kinerja dimanfaatkan untuk menilai ketercapaian peningkatan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan kondisi lapangan. Data progres fisik, pendampingan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), serta partisipasi masyarakat menjadi dasar dalam mengukur efektivitas pelaksanaan BSPS. Informasi lapangan menunjukkan bahwa keberhasilan kegiatan sangat dipengaruhi oleh kesiapan calon penerima bantuan, ketersediaan material, serta koordinasi dengan pemerintah daerah. Hasil analisis informasi tersebut dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat aspek pendampingan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pada tahap selanjutnya.

Dalam kegiatan **fasilitas Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)**, informasi yang diperoleh dari lapangan dimanfaatkan untuk menilai kesesuaian jenis dan lokasi PSU dengan kebutuhan kawasan perumahan. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa keberadaan PSU memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas lingkungan hunian, meskipun masih ditemui kendala teknis dan administratif di beberapa lokasi. Informasi ini digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan PSU agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Pemanfaatan informasi pada kegiatan **Klinik PKP** didasarkan pada hasil pelaksanaan sosialisasi dan konsultasi kebijakan perumahan dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan. Informasi mengenai permasalahan yang disampaikan oleh peserta, tingkat pemahaman terhadap regulasi, serta tindak lanjut hasil konsultasi dimanfaatkan untuk menilai efektivitas Klinik PKP sebagai sarana peningkatan kapasitas. Berdasarkan realisasi lapangan, Klinik PKP berperan sebagai media strategis dalam memperkuat sinergi pusat dan daerah serta meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan teknis penyelenggaraan perumahan.

Sementara itu, informasi hasil **Monitoring dan Evaluasi** dimanfaatkan untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Hasil monev memberikan gambaran mengenai capaian kinerja, tingkat kepatuhan terhadap ketentuan, serta permasalahan yang memerlukan tindak lanjut. Informasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi perbaikan kinerja, peningkatan kualitas pengendalian program, serta penguatan perencanaan kegiatan pada periode berikutnya.

Pemanfaatan informasi dalam Laporan Kinerja BP3KP Sumatera III pada kegiatan **Rumah Susun (Rusun)** didasarkan pada hasil pelaksanaan kegiatan di lapangan yang meliputi progres fisik pembangunan, kesiapan lahan, koordinasi dengan pemerintah daerah, serta pemenuhan persyaratan teknis dan administratif. Informasi tersebut digunakan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan rusun dengan perencanaan yang telah ditetapkan, khususnya dalam mendukung penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok sasaran tertentu.

Pemanfaatan informasi dalam Laporan Kinerja BP3KP Sumatera III pada kegiatan **Sanitasi** bersumber dari hasil pelaksanaan kegiatan peningkatan akses sanitasi layak di lokasi sasaran. Informasi yang dihimpun meliputi progres pembangunan sarana sanitasi, tingkat pemanfaatan oleh masyarakat, serta kesesuaian sarana yang dibangun dengan kondisi lingkungan setempat. Informasi lapangan tersebut digunakan untuk menilai kontribusi kegiatan sanitasi terhadap peningkatan kualitas hunian dan kesehatan lingkungan permukiman.

Pemanfaatan informasi dalam Laporan Kinerja BP3KP Sumatera III pada kegiatan **Rumah Khusus (Rusus)** disusun berdasarkan hasil realisasi pelaksanaan di lapangan yang meliputi kesiapan lokasi, kesesuaian desain dan spesifikasi teknis, progres pembangunan, serta tingkat pemanfaatan rumah oleh kelompok sasaran. Informasi yang dihimpun dari hasil monitoring lapangan, laporan pelaksanaan kegiatan, dokumentasi teknis, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dimanfaatkan untuk menilai kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Rusus, mengidentifikasi kendala teknis dan nonteknis seperti kondisi geografis dan aksesibilitas lokasi, serta merumuskan tindak lanjut perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan keberlanjutan pemanfaatan Rumah Khusus di wilayah kerja BP3KP Sumatera III.

3.7 Faktor Pendukung Keberhasilan dan Penyebab Kegagalan

Beberapa faktor pendukung keberhasilan dikelompokkan menjadi dua berdasarkan sumber faktornya, yaitu dari sisi internal dan dari sisi eksternal, sebagai berikut :

Faktor Pendukung Keberhasilan dari sisi Internal

- | | |
|---|--|
| 1 | Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi berkaitan dengan progres capaian kinerja terhadap target kinerja yang sudah ditetapkan. |
| 2 | Perencanaan Anggaran yang realistis sesuai kebutuhan dan prioritas program kegiatan di khususnya di lingkungan BP3KP Sumatera III. |

- | | |
|---|--|
| 3 | Terpenuhinya kebutuhan pegawai yang kompeten di bidangnya, sehingga target kinerja balai maupun satker tercapai. |
| 4 | Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan dan dokumentasi kegiatan. |
| 5 | Kemampuan adaptasi organisasi terhadap dinamika kebijakan dan kondisi lapangan. |

Faktor Pendukung Keberhasilan dari sisi Eksternal

- | | |
|----|---|
| 1. | Peran Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang aktif dalam pendampingan dan pengendalian kegiatan di lapangan. |
| 2. | Adanya koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat (melalui BP3KP Sumatera III dan Satker PKP Provinsi Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau), Penyedia Jasa, seluruh stakeholder, dan Masyarakat; |
| 3. | Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pembangunan dan pemeliharaan rumah susun |
| 4 | Dukungan dari Unit Organisasi (Ditjen Kawasan Permukiman, Ditjen Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan) dalam mendukung kebutuhan balai terkait arahan serta sosialisasi hal-hal yang berkaitan dengan program Tiga Juta Rumah. |

Beberapa faktor pendukung keberhasilan dikelompokkan menjadi dua berdasarkan sumber faktornya, yaitu dari sisi internal dan dari sisi eksternal, sebagai berikut :

Faktor Penyebab Kegagalan dari sisi Internal

- | | |
|---|--|
| 1 | Tidak Tersedianya Proses Bisnis serta SOP pada BP3KP Sumatera III, sebagai acuan alur pelaksanaan program dan kegiatan |
| 2 | Tidak Terpenuhinya hasil penyusunan profil risiko karena melibatkan pegawai-pegawai yang sudah mengikuti pelatihan analisis manajemen risiko. |
| 3 | Kurang intensifnya koordinasi internal, sehingga perlu meningkatkan intensitas koordinasi melibatkan balai dan satker terkait hasil monitoring dan evaluasi, untuk mengidentifikasi permasalahan dan menyepakati tindak lanjut atas permasalahan yang ada. |
| 4 | Koordinasi internal antar fungsi (teknis, administrasi, dan pelaporan) yang berjalan kurang efektif. |
| 5 | Keterbatasan jumlah SDM dibandingkan luas wilayah kerja dan jumlah kegiatan. |

Faktor Penyebab Kegagalan dari sisi Eksternal

- | | |
|----|---|
| 1. | Keterbatasan data awal yang akurat di beberapa lokasi sasaran. |
| 2. | Aksesibilitas wilayah yang sulit akibat kondisi geografis Sumatera III. |
| 3. | Kondisi cuaca dan iklim yang memengaruhi jadwal pekerjaan fisik. |
| 4 | Partisipasi masyarakat yang belum merata di seluruh lokasi sasaran. |
| 5 | Jarak lokasi kegiatan yang berjauhan sehingga memengaruhi efektivitas pengendalian. |
| 6 | Kondisi darurat atau kejadian tidak terduga (bencana alam, gangguan lingkungan). |



Bab.

4

Penutup

- ***Kesimpulan***
- ***Rekomendasi dan Tindak Lanjut***



**Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan
Kawasan Permukiman Sumatera III**

PENUTUP

4.1 Simpulan Umum

Laporan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2025. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III sebagai salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berada dibawah lingkup Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian. Pelaksanaan kegiatan mencakup tiga wilayah, yaitu Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Sumatera Barat.

Terdapat beberapa isu strategis yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III pada tahun 2025, yaitu: a) Tingginya backlog kepemilikan rumah serta masih banyaknya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), khususnya pada kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di wilayah perdesaan, pinggiran kota, dan pesisir. b) Basis data perumahan dan kawasan permukiman di tingkat kabupaten/kota belum sepenuhnya mutakhir. c) Kondisi geografis ini berdampak pada tingginya biaya pembangunan, keterbatasan akses logistik, serta perlunya penerapan standar teknis bangunan yang adaptif terhadap risiko bencana. d) Kawasan kumuh di wilayah perkotaan umumnya berada pada lokasi dengan kepadatan penduduk tinggi, keterbatasan lahan, serta permasalahan legalitas tanah. e) Keterbatasan Kapasitas Perencanaan dan Kelembagaan Daerah. f) Proses serah terima aset hasil pembangunan perumahan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah masih memerlukan waktu yang relatif lama. g) Variasi Kompetensi dan Kebutuhan Peningkatan Kapasitas SDM.

Pada tahun 2025, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III melaksanakan kegiatan yang diukur melalui pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III melakukan revisi Perjanjian Kinerja sebanyak 1 (satu) kali pada tahun 2025 dikarenakan adanya perubahan dan penyesuaian terhadap target sesuai alokasi DIPA 2025 di setiap Direktorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal. Capaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III diukur melalui 2 (dua) sasaran kegiatan, yaitu (SS-1) “Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan”, dan Sasaran Kegiatan-2 (SS-2) “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman”. Untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan tersebut, Balai

Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 182.839.655.000,- untuk pelaksanaan seluruh kegiatan di Balai dan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam rangka mendukung capaian kinerja tahun 2025, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III didukung oleh SDM sebanyak sebanyak 118 orang yang terdiri atas 24 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 46 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), 41 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK), dan 11 orang tenaga *outsourcing*. 1 orang di antaranya sedang mengikuti tugas belajar / karya siswa.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III terus melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kerja, salah satunya dalam hal akuntabilitas kinerja melalui tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi implementasi AKIP tahun 2023. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III juga telah mengupayakan pencapaian kinerja terhadap komitmen target Perjanjian Kinerja tahun 2025 dengan hasil yang secara umum telah mencapai target maksimal kecuali pada indikator Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perumahan Perkotaan (99,60%) dan Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perumahan Perdesaan (99,67%)

Berdasarkan capaian anggaran dan realisasi fisik, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III telah berhasil melakukan efisiensi sebesar 111,00%. Pagu anggaran yang dipergunakan dalam pembiayaan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp 164.674.986.293,- (90,07%). Nilai tersebut tidak tercapai secara maksimal dikarenakan adanya pelaksanaan kegiatan yang tidak mencapai target maksimal sesuai komitmen Perjanjian Kinerja, yaitu pada pelaksanaan kegiatan BSPS di Provinsi Sumatera Barat deleniasi Perdesaan dan Perkotaan.

Penyusunan laporan kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III telah menjadi bagian dari perhatian pimpinan dan kepedulian seluruh pegawai. Seluruh informasi yang ada digunakan sebagai dasar penyesuaian aktivitas dan anggaran, serta menjadi bahan evaluasi pencapaian kinerja, penyesuaian perencanaan dan perubahan budaya organisasi.

4.1.1 Faktor Pendukung Keberhasilan

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja pada tahun 2025 dan secara umum berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja. Berikut merupakan kegiatan atau upaya yang telah dilakukan Balai Pelaksana

Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III dalam mencapai kinerja yang maksimal.

1. Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan

- a. Sinkronisasi dan koordinasi program pusat dan daerah serta pembinaan penyelenggaraan PKP

Adanya peran pimpinan di lingkungan masing-masing Direktorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal dalam mendukung pelaksanaan kegiatan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III melalui pendampingan dan internalisasi program dan kegiatan bidang perumahan.

Keterlibatan Pemerintah Daerah juga turut serta dalam mendukung pencapaian penyusunan perencanaan penyediaan perumahan melalui dukungan data dan informasi serta pendampingan kepada para pelaku pembangunan di wilayahnya sehingga tercipta keselarasan penyelenggaraan PKP yang dilakukan oleh Pusat dan daerah.

- b. *Monitoring* dan evaluasi penyelenggaraan perumahan

Keterlibatan seluruh pimpinan dan pegawai dalam pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kegiatan sehingga proses pencapaian kinerja dapat terukur dan terkendali hingga selesai.

2. Penyelenggaraan rumah swadaya, rumah susun, rumah khusus dan bantuan PSU

- a. Adanya kebijakan dan regulasi bidang perumahan (Peraturan Menteri PKP Nomor 10 tahun 2025 tentang pelaksanaan bantuan pembangunan perumahan dan penyediaan rumah khusus di Indonesia untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menjadi acuan penting dalam penyelenggaraan bidang perumahan.

- b. Pelaksanaan verifikasi usulan bantuan perumahan sesuai *readiness criteria* sebagai dukungan dalam rangka penyusunan strategi program dan anggaran agar lebih efektif dan efisien.

- c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam rangka pengendalian proses pelaksanaan penyelenggaraan rumah swadaya, rumah susun, rumah khusus dan bantuan PSU.

- d. Adanya kolaborasi dan koordinasi yang baik antara pihak balai, satuan kerja di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III dengan pihak eksternal (Pemerintah Daerah/pengusul bantuan/pelaku pembangunan/masyarakat penerima bantuan) sehingga pelaksanaan pembangunan bantuan perumahan dapat terlaksana dengan baik sesuai rencana.

3. Pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko

- a. Adanya dukungan dari pimpinan unit organisasi dalam memberikan pembinaan kepatuhan intern dan manajemen risiko yang diterapkan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III.

- b. Keterlibatan seluruh pimpinan di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III memberikan keteladanan dalam menciptakan budaya kerja yang baik dalam rangka pembangunan Zona Integritas.
 - c. Seluruh pegawai di balai dan satuan kerja yang tertib dan turut serta dalam pembangunan Zona Integritas, pelaksanaan anti penyuapan dan penerapan manajemen risiko.
 - d. Terciptanya inovasi-inovasi unggulan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III.
4. Pelaksanaan dukungan manajemen penyelenggaraan perumahan
 - a. Terciptanya efektivitas dalam pemberian layanan sarana dan prasarana internal yang mendukung seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
 - b. Pelayanan tata usaha yang mendukung manajemen pelaksanaan kegiatan kesatkeran, Barang Milik Negara dan pemberian layanan data dan informasi.
 - c. Adanya dukungan layanan terhadap kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor.

4.1.2 Permasalahan

Upaya pencapaian target kinerja yang dilakukan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III tidak terlepas dari beberapa kendala yang dihadapi. Berikut ini merupakan gambaran umum kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025:

1. Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan
 - a. Perubahan arah kebijakan unit organisasi yang mengakibatkan perubahan alokasi anggaran dan target realisasi program.
 - b. Kegiatan fisik yang didukung dengan ketersediaan anggaran menjadi prioritas penanganan yang dilaksanakan pemerintah daerah sehingga kegiatan kelembagaan PKP bukan menjadi fokus utama.
 - c. Dokumen Perencanaan Program Kegiatan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang belum matang dan belum menjadi prioritas oleh pemerintah daerah.
2. Pelaksanaan Bantuan Rumah Susun, Rumah Khusus, Rumah Swadaya dan bantuan PSU
 - a. Pemahaman calon penerima bantuan masih terbatas terkait pelaksanaan bantuan baik dari segi kriteria usulan maupun pelaksanaan.
 - b. Keterlambatan pelaksanaan program pembangunan baru yang dimulai pada akhir tahun menyesuaikan adanya refocusing dan Efisiensi anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman arahan dari Presiden.
 - c. Pelaksanaan serah terima aset yang telah lama terbangun belum optimal dikarenakan User/Pemerintah Daerah sulit menerima karena kondisi fisik yang tidak layak.
 - d. Proses pelaksanaan fisik kegiatan terdampak akses lokasi, ketersediaan material, dan jumlah tenaga kerja.
 - e. Kurangnya kedisiplinan para pekerja di lokasi konstruksi.

- f. Kurangnya sosialisasi terkait mekanisme usulan bantuan, terutama sosialisasi terhadap pengembang.
 - g. Pemahaman penerima bantuan terkait aset yang akan diserahkan masih terbatas, baik pemahaman oleh pemerintah daerah ataupun pengembang.
 - h. Pelaksanaan bantuan yang masih menggunakan metode top down yang menyulitkan usulan.
 - i. Masih terdapat unsur kepentingan politik dan pribadi dalam pelaksanaan bantuan.
 - j. Terjadinya bencana alam banjir di Provinsi Sumatera Barat mengakibatkan progres fisik pekerjaan terlambat dari jadwal yang telah ditentukan.
3. Pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko
- a. Sebagian pegawai di lingkungan Balai dan Satuan Kerja masih belum sepenuhnya memahami pentingnya manajemen risiko.
 - b. Beberapa risiko mungkin dianggap tidak signifikan atau terabaikan, padahal dapat berkembang menjadi masalah besar.
 - c. Manajemen risiko memerlukan pendekatan yang kolaboratif dan melibatkan semua pihak terkait, tetapi sering kali komunikasi terhambat oleh perbedaan prioritas antar bagian.
 - d. Terdapat dinamika pergantian pegawai menyebabkan terhambatnya proses pelaksanaan pekerjaan.

Sebagai upaya perbaikan kinerja dalam menghadapi kendala yang ada, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan
 - a. Pelaksanaan kegiatan pemantauan secara aktif dengan memanfaatkan media teknologi sehingga terjadi keberlanjutan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk memastikan eksistensi dan keterlibatan kelembagaan PKP baik dalam pelaksanaan kegiatan fisik maupun pengawasan.
 - b. Pemberian pendampingan dan pemahaman kepada Pemerintah Daerah terkait urgensi RP3KP sebagai pedoman penyelenggaraan PKP dan bukan hanya sebagai bahan pemenuhan *readiness criteria* untuk mendapatkan program bantuan dari Pemerintah Pusat.
2. Pelaksanaan Bantuan Rumah Susun, Rumah Khusus, Rumah Swadaya dan bantuan PSU
 - a. Pemberian sosialisasi secara aktif kepada calon penerima bantuan terkait pedoman pelaksanaan bantuan perumahan mengacu Surat Edaran yang berlaku untuk memberikan pemahaman terkait pemenuhan persyaratan usulan maupun pelaksanaan.
 - b. Menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan sesuai arahan dari pusat dan melakukan penyesuaian anggaran.

- c. Melakukan kegiatan Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi dan Rehabilitasi (OPOR) dalam rangka menjaga kelayakan aset sebelum diserahkan dan melakukan koordinasi dengan pusat terkait serah terima aset.
 - d. Pelaksanaan serah terima aset yang telah lama terbangun belum optimal dikarenakan User/Pemerintah Daerah sulit menerima karena kondisi fisik yang tidak layak.
 - e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk dapat lebih cepat menindaklanjuti kendala yang terjadi di lapangan.
3. Pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko
- a. Melaksanakan kegiatan sosialisasi secara aktif dan melibatkan pegawai dalam pelatihan dan sertifikasi manajemen risiko.
 - b. Membangun budaya keterbukaan dan kolaborasi, sehingga risiko dapat lebih mudah diidentifikasi dan dikelola serta melaksanakan pembahasan secara berkala melalui rapat internal.
 - c. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan serta memperbaiki proses yang ada berdasarkan hasil evaluasi tersebut.
 - d. Telah tersusunnya hasil identifikasi risiko baru yang sesuai dengan pemetaan Corruption Risk Assessment (CRA).
 - e. Melaksanakan sosialisasi secara aktif kepada seluruh pegawai terkait penerapan anti penyuapan di lingkungan balai dan satuan kerja serta mengikutsertakan seluruh pegawai dalam penguatan komitmen anti penyuapan.
 - f. Melaksanakan sosialisasi kepada pihak eksternal terkait penerapan sistem manajemen anti penyuapan di balai serta melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan kebutuhan dan kelengkapan dokumen senantiasa terbaru.
 - g. Berupaya melengkapi bukti-bukti dukung yang dibutuhkan dalam pembangunan Zona Integritas (ZI).
4. Efektivitas pemberian layanan
- Terdapat pegawai non ASN yang diterima menjadi pegawai ASN sehingga perlu adanya penyesuaian anggaran terkait honorarium pegawai.

4.2 Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Sebagai upaya perbaikan kinerja dalam menghadapi kendala yang ada, berikut adalah rekomendasi dan tindak lanjut secara umum yang dilakukan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III dalam mengoptimalkan pencapaian target kinerja yang berkelanjutan:

1. Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan
 - a. Pelaksanaan kegiatan pemantauan secara aktif dengan memanfaatkan media teknologi sehingga terjadi keberlanjutan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk memastikan

- eksistensi dan keterlibatan kelembagaan PKP baik dalam pelaksanaan kegiatan fisik maupun pengawasan.
- b. Pemberian pendampingan dan pemahaman kepada Pemerintah Daerah terkait urgensi RP3KP sebagai pedoman penyelenggaraan PKP dan bukan hanya sebagai bahan pemenuhan *readiness criteria* untuk mendapatkan program bantuan dari Pemerintah Pusat.
2. Pelaksanaan Bantuan Rumah Susun, Rumah Khusus, Rumah Swadaya dan bantuan PSU
 - a. Pemberian sosialisasi secara aktif kepada calon penerima bantuan terkait pedoman pelaksanaan bantuan perumahan mengacu Peraturan Menteri PKP nomor 10 tahun 2025 untuk memberikan pemahaman terkait pemenuhan persyaratan usulan maupun pelaksanaan.
 - b. Menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan sesuai arahan dari pusat dan melakukan penyesuaian anggaran.
 - c. Melakukan kegiatan Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi dan Rehabilitasi (OPOR) dalam rangka menjaga kelayakan aset sebelum diserahkan dan melakukan koordinasi dengan pusat terkait serah terima aset.
 - d. Pelaksanaan serah terima aset yang telah lama terbangun belum optimal dikarenakan User/Pemerintah Daerah sulit menerima karena kondisi fisik yang tidak layak.
 - e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk dapat lebih cepat menindaklanjuti kendala yang terjadi di lapangan.
 3. Pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko
 - a. Melaksanakan kegiatan sosialisasi secara aktif dan melibatkan pegawai dalam pelatihan dan sertifikasi manajemen risiko.
 - b. Membangun budaya keterbukaan dan kolaborasi, sehingga risiko dapat lebih mudah diidentifikasi dan dikelola serta melaksanakan pembahasan secara berkala melalui rapat internal.
 - c. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan serta memperbaiki proses yang ada berdasarkan hasil evaluasi tersebut.
 - d. Telah tersusunnya hasil identifikasi risiko baru yang sesuai dengan pemetaan *Corruption Risk Assessment (CRA)*.
 - e. Melaksanakan sosialisasi secara aktif kepada seluruh pegawai terkait penerapan anti penyuapan di lingkungan balai dan satuan kerja serta mengikutsertakan seluruh pegawai dalam penguatan komitmen anti penyuapan.
 - f. Melaksanakan sosialisasi kepada pihak eksternal terkait penerapan sistem manajemen anti penyuapan di balai serta melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan kebutuhan dan kelengkapan dokumen senantiasa terbaru.

- g. Berupaya melengkapi bukti-bukti dukung yang dibutuhkan dalam pembangunan Zona Integritas (ZI).
4. Efektivitas pemberian layanan
- Segera melakukan koordinasi dan pelaporan kepada pusat terkait adanya perubahan jumlah pegawai.



Tim Penyusun

Penanggungjawab :

Yenni Sofyan Mora, S.T., M.Si

Pengarah :

Widia Yulianti, S.T.

Dian Sefriansyah, S.T., M.Si.,S.Kom.

Rita Hartati, S.E., M.M.

Penyusun :

Syafrudin, S.T.

Rani Veronika, S.T.

Khikmatur Rasyidah, S.T.

Editor :

Rani Veronika, S.T.

Khikmatur Rasyidah, S.T.



**Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan
Kawasan Permukiman Sumatera III**

Lampiran

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Yenni Sofyan Mora**

Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Didyk Choiroel**

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**


- **Pihak Pertama dan Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
 2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Agustus 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Didyk Choiroel
NIP. 19710416 199201 1 001


Yenni Sofyan Mora
NIP. 19810421 200812 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	1 Tingkat Layanan Dukungan Manajemen	4 Layanan

KEGIATAN

1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III
2	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau
3	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

PAGU APBN

Rp	1,251,514,000.00
Rp	567,434,000.00
Rp	575,135,000.00
Rp	556,592,000.00
Total	Rp 2,950,675,000.00

Jakarta, 30 Agustus 2025

SEKRETARIS JENDERAL

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III

DIDYK CHOIROEL


YENNI SOFYAN MORA

Perjanjian Kinerja Awal Sekretariat Jenderal Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Yenni Sofyan Mora**

Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Didyk Choiroel**

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

- **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
 2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 14 November 2025

Pihak Kedua

Didyk Choiroel
NIP. 19710416 199201 1 001

Pihak Pertama


Yenni Sofyan Mora
NIP. 19810421 200812 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	1 Tingkat Layanan Dukungan Manajemen	4 Layanan

KEGIATAN

1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III
2	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau
3	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

PAGU APBN

Rp	1,353,194,000.00
Rp	703,514,000.00
Rp	741,375,000.00
Rp	654,112,000.00
Total	Rp 3,452,195,000.00

Jakarta, 14 November 2025

SEKRETARIS JENDERAL

DIDYK CHOIROEL

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III


YENNI SOFYAN MORA

Perjanjian Kinerja Revisi/Akhir Sekretariat Jenderal Tahun 2025



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Yenni Sofyan Mora**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Fitrah Nur**
Jabatan : Direktur Jenderal Kawasan Permukiman

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

- **Pihak Pertama dan Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
 2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Agustus 2025

Pihak Kedua

Fitrah Nur
NIP. 19670419 199403 1 003

Pihak Pertama

Yenni Sofyan Mora
NIP. 19810421 200812 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	1 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1 Laporan
		1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	1 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	4 Laporan
3	Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	1 Jumlah Luasan Penanganan Permukiman Kumuh	79,21 Hektar

KEGIATAN	PAGU APBN
1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III	Rp 495,320,000.00
2 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau	Rp 11,246,766,000.00
3 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat	Rp 19,935,723,000.00
4 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau	Rp 86,334,000.00
Total	Rp 31,764,143,000.00

Jakarta, 22 Agustus 2025

DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN


FITRAH NUR

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III


YENNI SOFYAN MORA

Perjanjian Kinerja Awal Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Yenni Sofyan Mora**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Fitrah Nur**
Jabatan : Direktur Jenderal Kawasan Permukiman

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

- **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
 2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 03 Oktober 2025

Pihak Kedua

Fitrah Nur
NIP. 19670419 199403 1 003

Pihak Pertama

Yenni Sofyan Mora
NIP. 19810421 200812 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	1 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja 2 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Laporan 1 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	1 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	4 Laporan
3	Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	1 Jumlah Luasan Penanganan Permukiman Kumuh	103,72 Hektar
4	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah kawasan permukiman	1 Jumlah Rumah Swadaya Kawasan Permukiman	10 Unit

KEGIATAN	PAGU APBN
1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III	Rp 495,320,000.00
2 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau	Rp 8,899,434,000.00
3 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat	Rp 19,675,454,000.00
4 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau	Rp 713,986,000.00
Total	Rp 29,784,194,000.00

Pekanbaru, 03 Oktober 2025

DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

FITRAH NUR

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III

YENNI SOFYAN MORA

Perjanjian Kinerja Revisi/Akhir Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Yenni Sofyan Mora**

Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Imran**

Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

- **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
 2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 Agustus 2025

Pihak Kedua

Imran

NIP. 197310 26 199302 1 001

Pihak Pertama

Yenni Sofyan Mora

NIP. 19810421 200812 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi Dalam Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Kegiatan
		2 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	3 Laporan
2	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaa	1 Jumlah Rumah Swadaya Perdesaan	788 Unit
3	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan	1 Jumlah Rumah Khusus Perdesaan	140 Unit

KEGIATAN	PAGU APBN
1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III	Rp 252,620,000.00
2 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau	Rp 8,574,046,000.00
3 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat	Rp 77,872,504,000.00
4 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau	Rp 112,999,000.00
Total	Rp 86,812,169,000.00

Jakarta, 27 Agustus 2025

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN

IMRAN

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III

YENNI SOFYAN MORA

Perjanjian Kinerja Awal Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Yenni Sofyan Mora**

Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Imran**

Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

- **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
 2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua

Imran

NIP. 197310 26 199302 1 001

Pihak Pertama

Yenni Sofyan Mora

NIP. 19810421 200812 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi Dalam Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Kegiatan
		2 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	3 Laporan
2	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	1 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	3 Laporan
		2 Jumlah Rumah Swadaya Perdesaan	897 Unit
3	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	1 Jumlah Rumah Khusus Perdesaan	140 Unit
		2 Jumlah Komponen Rumah Untuk Mitigasi Bencana Perumahan Perdesaan	1 Unit

KEGIATAN

1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III
2	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau
3	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

PAGU APBN

Rp	546,356,000.00
Rp	8,535,521,000.00
Rp	85,492,615,000.00
Rp	66,198,000.00
Total	Rp 94,640,690,000.00

Jakarta, 27 Oktober 2025

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN

IMRAN

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III

YENNI SOFYAN MORA

Perjanjian Kinerja Revisi/Akhir Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Yenni Sofyan Mora**
 Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Sri Haryati**
 Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

- **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
 2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 26 Agustus 2025

Pihak Kedua


Sri Haryati
 NIP. 19710707 199703 2 004

Pihak Pertama


Yenni Sofyan Mora
 NIP. 19810421 200812 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi Dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan , Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	4 Laporan
2	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2 Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	323 unit
3	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	2 Rekomendasi Kebijakan
		2 Jumlah Rumah Hunia ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	102 Unit

KEGIATAN	PAGU APBN	
1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III	Rp	1,141,227,000.00
2 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau	Rp	21,285,044,000.00
3 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat	Rp	6,391,670,000.00
4 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau	Rp	27,427,968,000.00
Total	Rp	56,245,909,000.00

Jakarta, 26 Agustus 2025

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN


SRI HARYATI

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III


YENNI SOFYAN MORA

Perjanjian Kinerja Awal Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2025



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Yenni Sofyan Mora**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Sri Haryati**
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

- **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
 2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 18 Oktober 2025

Pihak Kedua


Sri Haryati
NIP. 19710707 199703 2 004

Pihak Pertama


Yenni Sofyan Mora
NIP. 19810421 200812 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi Dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan , Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	4 Laporan
2	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2 Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	248 unit
3	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	2 Rekomendasi Kebijakan
		2 Jumlah Rumah Hunia ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	102 Unit

KEGIATAN	PAGU APBN
1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III	Rp 1,141,227,000.00
2 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau	Rp 21,365,864,000.00
3 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat	Rp 4,724,051,000.00
4 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau	Rp 27,427,968,000.00
Total	Rp 54,659,110,000.00

Jakarta, 18 Oktober 2025

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN


SRI HARYATI

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III


YENNI SOFYAN MORA

Perjanjian Kinerja Akhir/Revisi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2025



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Yenni Sofyan Mora**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Azis Andriansyah**
Jabatan : Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 Juni 2025

Pihak Kedua



Azis Andriansyah
NRP. 77050672

Pihak Pertama



Yenni Sofyan Mora
NIP. 198104212008122001


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III
DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	2 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	1 Rekomendasi Kebijakan

KEGIATAN	PAGU APBN	
1 Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp	303.466.000,00

Jakarta, 24 Juni 2025

**DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN
PENGENDALIAN RISIKO**



AZIS ANDRIANSYAH

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN SUMATERA III**



YENNI SOFYAN MORA

Perjanjian Kinerja Awal Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2025

Lampiran 2. Berita Acara Kesepakatan Capaian Output Tahun 2025



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SUMATERA III

Jl. Diponegoro No. 45, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru – 28131, email : bp3kp.sumatera3@pkp.go.id

BERITA ACARA KESEPAKATAN
CAPAIAN OUTPUT TAHUN 2025
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SUMATERA III

HAL	: Finalisasi Capaian <i>Output</i> Tahun 2025 Balai Pelaksanan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III
Hari/Tanggal	: Rabu, 31 Desember 2025
Pihak Pertama	: Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III
Pihak Kedua	: Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau Sumatera Barat dan Kepulauan Riau

Berdasarkan laporan capaian pelaksanaan kegiatan pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Tahun 2025, maka Capaian *Output* Tahun 2025 dengan hasil kesepakatan sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja dari Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Tahun 2025:

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	2025		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
Sekretariat Jenderal			
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen			
1 Tingkat Layanan Dukungan Manajemen	4 Layanan	4 Layanan	100
Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman			
Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni			
1 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1 Laporan	1 Laporn	100
2 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100
Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman			
1 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	4 Laporan	4 Laporan	100
Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu			
1 Jumlah Luasan Penanganan Permukiman Kumuh	103,72 Hektar	103,72 Hektar	100
Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah kawasan permukiman			

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja		2025		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah Rumah Swadaya Kawasan Permukiman	10 Unit	10 Unit	100
Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan				
Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi Dalam Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan				
1	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	3 Laporan	3 Laporan	100
Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan				
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	3 Laporan	3 Laporan	100
2	Jumlah Rumah Swadaya Perdesaan	897 Unit	894 Unit	99,67
Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan				
1	Jumlah Rumah Khusus Perdesaan	140 Unit	140 Unit	100
2	Jumlah Komponen Rumah Untuk Mitigasi Bencana Perumahan Perdesaan	1 Unit	_*	_*
Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan				
Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi Dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan				
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan , Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100
2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	4 Laporan	4 Laporan	100
Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan				
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100
2	Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	248 unit	247 unit	99,60
Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan				
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	100
2	Jumlah Rumah Hunia ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	102 Unit	102 Unit	100
Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko				
Meningkatnya Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman				
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100
2	Jumlah Rekomendasi Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100

2. Capaian Kinerja dari Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja		2025		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Sekretariat Jenderal				
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen				
1	Tingkat Layanan Dukungan Manajemen	1 Layanan	1 Layanan	100
Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman				
Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman				
1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	1 Laporan	1 Laporan	100
Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu				
1	Jumlah Luasan Penanganan Permukiman Kumuh	35,58 Hektar	35,58 Hektar	100
Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan				
Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi Dalam Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan				
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan	1 Laporan	100
Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan				
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1 Laporan	1 Laporan	100
2	Jumlah Rumah Swadaya Perdesaan	376 Unit	376 Unit	100
Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan				
Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi Dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan				
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan	1 Laporan	100
Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan				
1	Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	57 unit	57 unit	100
Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan				
1	Jumlah Rumah Hunia ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	44 Unit	44 Unit	100

3. Capaian Kinerja dari Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja		2025		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Sekretariat Jenderal				
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen				
1	Tingkat Layanan Dukungan Manajemen	1 Layanan	1 Layanan	100

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja		2025		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman				
Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman				
1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	1 Laporan	1 Laporan	100
Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu				
1	Jumlah Luasan Penanganan Permukiman Kumuh	68,04 Hektar	68,04 Hektar	100
Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah kawasan permukiman				
1	Jumlah Rumah Swadaya Kawasan Permukiman	10 Unit	10 Unit	100
Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan				
Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi Dalam Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan				
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan	1 Laporan	100
Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan				
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1 Laporan	1 Laporan	100
2	Jumlah Rumah Swadaya Perdesaan	521 Unit	518 Unit	99,42
Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan				
1	Jumlah Rumah Khusus Perdesaan	140 Unit	140 Unit	100
2	Jumlah Komponen Rumah Untuk Mitigasi Bencana Perumahan Perdesaan	1 Unit	-*	-*
Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan				
Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi Dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan				
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan	1 Laporan	100
Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan				
1	Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	191 unit	190 unit	99,48

4. Capaian Kinerja dari Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja		2025		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Sekretariat Jenderal				
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen				
1	Tingkat Layanan Dukungan Manajemen	1 Layanan	1 Layanan	100
Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman				

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja		2025		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman				
1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	1 Laporan	1 Laporan	100
Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu				
1	Jumlah Luasan Penanganan Permukiman Kumuh	0,1 Hektar	0,1 Hektar	100
Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan				
Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi Dalam Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan				
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan	1 Laporan	100
Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan				
Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi Dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan				
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan	1 Laporan	100
Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan				
1	Jumlah Rumah Hunia ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	58 Unit	58 Unit	100

Ket : -* (Anggaran Terblokir)

Demikian Capaian *Output* Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Tahun 2025 telah dibuat berdasarkan Revisi Akhir Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III dan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, sehingga Berita Acara Kesepakatan ini dapat digunakan sebagai bukti dukung dalam penyusunan Laporan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Tahun 2025.



Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

renni Sofyan Mora, S.T., M.Si.

Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

Suwindar Agung S, SE., S.T.

Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat

Riky Hidayat, S.T.

Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

Andi, S.T.

Lampiran 3. Bukti Dukung Capaian Kinerja

A. PEMBANGUNAN BSPS

Provinsi Sumatera Barat



BSPS Deleniasi Pesisir



BSPS Deleniasi Perkotaan



BSPS Deleniasi Perdesaan

A. PEMBANGUNAN BSPS

Provinsi Riau



BSPS Delienasi Perkotaan



BSPS Delineasi Perdesaan

B. PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN

Provinsi Riau



Pembangunan Rumah Susun Kejaksaan Tinggi Riau

1 Tower, Tipe 36, 3 lantai, 44 unit

B. PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN

Provinsi Kepulauan Riau



Pembangunan Rumah Susun Rsud Tanjung Batu Kundur

1 Tower, Tipe 24, 4 lantai, 58 unit

C. PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

Provinsi Sumatera Barat



Pekerjaan Jalan Beton



Pekerjaan Jalan

Pasie Nan Tigo, Kota Padang, Sumatera Barat

Unit Bantuan: **52,64 Ha** Pek Bangunan Rumah : **11 unit**

Pasar Lama Pulau Penujung, Kabupaten Dhamasraya, Sumatera Barat

Unit Bantuan: **15,64 Ha** Pek Bangunan Rumah : **54 unit**

C. PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

Provinsi Sumatera Barat

Pek. Jalan : **718 m**

Pek. Drainase : **3.040 m**

Pek. Jalan : **1.042 m**

Pek. Drainase : **674 m**

Pek. Air Minum : **334 SR**

Provinsi Riau



Pekerjaan Pemasangan Kanstin STA 0+300

Danau Dipo Boncah Balong, Kabupaten Rokan Hulu, Riau

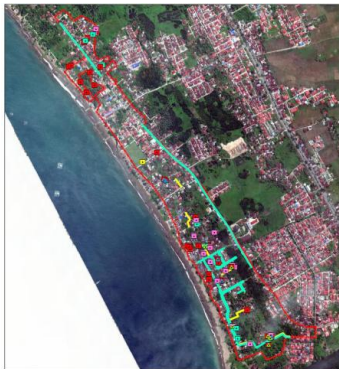
Unit Bantuan: **35,58 Ha**

Pek. Drainase: **1.916 m**

Pek. Pengolahan Sampah : 1 unit

D. PENINGKATAN KUALITAS SANITASI RUMAH

Provinsi Sumatera Barat



Pasie Nan Tigo, Kota Padang, Sumatera Barat

Unit Bantuan: **52 unit**

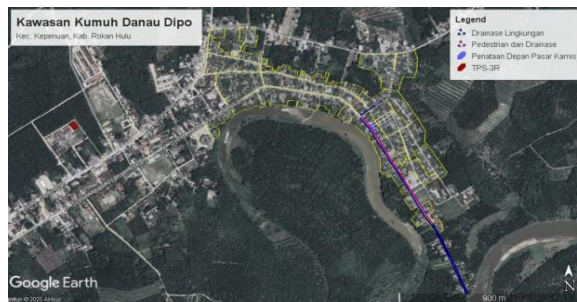
Pasar Lama Pulau Penujung, Kabupaten Dhamasraya, Sumatera Barat

Unit Bantuan : **54 Unit**

Provinsi Riau

D. PENINGKATAN KUALITAS SANITASI RUMAH

Provinsi Sumatera Barat



Danau Dipo Boncah Balong, Kabupaten Rokan Hulu, Riau

Unit Bantuan : 18 Unit

Provinsi Kepulauan Riau



Kampung Bugis, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau

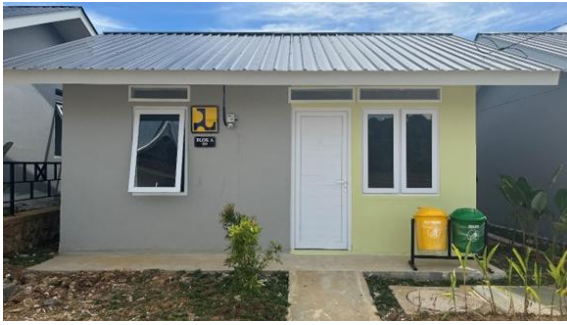
Unit Bantuan : 40 Unit

E. PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS

Provinsi Sumatera Barat



E. PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS



Hunian tetap pasca bencana banjir bandang lahar dingin dan tanah longsor Kab. Agam

Tipe single unit, 80 unit



Hunian tetap pasca bencana banjir bandang lahar dingin dan tanah longsor Kab. Tanah Datar

Tipe single unit, 60 unit

Lampiran 4. Penghargaan

Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau



Satuan Kerja dengan nilai IKPA Terbaik Ke- II di Lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Periode TW III TA. 2025

Diberikan oleh Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan

Lampiran 5. Dokumentasi Kegiatan

Rapat Sinkronisasi Program dan Konsolidasi Pendataan Perumahan I di Wilayah BP3KP Sumatera III

Rapat Koordinasi I: Sinkronisasi dan konsolidasi pendataan pembangunan perumahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di wilayah kerja BP3KP Sumatera III.



Rapat Koordinasi II: Sosialisasi Program Pembiayaan Perumahan di Wilayah Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau



Rapat Koordinasi III: Rapat Teknis Pendataan Legalitas Tanah dan Capaian BSPS Perkotaan di Provinsi Sumatera Barat dan Riau



Rapat Koordinasi III: Rapat Evaluasi Internal BP3KP Sumatera III Tahun 2025 dan Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman




Rapat Evaluasi Internal BP3KP Sumatera III Tahun 2025 dan Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman
Meneguhkan komitmen dalam penguatan layanan Klinik Rumah PKP dan pengembangan ekosistem digital perumahan untuk mewujudkan program yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran menuju hunian layak, berkelanjutan, dan inklusif.

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN





BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Rapat Koordinasi IV: FGD Dampak Program KPR Sejahtera FLPP terhadap MBR dan Pengembang di Provinsi Sumatera Barat





FGD Pemantauan Dampak Program KPR Sejahtera FLPP terhadap MBR dan Pengembang di Provinsi Sumatera Barat
Senin, 22 September 2025, Kepala BP3KP Sumatera III menjadi salah satu narasumber untuk menyampaikan terkait implementasi program KPR Sejahtera FLPP di Provinsi Sumatera Barat yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumatera Barat.

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN






BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Pembangunan dan Pembangunan Kawasan Kumuh, Sanitasi, BPS dan PSU

Rapat Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Kawasan Pasar Lama, Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya



Rapat Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Kawasan Pasar Lama, Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya
 Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman didampingi Kepala Balai P3KP Sumatera III melakukan Rapat Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Kawasan Pasar Lama, Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya (Kamis, 18 September 2025).

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III
 KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN




BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III
 KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kegiatan Manajemen Risiko, Pencegahan Korupsi dan Zona Integritas



Melangkah Bersama Menuju Birokrasi Berintegritas
 Menggali praktik terbaik melalui Studi Tiru di Kemenag Kota Batam sebagai upaya memperkuat Zona Integritas dan menghadirkan layanan publik yang unggul.

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III
 KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



Sosialisasi Pencegahan Gratifikasi dan Penandatanganan Fakta Integritas
 Meneguhkan komitmen seluruh pegawai BP3KP Sumatera III dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan bebas dari gratifikasi.

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III
 KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Pembangunan dan Pembangunan Kawasan Kumuh, Sanitasi, BPS dan PSU

Fasilitasi Layanan Klinik Rumah Swadaya (KRS)

Sosialisasi Klinik PKP dan Pembangunan Zona Integritas di BP3KP Sumatera III



Pembangunan dan Pembangunan Kawasan Kumuh, Sanitasi, BPSD dan PSU

Monitoring dan Evaluasi Rumah Khusus

Monev Hunita Tetap Kab. Tanah Datar dan Agam



Tim Penyusun

Penanggungjawab :

Yenni Sofyan Mora, S.T., M.Si

Pengarah :

Widia Yulianti, S.T.

Dian Sefriansyah, S.T., M.Si.,S.Kom.

Rita Hartati, S.E., M.M.

Penyusun :

Syafrudin, S.T.

Rani Veronika, S.T.

Khikmatur Rasyidah, S.T.

Editor :

Rani Veronika, S.T.

Khikmatur Rasyidah, S.T.







**Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan
Kawasan Permukiman Sumatera III**